

**POLITIK ALOKASI DANA POKOK-POKOK PIKIRAN (POKIR) OLEH
ANGGOTA DPRD di KABUPATEN BANJARNEGARA**

PERIODE 2019-2024

Skripsi

Program Sarjana S-1 Ilmu Politik



Disusun Oleh
Latif
NIM: 2106016102

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

NOTA PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepda.
Yth. Dekan FISIP
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

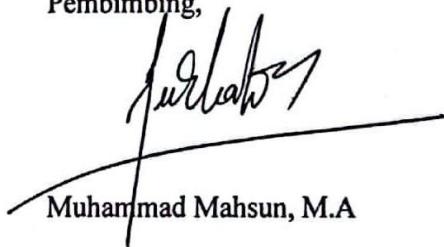
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Latif
NIM : 2106016102
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Politik Alokasi Dana Pokir Oleh Anggota DPRD di Kabupaten
: Banjarnegara Periode 2019-2024

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 05 Maret 2025
Pembimbing,



Muhammad Mahsun, M.A

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI

**POLITIK ALOKASI DANA POKOK-POKOK PIKIRAN (POKIR) OLEH
ANGGOTA DPRD di KABUPATEN BANJARNEGARA**

PERIODE 2019-2024

Disusun Oleh:

Latif

2106016102

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 17 Maret 2025 dan telah
dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



Sekretaris

Drs. H. Nur Syamsudin, M.A.

Penguji

u

Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag

Pembimbing

Muhammad Mahsun, M.A.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Latif menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Politik Alokasi Dana Pokir Oleh Anggota DPRD di Kabupaten Banjarnegara Periode 2019-2024” merupakan hasil karya penelitian saya sendiri serta tidak mengandung karya orang lain di dalamnya, karya penulisan saya ini diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang maupun di lembaga perguruan tinggi yang lainnya. Informasi yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang tidak ataupun belum terbit, sumbernya dijelaskan dalam tulisan serta daftar pustaka. Apabila terdapat unsur –unsur plagiarisme di dalam karya tulisan ini, maka saya akan bertanggung jawab serta siap menerima konsekuensi yang berlaku, sekian dan terimakasih.

Semarang, 05 Maret 2025

Yang menyatakan,

Latif

Nim. 2106016102

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunianya serta pertolongannya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Politik Alokasi Dana Pokir Oleh Anggota DPRD di Kabupaten Banjarnegara Periode 2019-2024" dengan lancar dan tanpa hambatan apapun, Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafagatnya di hari akhir.

Dengan selesainya skripsi ini, merupakan karunia dan kenikmatan yang luar biasa dari Allah SWT, sebagai bagian dari tugas akhir untuk menyelesaikan kuliah jenjang S1 jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tentu sendirian banyak pihak yang telah membantu serta memberikan dukungan.

Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar M.Ag. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan serta menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. terimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengenyam pendidikan S1 jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Bapak M. Nuklir Bariklana, M.Si. terimakasih atas segenap bantuan serta dukungannya dalam menyelesaikan proses penulisan serta penyusuan skripsi ini.
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Ibu Masrohatun, M.Si terimakasih atas segenap bantuan serta dukungannya dalam menyelesaikan proses penyusunan serta penulisan skripsi ini.
5. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Mahsun M.A, terimakasih atas bimbingannya, atas ilmunya, atas arahannya, atas motivasinya dan segala dukungan yang diberikan kepada

penulis. Sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar serta tanpa halangan yang berarti.

6. Segenap jajaran dosen Fisip UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmu sehingga penulis berhasil menyelesaikan karya skripsi ini.
7. Ayah dan Ibu penulis, Bapak Tukharno dan Ibu Kinah serta keluarga, atas segala dukungan motivasi, moral maupun moril kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar.
8. Bapak Bambang Adi Purnomo, selaku anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara periode 2024-2029, terimakasih atas segala bantuan dan informasinya, sehingga penulis dapat melengkapi bahan penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Arya Achmad Zakaria SH.MH, selaku anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara periode 2024-2029, terimakasih atas segala bantuan dan informasinya, sehingga penulis dapat melengkapi bahan penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Bapak. H. Pujo Hardiansyah, selaku anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara periode 2019-2024, terimakasih atas segala bantuan dan informasinya, sehingga penulis dapat melengkapi bahan penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Bapak Endar Agus Triono, selaku calon anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara pada pemilu 2024, terimakasih atas segala bantuan dan informasinya, sehingga penulis dapat melengkapi bahan penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara Drs. Indarto M.si berserta jajarannya, terimakasih atas segala bantuan dan informasinya, sehingga penulis dapat melengkapi bahan penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Bapak Yusuf Agung Prabowo, SH. MSi berserta jajarannya, terimakasih atas segala bantuan dan informasinya, sehingga penulis dapat melengkapi bahan penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara Bapak Yusuf Winarsono, ST. MT berserta jajarannya, terimakasih atas segala bantuan dan informasinya, sehingga penulis dapat melengkapi bahan penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Segenap Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara berserta jajarannya, terimakasih atas segala bantuan dan informasinya, sehingga penulis dapat melengkapi bahan penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

16. Kepala Desa Beji Bapak Nyana, berserta jajarannya, terimakasih atas segala bantuan dan informasinya, sehingga penulis dapat melengkapi bahan penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
17. Kepala Desa Pekandangan, Bapak Adhi Setiawan S.Pd. berserta jajarannya, terimakasih atas segala bantuan dan informasinya, sehingga penulis dapat melengkapi bahan penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
18. Sahabat saya sekaligus kakak saya Toto Rudianto dan Almarhum Sofian Hidayat, serta sahabat saya Masyhudan Ahmad Prakosa dan Muhammad Zaky, terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya, serta terimakasih telah senantiasa menemani proses dari awal hingga selesai penulisan skripsi ini.

PERSEMBAHAN

Bismillahhirahmannirohim

Dengan segala syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan tidak ada Tuhan selain Dia, dia adalah yang berdiri sendir serta tidak ada daya upaya melainkan pertolongan dari Nya

Saya persembahkan sebuah karya ini kepada kedua orang tua saya Bapak Tukharno dan Ibu Kinah yang telah berjuang keras, membiayai serta mendoakan saya dalam menempuh pendidikan S1 saya, semoga Allah SWT menyayangi mereka sebagaimana mereka sangat sayang kepada saya

Kepada dosen pembimbing saya Bapak Muhammad Mabsun yang telah memberikan bimbingan dan segala ilmunya, saya bedo'a semoga kelak suatu saat, Allah SWT menjadikan saya orang hebat seperti beliau

Serta untuk almamater tercinta Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UIN walisongo Semarang, yang telah menjadi tempat saya menimba ilmu sebagai persiapan mengarungi kerasnya kehidupan

MOTTO

“Segudang kepintaran itu tidak ada artinya dibandingkan dengan segenggam kekuasaan”

~Prof. Dr. Yusril Ihya Mahendra, S.H., M.Sc.

“Teruslah Berkembang dan Menjadi Lebih Baik, Karena Agama Dan Bangsa Membutuhkanmu”

~Latif

ABSTRAK

Dana pokok-pokok pikiran (Pokir) hadir sebagai implementasi dua fungsi DPRD yaitu fungsi representasi dan fungsi penganggaran, dengan tujuan untuk menjalankan pembangunan yang tidak ditampung oleh pemerintah daerah, pada pendistribusianya dana pokir digunakan oleh anggota DPRD untuk memobilisasi dukungan suara, ini menjadikan distribusi dana pokir tidak tepat sasaran dan pendistribusianya lebih memprioritaskan wilayah basis dukungan suara daripada prioritas kebutuhan wilayah, akibatnya memunculkan politik patronase dan klientelisme. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banjarnegara dengan alasan 60% anggota DPRD yang terpilih pada pemilu 2024 adalah petahana serta pada pendistribusian dana pokir Kabupaten Banjarnegara 2024 terjadi beberapa kesalahan yang mengakibatkan dana pokir yang diterima kelompok masyarakat tidak sesuai jumlah besaran dana pokirnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pola pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara serta untuk mengetahui bagaimana dampak dana pokir dalam berkontribusi pada kemenangan petahana DPRD di kabupaten banjarnegara pada pemilu 2024.

Analisa penelitian ini menggunakan teori *distributive politic*. Teori ini digunakan untuk menganalisa bagaimana pola pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara serta untuk menganalisa bagaimana dampak dana pokir dalam berkontribusi pada kemenangan petahana DPRD di kabupaten banjarnegara pada pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus, guna mendeskripsikan serta menganalisa secara mendalam bagaimana pola pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara serta bagaimana dampak dana pokir dalam berkontribusi pada kemenangan petahana DPRD di kabupaten banjarnegara pada pemilu 2024

Hasil studi ini diringkas menjadi dua poin penting yaitu. *Pertama* dana pokir di Kabupaten Banjarnegara didistribusikan dalam dua model, yaitu model distribusi programatik dan model distribusi non-programatik, pada distribusi programatik ditemukan pola pork barrel dan politik klientelisme, anggota DPRD petahana pada strategi dana pokir membagi wilayah Kabupaten Banjarnegara menjadi tiga, yaitu wilayah ekonomi kelas atas (wilayah kota). Wilayah ekonomi kelas menengah (wilayah desa) dan wilayah ekonomi kelas bawah (wilayah desa), wilayah ekonomi kelas menengah kebawah dalam hal ini wilayah desa, adalah wilayah prioritas penggunaan dana pokir sebagai strategi untuk mendapatkan

dukungan suara. Kedua dana pokir memberikan kontribusi besar terhadap kemenangan suara dan keterpilihan kembali petahana, terutama petahana yang berasal dari wilayah desa, penyebabnya adalah karena strategi dana pokir lebih efektif diterapkan di wilayah desa dibanding wilayah kota di Kabupaten Banjarnegara, Penelitian ini juga menemukan bahwab dana pokir memberikan keuntungan petahana dalam pembentukan tim sukses pada momen pemilu.

Kata Kunci: Politik Distributif, Dana Pokir, DPRD

ABSTRACT

The main ideas fund (Pokir) is present as an implementation of two DPRD functions, namely the representation function and the budgeting function, with the aim of carrying out development that is not accommodated by the local government, in the distribution of pokir funds used by DPRD members to mobilize vote support, this makes the distribution of pokir funds not on target and its distribution prioritizes vote support base areas rather than prioritizing regional needs, as a result giving rise to patronage politics and clientelism. This research was conducted in Banjarnegara Regency on the grounds that 60% of DPRD members elected in the 2024 elections were incumbents and in the distribution of the 2024 Banjarnegara Regency pokir funds there were several errors that resulted in pokir funds received by community groups not in accordance with the amount of pokir funds. This research was conducted to find out how the distribution pattern of the pokir funds in Banjarnegara Regency and to find out how the impact of the pokir funds contributed to the victory of the incumbent DPRD in Banjarnegara Regency in the 2024 elections.

This research analysis uses the theory of distributive politics. This theory is used to analyze how the pattern of distribution of pokir funds in Banjarnegara Regency and to analyze how the impact of pokir funds in contributing to the victory of the incumbent DPRD in Banjarnegara Regency in the 2024 elections. This research uses a qualitative method with a case study approach, in order to describe and analyze in depth how the distribution pattern of the pokir funds in Banjarnegara Regency and how the impact of the pokir funds contributed to the victory of the incumbent DPRD in Banjarnegara Regency in the 2024 elections.

The results of this study are summarized into two important points, namely. First, the pokir funds in Banjarnegara Regency are distributed in two models, namely the programmatic distribution model and the non-programmatic distribution model, in the programmatic distribution, pork barrel patterns and clientelist politics are found, incumbent DPRD members in the pokir fund strategy divide the Banjarnegara Regency into three areas, namely the upper-class economic area (city area). The middle class economic area (village area) and the lower class economic area (village area), the lower middle class economic area in this case the village area, is a priority area for the use of pokir funds as a strategy to gain vote support. Second, Pokir funds made a major contribution to the victory of votes and the

re-election of incumbents, especially incumbents who came from village areas, the cause was because the Pokir fund strategy was more effectively implemented in village areas than in urban areas in Banjarnegara Regency, This study also found that Pokir funds gave incumbents an advantage in the formation of a success team at the moment of the election.

Keywords: Distributive Politics, Pokir Fund, DPRD

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	7
1. Pork Barrel dari Segi Keuntungan Electoral dalam Keterpilihan Kembali Petahana Pada Pemilu	7
2. Politik Patronase dan Klientelisme pada Pork Barrel	12
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan	15
2. Sumber dan Jenis Data.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17

4. Validasi Data.....	18
5. Teknik Analisis Data.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	19
Bab I Pendahuluan	19
Bab II Kerangka Teori	19
Bab III Landscape Kabupaten Banjarnegara	20
Bab IV Proyek Dana Pokir dan Pendistribusianya	20
Bab V Dana Pokir Dan Insentif Elektoral Bagi Petahana.....	20
Bab VI Penutup.....	20
BAB II	21
KERANGKA TEORI	21
1. Definisi Konseptual.....	21
2. Teori Politik Distributif.....	22
1) Distribusi Programatik	24
2) Distribusi Non-Programatik.....	25
a. Klientelisme	26
b. <i>Pork Barrel</i>	27
c. <i>Club Goods</i>	27
BAB III.....	28
LANDCAPE KABUPATEN BANJARNEGARA	28
A. Kondisi Geografis dan Kondisi Demografis Kabupaten Banjarnegara	28
1. Kondisi Geografis Kabupaten Banjarnegara	28
a. Letak Geografis Kabupaten Banjarnegara	28
b. Topografi Kabupaten Banjarnegara.....	29
c. Iklim Kabupaten Banjarnegara	30
d. Hidrografi Kabupaten Banjarnegara	30
e. Sumber Daya Alam di Kabupaten Banjarnegara	30
2. Kondisi Demografi Kabupaten Banjarnegara.....	31
a. Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara	31
b. Penduduk Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Usia.....	31
c. Penduduk Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Jenis Kelamin	32
d. Penduduk Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Agama	33

e. Penduduk Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Pendidikan	33
f. Penduduk Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Pekerjaan	34
B. Struktur Sosial dan Ekonomi Kabupaten Banjarnegara	35
1. Struktur Sosial Kabupaten Banjarnegara	35
2. Struktur Ekonomi Kabupaten Banjarnegara	36
C. Struktur Politik Kabupaten Banjarnegara	37
1. Peta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara	37
2. Kepemimpinan Bupati Kabupaten Banjarnegara Pasca Reformasi	37
D. Peta Dapil Kabupaten Banjarnegara.....	39
BAB IV	41
PROYEK DANA POKIR DAN PENDISTRIBUSIANNYA	41
A. Mengenal Dana Pokir di Kabupaten Banjarnegara.....	41
B. Mode Distribusi Proyek Dana Pokir	45
1. Distribusi Programatik	45
2. Distribusi Non-Programatik	46
1) Pork Barrel	48
2) Klientelisme	50
C. Strategi Petahana Pada Pendistribusian Proyek Dana Pokir Dengan Pola Pork Barrel	51
1. Strategi Pendistribusian Dana Pokir di Wilayah Kota Dengan Masyarakat Ekonomi Kelas Atas	52
2. Strategi Pendistribusian Dana Pokir di Wilayah Desa Dengan Masyarakat Ekonomi Kelas Menengah dan Ekonomi Kelas Bawah	53
D. Peran Broker Pada Pendistribusian Proyek Dana Pokir.....	55
1. Broker yang Berkerja Sama Dengan Masyarakat Secara Langsung	55
2. Jaringan Mesin Politik dalam Memperkuat Strategi Pendistribusian Dana Pokir	57
BAB V	60
DANA POKIR DAN INSENTIF ELEKTORAL BAGI PETAHANA	60
A. Dana Pokir dan Keuntungan Pada Pembentukan Tim Sukses	60
B. Dana Pokir dan Mobilisasi Pemilih.....	62
C. Dampak Dana Pokir Pada Keterpilihan Petahana.....	65

1. Dampak Dana Pokir Terhadap kemenangan Petahana	65
2. Signifikansi Dana Pokir Terhadap Insentif Elektoral Petahana.....	68
3. Kekalahan Petahana Sebagai Akibat dari Kegagalan Strategi Pendistribusian Dana Pokir.....	72
BAB VI	76
PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Lesson Learned dan Kelemahan Studi	77
C. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara	31
Tabel 2. Komposisi Penduduk Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Usia	32
Tabel 3. Komposisi Penduduk Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Jenis Kelamin	33
Tabel 4. Komposisi Penduduk Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Agama	33
Tabel 5. Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	34
Tabel 6. Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	35
Tabel 7. Jumlah Pasar di Kabupaten Banjarnegara	36
Tabel 8. Perolehan kursi DPD Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Partai.....	37
Tabel 9. Pembagian Daerah Pemilihan Kabupaten Banjarnegara	39
Tabel 10. Usulan Pokir DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025	49
Tabel 11. Pengawasan dan Pelaksanaan Pokir 2024 Kabupaten Banjarnegara.....	55
Tabel 12. Daftar Asal Wilayah Domisili, Petahana DPRD Kabupaten Banjarnegara yang Terpilih Kembali di Pemilu 2024.	66
Tabel 13. Perolehan kursi berdasarkan partai	68
Tabel 14. Perbandingan perolehan suara petahana di pemilu 2019 dan pemilu 2024	69
Tabel 15. Daftar Asal Wilayah Domisili, Petahana DPRD Kabupaten Banjarnegara yang tidak Terpilih Kembali di Pemilu 2024.	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Konsep Politik Distributif	23
Gambar 2. Potret Wilayah Kabupaten Banjarnegara.....	28
Gambar 3. Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Banjarnegara	40

Gambar 4. Tahapan Distribusi Dana Pokir di Kabupaten Banjarnegara 44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan di daerah kabupaten/kota, DPRD memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi representasi yaitu kewajiban anggota DPRD untuk menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi atau pengaduan dari masyarakat yang didapat melalui kegiatan reses di daerah konstituen, serta bertanggung jawab baik secara moral maupun politis kepada konstituen mereka (Marasabessy 2022). Dalam rangka menguatkan fungsi representasi anggota DPRD di Indonesia, maka sejumlah pemerintah daerah mengadopsi dana pokok-pokok pikiran atau disingkat dengan pokir (sebelumnya di kenal dengan istilah dana aspirasi). Dana pokir adalah dana yang diberikan kepada anggota dewan untuk didistribusikan kepada konstituen mereka guna menjalankan pembangunan yang tidak ditampung oleh pemerintah daerah, pendistribusian dana pokir yang diamanatkan kepada anggota dewan didasarkan pada kepentingan publik atau berdasar kepada kebutuhan serta keinginan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah konstituen, bukan pendistribusian yang berdasar kepada kepentingan individu atau kelompok serta kepentingan partisan, loyalitas maupun klientelistik (Mahsun 2015).

Dana pokir hadir sebagai bentuk implementasi dari dua fungsi DPRD, yaitu fungsi penganggaran dan fungsi representasi, sebagaimana diterangkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014, DPRD mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran serta fungsi pengawasan, sedangkan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 (UU MD3), DPRD mempunyai fungsi lain selain tiga fungsi diatas yaitu fungsi representasi. Tugas DPRD dalam melakukan penyerapan dan penampungan aspirasi, serta menyampaikan usulan konstituen yang didapat saat reses agar dituangkan ke dalam RAPBD berupa dana pokir merupakan implementasi dari fungsi representasi dan penganggaran (Wibowo 2020). Tujuan dari dana pokir antara lain adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah konstituen, sekaligus untuk pemerataan dan juga percepatan pembangunan, salah satu penyulurannya adalah untuk program pembangunan di daerah pedesaan ataupun kelurahan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat di tiap-tiap masing daerah konstituen (Marasabessy 2022). Dana pokir ditunjukan untuk mendorong pembangunan di

masing-masing daerah pemilihan, dengan kriteria program pembangunan adalah kegiatan fisik, pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana, hasil program berhubungan langsung dengan pelayanan kepada konstituen dan penganggaran dilakukan dengan dana pokir. Kegiatan fisik itu sendiri dapat ditunjukan kepada kelompok masyarakat desa atau kelurahan, lembaga pendidikan maupun lembaga adat serta lembaga sosial yang lain (Susanto 2017).

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas bahwa distribusi dana pokir bertujuan untuk memberikan manfaat kepada konstituen dengan pendistribusian atas dasar kepentingan dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah pemilihan atau berdasar kepentingan publik, adapun manfaat dana pokir itu sendiri antara lain, terselenggaranya pembangunan di setiap desa ataupun kelurahan, dimana dengan adanya pembangunan tersebut, dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, seperti contoh penyediaan air bersih, pembangunan gedung sarana olahraga, pembangunan puskesmas, pembangunan masjid dan lain sebagainya (Susanto 2017). Kepentingan dan kebutuhan konstituen, yang menjadi dasar pertimbangan kewilayah masyarakat mana dana pokir akan didistribusikan, adalah bagian penting dari pendistribusian dana pokir, dengan ini maka dana pokir akan tersalurkan tepat sasaran dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan konstituen, kepentingan publik sendiri dihasilkan dari identifikasi masalah yang didapat anggota DPRD saat masa reses (Mahsun 2015).

Tujuan dan manfaat serta kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang menjadi dasar dalam pendistribusian dana pokir, telah menarik sejumlah sarjana untuk melakukan penelitian. Berbagai kajian tersebut umumnya membahas tentang tentang keuntungan *electoral* dalam keterpilihan kembali petahana pada pemilu (Mahsun, 2015; Saragintan dan Hidayat, 2017; Sari, 2021; Anggoro, 2019; Haliza, Fendri, Andora, Khairani dan Rosari, 2023; Susanto, 2017). Penelitian ini menemukan pola *pork barrel* bahwa dana pokir cenderung disalahgunakan oleh anggota DPRD untuk memobilisasi dukungan suara pada momen pileg, dengan modus dari anggota DPRD untuk mendapatkan dukungan suara, adalah dengan cara mendistribusikan dana pokir ke wilayah dan kelompok sosial masyarakat tertentu yang menjadi basis dukungan suara. Selain itu pendistribusian dana pokir yang seharusnya berdasar kebutuhan dan kepentingan konstituen, namun pada faktanya banyak ditemukan penyalahgunaan dana pokir untuk kepentingan pribadi anggota DPRD untuk mendapatkan dukungan suara. Sedangkan penelitian yang lain mengkaji *pork barrel* pada hubungan patronase dan klientelisme. (lihat Yanto, 2022; Hilmawan 2022; lihat Alfaz dan Suswanta, 2021; Wahyudi, 2018). Studi ini menemukan bahwa patronase dan klientelisme

yang terjalin, menargetkan kelompok sosial masyarakat tertentu yang dianggap berpengaruh, pihak yang terlibat sebagai broker masih memiliki kedekatan hubungan sosial dengan *incumbent*, studi ini juga menemukan bahwa *pork barrel* tidak hanya dilakukan oleh petahana DPRD tetapi juga dilakukan oleh petahana kepala daerah menjelang kontestasi pilkada.

Penelitian diatas menurut penulis belum melakukan kajian secara mendalam terutama mengenali *pork barrel* dalam distribusi dana pokir anggota DPRD serta kontribusinya dalam kemenangan petahana DPRD pada pemilu di Indonesia. Penelitian terdahulu mayoritas adalah penelitian lama dan beberapa sudah dilakukan lebih dari lima tahun. Penulis ingin melengkapi penelitian-penelitian tentang *pork barrel* pada distribusi dana pokir DPRD di Indonesia serta melengkapi keterbaharunya. Pada momen pemilu 2024 terutama di daerah Jawa Tengah, beberapa hasil pemilu DPRD di beberapa Kabupaten/Kota di dominasi oleh petahana, seperti, Kabupaten Purbalingga 64% di dominasi oleh petahana, dengan jumlah petahana adalah 32 kursi dari total anggota DPRD 50 kursi (ada penambahan 5 kursi di pemilu 2024 yang sebelumnya hanya 45 kursi pada pemilu 2019), Kabupaten Banyumas 72% di dominasi oleh petahana, dengan jumlah petahana adalah 36 kursi dari total anggota DPRD 50 kursi, Kabupaten Batang 75,5% di dominasi oleh petahana, dengan jumlah petahana adalah 34 kursi dari total anggota DPRD 45 kursi, Kabupaten Brebes 60% di dominasi oleh petahana, dengan jumlah petahana adalah 30 kursi dari total anggota DPRD 50 kursi, Kabupaten Kebumen 52% di dominasi oleh petahana, dengan jumlah petahana adalah 26 kursi dari total anggota DPRD 50 kursi, Kabupaten Rembang 57,7% di dominasi oleh petahana, dengan jumlah petahana adalah 26 kursi dari total anggota DPRD 45 kursi dan Kabupaten Banjarnegara 60% didominasi oleh petahana, dengan jumlah petahana sebanyak 30 kursi, dari total kursi anggota DPRD yaitu 50 kursi.

Studi penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Banjarnegara, peneliti mempunyai dua alasan yang menjadi faktor peneliti memilih Kabupaten Banjarnegara sebagai lokasi penelitian yaitu: Alasan *Pertama*, adalah karena sebanyak 50 anggota DPRD Banjarnegara yang terpilih di pemilu 2024, diantaranya 60% di dominasi oleh petahana yang terpilih di pemilu 2019 dan 40% adalah pendatang baru. Perolehan kursi terbanyak didominasi oleh PDI-P. Sebagian besar kandidat petahana yang terpilih mengalami kenaikan suara, dengan jumlah yang mengalami kenaikan suara adalah 23 petahana terpilih, kenaikan jumlah suarannya variatif dari ratusan hingga ribuan, yang tertinggi mengalami kenaikan hingga 7000 lebih suara (KPU Banjarnegara 2024) dengan rata-rata kenaikan suara petahana adalah 2.033 suara. Dari data tersebut peneliti ingin melihat bagaimana dana pokir berkontribusi

pada kemenangan petahana dipemilu DPRD Kabupaten Banjarnegara 2024 serta bagaimana proses pendistribusianya.

Di Kabupaten Banjarnegara. Besaran dana pokok-pokok pikir untuk setiap anggota DPRD adalah Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar dan untuk ketua DPRD adalah Rp 1 miliar sampai Rp 1,5 miliar (DPRD Banjarnegara 2024). Besarnya anggaran dana pokir memunculkan kemungkinan kandidat petahana untuk menggunakan dana pokir sebagai alat memobilisasi pemilih demi mendapatkan dukungan suara menjelang pemilu, persaingan yang ketat serta tuntutan kandidat untuk mengalahkan lawan-lawannya yang berasal dari partai yang sama maupun partai yang berbeda, ini menjadikan para kandidat harus membangun strategi yang tepat dalam memobilisasi dukungan suara pribadi mereka, tindakan seperti ini bertentangan dengan etika demokrasi serta menyebabkan patronase dan klientelisme politik, sehingga mempersempit ruang kompetisi dan menjadikan distribusi dana pokir tidak tepat sasaran (Mahsun 2014).

Alasan *Kedua*, adalah dikarenakan di Kabupaten Banjarnegara pada pemilu tahun 2024 terjadi beberapa permasalahan pada pendistribusian dana pokir, seperti yang terjadi disebuah desa yang masuk kedalam Wilayah Daerah Pemilihan 1, dimana nominal uang dana pokir yang disalurkan kekelompok masyarakat tidak sesuai besaran jumlahnya, dengan besaran nominal jumlah uang dana pokir yang disalurkan dari Dinas terkait, di Desa Beji ada kelompok masyarakat yang hanya menerima besaran dana 65%, sedangkan dana pokir yang 35% masyarakat tidak mengetahui kemana penggunaan dana itu, di beberapa kelompok lainnya di Wilayah Daerah Pemilihan 1, di wilayah desa yang lain, juga terjadi kejanggalan, yaitu munculnya broker tidak bertanggung jawab yang meminta bagian jatah dana pokir pada saat dana tersebut sudah cair. Ini menjadi indikasi adanya kepentingan-kepentingan politik lain yang menunggangi pendistribusian dana pokir. Pada pendistribusian dana pokir juga terjadi fenomena menarik, dimana tokoh masyarakat mengarahkan warga untuk memilih calon yang mendistribusikan dana pokir di desa tersebut dan adakalannya ketika mayoritas masyarakat mendukung calon yang diarahkan tokoh masyarakat, maka warga yang berbeda pilihan akan dikucilkan secara sosial.

Pemaparan diatas tentang alasan penelitian serta masalah-masalah yang terjadi pada pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara dan adanya kepentingan-kepentingan politik lain, salah satunya untuk mobilisasi pemilih. Ini menjadi masalah yang serius dalam proses pendistribusian dana pokir, yang berakibat distribusi tidak tepat sasaran serta

adakalanya menjadi peluang disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab, jika masalah ini tidak terpecahkan maka akan menjadikan tujuan adanya dana pokir untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat serta mepercepat pembangunan wilayah daerah kabupaten/kota tidak tercapai dan program dana pokir tidak akan berjalan efektif. Penelitian ini memiliki tujuan penting, yaitu untuk mendalami masalah pada pendistribusian dana pokir serta melihat kontribusinya pada kemenangan petahana.

Meskipun penelitian tentang dana pokir pada keuntungan *electoral* dalam keterpilihan kembali petahana di pemilu telah banyak dilakukan, akan tetapi penelitian terdahulu belum melihat dari segi kontribusinya terhadap kenaikan suara petahana, serta belum membahas secara mendalam strategi pola pendistribusiaanya dan juga penelitian terdahulu sudah lama, tentu ini menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yang berdasar pada masalah yang terjadi di era sekarang, seperti halnya masalah yang telah dipaparkan pada alasan penelitian diatas. Studi di Kabupaten Banjarnegara akan difokuskan pada dua kajian: *Pertama*, bagaimana pola pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara. *Kedua*, bagaimana dana pokir di Kabupaten Banjarnegara berkontribusi pada kemenangan petahana DPRD pada pemilu 2024.

Studi ini penting dilakukan dengan dua argument manfaat yaitu, secara teoritis studi ini akan menjadi bahan pemikiran dalam diskusi tentang dana pokir DPRD di Indonesia. Dilihat secara praktis studi ini bisa dijadikan referensi bagi pemangku kebijakan dan masyarakat untuk melihat seberapa efektif pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara. Proses pendistribusian dana pokir DPRD perlu dilakukan penelitian kembali, apakah dana pokir berkontribusi pada kemenangan petahana. Oleh karenanya peneliti ingin melihat bagaimana proses pendistribusianya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dalam latar belakang, maka rumusan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana dampak dana pokir dalam berkontribusi pada kemenganan petahana DPRD di Kabupaten Banjarnegara pada pemilu 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pola pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dana pokir dalam berkontribusi pada kemenganan petahana DPRD di Kabupaten Banjarnegara pada pemilu 2024?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terhadap pemetaan pendistribusian dana pokir oleh DPRD.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran terutama untuk masyarakat Banjarnegara tentang *pork barrel* pada pendistribusian dana pokir DPRD Kabupaten Banjarnegara.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta bahan penelitian bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk memahami *pork barrel* pada pola distribusi dana pokir DPRD.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tentang *pork barrel* pada pola distribusi dana pokir anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara.
 - b. Manfaat bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sekaligus sebagai referensi dan perbandingan peneliti lain.

- c. Manfaat bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi warga Kabupaten Banjarnegara mengenai *pork barrel* pada pola distribusi dana pokir anggota DPRD kabupaten Banjarnegara.

E. Kajian Pustaka

Studi tentang politik gentong babi atau *pork barrel* lazimnya dilakukan di negara seperti Amerika, Filipina dan beberapa negara di eropa lebih banyak, mengingat di negara-negara tersebut memiliki kebijakan atau program yang serupa dengan dana pokir yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri masih sedikit studi yang membahas *pork barrel* terutama pada dana pokir DPRD, studi terdahulu yang dilakukan itupun sudah lama, studi yang terbaru belum ada, studi yang dilakukan para peneliti terdahulu umumnya membahas *pork barrel* dari segi keuntungan *electoral* dalam keterpilihan kembali petahana pada pemilu yang dilihat dari cara pendistribusianya berdasarkan kewilayahan dan hubungan sosial kepada masyarakat tertentu, sedangkan studi yang lain membahas *pork barrel* pada hubungan patronase dan klientelisme.

Studi-studi terdahulu setidaknya dikelompokan menjadi dua tema penelitian, yaitu *pork barrel* dari segi keuntungan *electoral* dalam keterpilihan kembali petahana pada pemilu dan hubungan patronase dan klientelisme pada *pork barrel*. Peneliti mencoba melihat pola pada penelitian terdahulu serta menganalisisnya untuk mencari keterbaharuan pada penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Pork Barrel* dari Segi Keuntungan *Electoral* dalam Keterpilihan Kembali Petahana Pada Pemilu

Penelitian tentang keuntungan *electoral* dalam keterpilihan kembali petahana ini bersumber dari beberapa studi dengan topik yang sama, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Mahsun, 2015; Saragintan dan Hidayat, 2017; Sari, 2021; Pratama, 2017; Haliza, dkk., 2023; Susanto, 2017), studi terdahulu tersebut membahas *pork barrel* pada dana pokir dari segi keuntungan *electoral* dalam keterpilihan kembali petahana pada pemilu. Seperti yang dilakukan oleh Mahsun (2015) dengan hasil penelitiannya bahwa distribusi dana pokir mempunyai kontribusi pada keterpilihan kembali petahana DPRD, dengan pendistribusian dana pokir berdasar pada daerah yang menjadi basis dukungan petahana serta kepada kelompok sosial tertentu yang memiliki hubungan kedekatan sosial dengan petahana. Kemudian studi Saragintan dan Hidayat (2017) dengan hasil penelitiannya yang menjelaskan

bahwa pendistribusian dana pokir didistribusikan kepada kelompok sosial tertentu oleh petahana, dengan tujuan memobilisasi dukungan suara.

Studi *pork barrel* dengan pendistribusian berdasarkan kelompok sosial tertentu juga dilakukan oleh Sari (2021) yang menjelaskan bahwa pendistribusian pada pola *pork barrel* menargetkan kelompok masyarakat tertentu, yang sudah mengalami modernisasi sehingga menyebabkan pengelompokan masyarakat berdasarkan pekerjaan. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2017) yang menjelaskan bahwa pola *pork barrel* disasarkan pendistribusian kepada kelompok sosial masyarakat tertentu, dalam hal ini adalah kelompok masyarakat dengan ekonomi menengah keatas dan juga berpendidikan, kelompok ini seperti akademisi, pengusaha dan sejenisnya. Penelitian lain dilakukan oleh Haliza, dkk., (2023) dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa pendistribusian dana pokir oleh DPRD banyak yang menyimpang, dengan pendistribusian cenderung kepada wilayah, yang menjadi basis dukungan suara anggota DPRD saat pemilu. Kajian yang membahas tentang *pork barrel* dengan pendistribusian berdasarkan kelompok masyarakat tertentu juga dilakukan oleh Alfaz dan Suswanta (2021) dengan hasil penelitian yang menemukan dana pokir didistribusikan kepada kelompok masyarakat tertentu seperti kelompok agama dana juga pemerintah desa. Serta ditemukan *pork barrel* mempunyai pengaruh besar dalam meningkatnya partisipasi pemilih saat pileg.

Studi yang pertama dilakukan oleh Mahsun (2015) dengan judul *Kota Palembang, Sumatera Selatan: Dana Aspirasi dan Politik Klientelisme* yang diterbitkan oleh Penerbit PolGov: Penerbit Buku-Buku Politik dan Pemerintahan. Penelitian ini berfokus pada *pork barrel* dan hubungan klientelisme yang terjalin di dalamnya. Studi ini menjelaskan bagaimana petahana pada pileg menggunakan dana pokir sebagai instrument untuk memobilisasi dukungan suara di daerah konstituen. Temuan pada penelitian yaitu ditemukan ada dua jenis politisasi dana pokir menjelang kampanya, yang pertama adalah pendistribusian dana pokir didasarkan pada kelompok-kelompok masyarakat yang masih mempunyai hubungan sosial dengan kandidat calon, seperti ikatan suku dan agama, temuan kedua pada penelitian ini adalah pendistribusian dana pokir yang berdasar target wilayah, pada kasus ini kandidat calon dari petahana mendistribusikan dana pokir ke daerah-daerah wilayah yang di dalamnya merupakan basis pendukung kandidat itu sendiri .

Penelitian diatas juga membahas dalam segi patronase dan klientelisme bagaimana caleg petahana melihat dana pokir sebagai sumber patronase untuk memobilisasi dukungan

suara. Klientelisme yang terjalin sendiri adalah terlibatnya broker dan tim sukses, dalam pendistribusian dana pokir serta mengarahkan masyarakat untuk memilih calon dari petahana tersebut. Penelitian yang dilakukan Mahsun (2015) juga menjelaskan bahwa pendistribusian dana pokir dilakukan dengan cara menyimpang dan tidak sesuai dengan tujuan dana pokir itu sendiri, calon dari petahana menggunakan dana pokir untuk sumber patronase, yang kemudian dana pokir dijadikan proyek *pork barrel*, disinilah kemudian hubungan klientelisme terjalin dengan pimpinan tokoh masyarakat serta masyarakat yang memberikan dukungannya. Peneliti juga membahas bahwa penggunaan dana pokir untuk proyek *pork barrel*, tidak menjamin kemenangan bagi petahana untuk terpilih kembali pada kontestasi pileg.

Studi kedua dilakukan oleh Saragintan dan Hidayat (2017) dengan judul *Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011* yang diterbitkan oleh Jurnal Politik. Penelitian ini berfokus pada pola distribusi *pork barrel* dari segi pendistribusian yang berdasar hubungan sosial dan kewilayahan, pada kasus *pork barrel* di Provinsi Banten tahun 2011. Studi ini menjelaskan karakter *pork barrel* yang terjadi di Provinsi Banten menargekan kelompok-kelompok sosial yang berbasis agama. Temuan dalam penelitian ini adalah kelompok-kelompok basis agama yang menjadi targer merupakan kelompok yang mempunyai pengaruh sosial dan mempunyai kedudukan penting di kalangan masyarakat, kelompok-kelompok basis agama ini mempunyai kekuatan politik yang dapat mempengaruhi pilihan masyarakat secara luas, penelitian ini juga menemukan *incumbent* sering melakukan kunjungan kepada kelompok-kelompok agama dan tempat-tempat ibadah, ini adalah cara yang dilakukan *incumbent* untuk mempengaruhi kelompok-kelompok agama tersebut.

Distribusi dana hibah dan bansos sangat cenderung untuk digunakan untuk proyek *pork barrel*, salah satu tujuannya adalah untuk menjalin hubungan kedekatan dengan kelompok masyarakat yang belum memiliki hubungan kedekatan dengan calon dari petahana. Penulis menjelaskan bahwa *pork barrel* tidak hanya dilakukan oleh legislatif atau DPRD tetapi terkadang juga dilakukan oleh eksekutif atau gubernur provinsi pada pilkada.

Studi ketiga dilakukan oleh Sari (2021) dengan judul *Politik Elektoral: Pemenangan Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu (Studi Pemilu Legislatif Jawa Timur 2019)*. Fokus dari penelitian ini adalah strategi politik yang dilihat dari pengelompokan pemilih, kampanye kandidat serta lingkup jangkauan pemilih oleh kandidat dari petahana. Peneliti menjelaskan

bahwa terdapat beberapa kasus *pork barrel* memang menarikkan kelompok tradisional seperti agama dan berdasar etnis suku, tetapi pada banyak temuan dalam studi *pork barrel* di Indonesia kebanyakan dilakukan kepada masyarakat yang sudah mengalami modernisasi, yang membuat pengelompokan masyarakat berdasarkan kelas maupun profesi pekerjaan, studi ini menjelaskan *pork barrel* pada kemenangan satu-satunya petahana perempuan pada pemilu DPRD di daerah pemilihan Jawa Timur II. Temuan pada penelitian ini adalah pengelompokan yang terjadi lebih beragam dan lebih kepada kelompok masyarakat yang sudah modern yaitu pengelompokan berdasarkan agama dan juga pengelompokan berdasarkan pekerjaan. Pengelompokan berbasis agama yakni melalui organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU), pengelompokan berdasarkan pekerjaan yakni melalui pembentukan kelompok yang dilakukan oleh kandidat kepada Guru TPQ dan Ikatan Guru TK Muslimat (IGTKM).

Peneliti juga menemukan pengelompokan berbasis rukun tetangga (RT) yang berdasar pada kedekatan hubungan pertemanan, keluarga atau tetangga untuk menggalang dukungan suara dari masyarakat, serta juga menemukan *incumbent* menggunakan *pork barrel* untuk memelihara tim suksesnya dengan cara melibatkan tim sukses dalam kegiatan reses serta memberikan pekerjaan dengan cara menjadikan tim sukses sebagai pengawal proyek pembangunan yang dijalankan oleh *incumbent*.

Studi keempat dilakukan oleh Pratama (2017) yang berjudul *Patronase dan Klientelisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017* diterbitkan oleh Jurnal Wacana Politik. Penelitian ini berfokus kepada pembahasan sasaran kelompok masyarakat penerima proyek *pork barrel*. Penulis menjelaskan bahwa kandidat menggunakan beberapa bentuk politik uang, akan tetapi di daerah tersebut masyarakatnya tergolong menjadi dua kelompok, yaitu kelompok masyarakat biasa dalam hal ini adalah masyarakat dengan ekonomi rendah dan yang kedua adalah masyarakat golongan menengah keatas, dalam hal ini para akademisi dan kelompok masyarakat yang secara ekonomi golongan menengah keatas. Penelitian ini menemukan bahwa kelompok masyarakat biasa, bisa dibeli suaranya oleh kandidat dengan transaksi politik uang seperti individual gift atau vote buying, tetapi masyarakat golongan menengah ke atas, suaranya tidak bisa dibeli dengan politik uang jenis tersebut.

Masyarakat golongan menengah keatas lebih memilih suaranya ditukar dengan proyek *pork barrel*, melihat fenomena ini maka kandidat membuat strategi, dengan cara

proyek *pork barrel* dikhkususkan untuk didistribusikan kepada kepada masyarakat golongan menengah keatas, secara garis besar peneliti menyimpulkan bahwa penerima *pork barrel* adalah kelompok masyarakat dengan ekonomi menengah keatas, seperti pembisnis atau akademisi.

Studi kelima dilakukan oleh Haliza, dkk, (2023) dengan judul *Penganggaran Dana Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Indonesia. Penelitian ini membahas tahapan penggagaran dana pokir, yang meliputi cara pengusulan dana pokir, pengalokasian dana pokir pada APBD dan tanggung jawab DPRD kepada konstituennya, penulis berpendapat bahwa kewaiban menyuarakan aspirasi konstituen adalah tanggung jawab setiap anggota DPRD, maka sudah seharusnya pengalokasian dana pokir itu bedasarkan keadilan dan kepentingan publik, masing-masing anggota DPRD harus memjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di dapilnya agar mendapatkan perhatian dan dukungan dari konstituennya, tetapi itu bukan menjadi sebuah transaksi suara.

Peneliti menemukan bahwa dana pokir DPRD didistribusikan sudah sesuai prosedur peraturan yang berlaku, seperti usulan masyarakat di dapat anggota DPRD saat reses dan besaran pengalokasian dana di sesuaikan setelah setelah melakukan survey langsung kelapangan terkait proyek yang akan dianggarakan dengan dana pokir, tetapi pada kenyataan dilapangan, anggota DPRD memprioritaskan penganggaran kepada daerah-daerah yang menjadi basis dukungan suaranya saat pemilu dan mengenyampingkan daerah konstituen yang bukan basis dari pendukungnya.

Studi keenam dilakukan oleh Alfaz and Suswanta (2021) berjudul *Bentuk dan Jaringan Patron-Klien Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya* yang diterbitkan oleh Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan. Penelitian ini berfokus pada bentuk jaringan patron-klien politik uang, penulis menjelaskan bahwa di momen pemilu semua jenis politik uang sangat rentan untuk terjadi, salah satunya adalah *pork barrel*. Posisi *incumben* sebagai pembuat kebijakan sangat diuntungkan terutama dalam pendistribusian dana pokir untuk proyek *pork barrel*.

Pada penelitian ini ditemukan dana pokir yang pendistribusianya dialokasikan kepada kelompok masyarakat tertentu, seperti kelompok agama serta ada juga menyasar pemerintahan desa, dua kelompok tersebut dipandang sebagai tokoh masyarakat yang memiliki pengikut dan dapat menggerakan suara masyarakat untuk memilih *incumbent* dalam

pemilu. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pork barrel mempunyai kontribusi yang besar dalam mempengaruhi kemenangan petahana pada kontestasi pemilu.

2. Politik Patronase dan Klientelisme pada *Pork Barrel*

Pada studi tentang politik patronase dan klientelisme pada *pork barrel* bersumber dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik pembahasan. Diantaranya yang telah dilakukan oleh (Kurniawan, 2023; Hilmawan, 2022; Anggoro, 2019; Hendriansyah, 2019). Studi yang dilakukan Kurniawan (2023) yang mengkaji tentang kelompok agama Tarekat Syatariyah kepada calon kandidat pilkada. Peneliti menjelaskan bahwa dukungan yang diberikan oleh kelompok agama tersebut, dengan pola hubungan patronase, berhubungan erat kaitannya dengan politik uang, termasuk didalamnya proyek *pork barrel*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Hilmawan (2022) yang mengkaji tentang keterlibatan Partai PKB dalam memanfaatkan politik patronase, untuk kemenangan anggota DPRD pada kontestasi pemilu. Peneliti menjelaskan bagaimana Partai PKB salah satunya menggunakan dana pokir, serta proses pemanfaatannya yang melibatkan organisasi agama serta pejabat desa. Kemudian studi yang dilakukan oleh Anggoro (2019) yang mengkaji bagaimana purnawirawan TNI menggunakan politik patronase dan klientelisme untuk kemenangannya pada pemilu legislatif. Peneliti menjelaskan pola patronase dan klientelisme masih menjadi alat andalan untuk memobilisasi dukungan suara, dengan menggunakan berbagai jenis politik uang. termasuk *pork barrel*. Studi lainnya dilakukan oleh Hendriansyah (2019) mengkaji tentang fenomena patronase dan klientelisme yang dilakukan calon DPRD di Kabupaten Situbondo. Peneliti menjelaskan hubungan patronase dan klientelisme dibangun jauh sebelum pencalonan DPRD, hubungan patron dan klien dimulai saat calon masih menjabat sebagai kepala desa, posisi jabatan inilah yang digunakan untuk membangun relasi dengan kalangan pemerintah, masyarakat sebagai mantan kades di Desa Pawoan Kabupaten Situbondo.

Studi pertama dilakukan oleh Kurniawan (2023) yang berjudul *Patronase dan Klientelisme dalam Dukungan Politik Tuanku Tarekat Syathariyah pada Pilkada di Sumatera Barat* yang diterbitkan oleh Jurnal Ensiklopediaku, penelitian ini berfokus pada pola patronase dan klientelisme dukungan ketua kelompok agama pada calon kandidat di pilkada. Penulis menjelaskan bahwa hubungan yang terjalin antara kelompok Tuanku Tarekat Syatariyah dan calon kandidat pilkada ditemukan pola patronase dengan jenis politik uang, salah satunya *pork barrel*, hubungan yang terjalin antara keduanya juga bersifat klientistik,

karena Tuanku Tarekat Syathariyah juga berperan sebagai broker, yaitu Tuanku Tarekat Syathariyah berperang mengarahkan jamaah untuk memberi dukungan suara kepada calon tersebut.

Hubungan antara Tuanku Tarekat Syathariyah dan calon kandidat terjalin dua arah, seperti calon memberikan bantuan berupa proyek *pork barrel, individual gift dan vote buying*, sedangkan Tuanku Tarekat Syathariyah memberikan bantuan dengan cara mengordinir jamaah untuk memilih calon tersebut saat pilkada.

Studi kedua dilakukan oleh Hilmawan (2022) dengan judul *Politik Patronase Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019* yang diterbitkan oleh Digilib Unila. Penelitian ini berfokus pada patronase yang dilakukan oleh anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Lampung Timur. Peneliti menjelaskan bahwa PKB memanfaatkan politik patronase untuk memenangkan pencalonan anggotanya pada kontestasi pemilihan anggota DPRD, pola patronase yang terjalin adalah caleg berperan sebagai patron sedangkan tokoh agama dan masyarakat berperan sebagai *broker* dan klien, pork barrel menjadi salah satu cara yang digunakan PKB untuk memobilisasi dukungan suara pada pencalonan DPRD.

Studi ketiga dilakukan oleh Anggoro (2019) dengan judul *Politik Patronase dan Klientelisme Purnawirawan TNI Pada Pemilu Legislatif* yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Pemerintahan. Penelitian ini berfokus pada sejauh mana patronase dan klientelisme yang dijalankan oleh purnawirawan TNI untuk memenangkan pencalonannya pada kontestasi pileg. Peneliti menjelaskan pola *pork barrel* yang terjalin adalah dengan pendekatan pemberian janji-janji pemberian proyek kepada pendukung setelah mereka terpilih, pola ini cukup berhasil untuk memobilisasi masyarakat untuk memberikan dukungan suaranya. Purnawirawan TNI menggunakan mantan orang-orang terdekatnya di desa untuk berperan menjadi *broker*, hubungan mereka terjalin ketika purnawirawan TNI bertugas di desa tersebut, orang-orang tersebut kemudian bertugas untuk memperkenalkan calon kepada masyarakat luas serta mnggerahkan mereka untuk memberikan dukungan suaranya.

Studi keempat dilakukan oleh Hendriansyah (2019) dengan judul *Patronage Politik Dalam Pemilu: Studi Tentang Mobilisasi Dukungan Yuniar Ramadhana Pada Pileg 2014 di Desa Paowan Kabupaten Situbondo* yang diterbitkan oleh Repository UB. Penelitian ini membahas patronase yang dilakukan caleg pada pileg di Desa Paowan kabupaten Situbondo. Peneliti menjelaskan calon membangun hubungan patron dan klien dimulai saat masih

menjadi kepala desa, saat menjabat inilah relasi dengan kalangan pemerintahan serta masyarakat terjalin, sehingga beberapa pejabat pemerintah desa terlibat menjadi bagian dari tim sukses calon, tidak hanya itu calon juga memanfaatkan keluarga besarnya yang notabennya adalah keluarga denga kelas ekonomi menengah keatas dan mempunyai pengaruh di desa, dijadikan sebagai bagian dari broker, dan digunakan untuk mengarahkan masyarakat memilih calon tersebut.

Pola *pork barrel* yang terjadi adalah keberhasilan pembangunan yang didanai dengan dana pokir saat calon masih menjabat sebagai kepala desa, digunakan oleh calon sebagai *branding* keberhasilan kepemimpinannya sebagai kades, cara inilah yang digunakan calon untuk memobilisasi dukungan masyarakat desa supaya memilihnya saat kontestasi pileg.

Berdasarkan kajian pustaka diatas *pork barrel* dari segi keuntungan *electoral* dalam keterpilihan kembali petahana pada pemilu dapat dilihat bahwa target pendistribusian dana pokir berbeda-beda di setiap wilayah, sedangkan pada studi hubungan patronase dan klientelisme pada *pork barrel* kelompok sasaran serta terlibat sebagai broker mayoritas adalah kelompok agama. Penulis menganalisa bahwa pola *pork barrel* yang terjadi di setiap daerah berbeda, keadaan kultur budaya masyarakat serta ekonomi dan SDM masyarakat mempengaruhi pola pola *pork barrel* pada distribusi dana pokir. Dari paparan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu hanya menjelaskan *pork barrel* yang digunakan sebagai alat untuk memobilisasi dukungan suara.

Pada penelitian tentang *pork barrel* yang akan dilakukan ini, peneliti akan melihat kontribusi *pork barrel* dalam kemenangan petahana, terutama terhadap efek meningkatnya perolehan suara petahana, peneliti akan berfokus pada pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara, mencangkup pembagian wilayah serta sasaran kelompok masyarakat penerima alokasi dana pokir. Selain itu peneliti juga fokus pada pola politik patronase dan klientelisme yang terjalin pada pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara. karena penelitian dengan tema yang sama adalah penelitian yang dilakukan sudah lama serta belum melihat *pork barrel* dari segi efek terhadap peningkatan perolehan suara petahana, maka nantinya penelitian ini akan menghasilkan kebaharuan dan berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena itulah penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang pola distribusi dana pokir ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang memahami dan mempelajari pentingnya masalah sosial dari berbagai orang (Creswell, 2013). Penelitian kualitatif juga digunakan untuk mempelajari kehidupan masyarakat, perilaku, sejarah, konsep dan fenomena, dan juga isu-isu sosial lainnya. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif adalah berdasarkan pengalaman peneliti dalam mendalami kasus ini, dengan metode kualitatif peneliti dapat menganalisis dan memahami kasus penelitian secara mendalam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, yaitu dengan judul Politik Distribusi Proyek Pembangunan Infrastruktur (Studi Pola Distribusi Proyek Dana Pokir Anggota DPRD di Kabupaten Banjarnegara Periode 2019-2024). Selanjutnya penulis yang bertindak sebagai instrument utama dalam penelitian ini, akan menggali fenomena *pork barrel* di Indonesia dan mengamatinya secara menyeluruh untuk mendapatkan hasil analisa mendalam, serta menjawab petanyaan yang telah diuraikan pada rumusan masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat alami dan tidak ada manipulasi data karena penulis terjun kelapangan langsung melakukan penelitian terhadap fenomena yang akan diteliti. Fenomena pada penelitian ini sangat dinamis dan kompleks sehingga penulis memilih menggunakan jenis penelitian kualitatif, tujuannya adalah suapaya peneliti dapat menafsirkan dan menganalisa secara mendalam terhadap fenomena yang akan diteliti.

Selanjutnya, dalam studi ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data (Creswell, 2013). Dengan alasan pendekatan ini mendukung jenis penelitian kualitatif, supaya agar nantinya tidak hanya melihat *pork barrel* terhadap pengaruhnya pada keterpilihan kembali petahana tetapi juga dapat melihat bagaimana sistem pendistribusianya serta melihat pola politik patronase dan klientelisme yang terjadi di dalamnya. Penggunaan pendekatan studi kasus ini bertujuan agar peneliti dapat menganalisa secara mendalam dan menyeluruh *pork barrel* dalam distribusi dana pokir di Kabupaten Banjarnegara, sehingga memperoleh gambaran secara jelas terhadap fenomena penelitian dari uraian rumusan masalah.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Merupakan sebuah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau sumber utama tanpa melalui media perantara menurut Narimawati (2008:98) dalam Pratiwi (2017). Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara terutama kandidat petahana yang terpilih kembali di pemilu tahun 2024 untuk masa jabatan 2024-2029, serta pihak-pihak yang terkait dengan pendistribusian dana pokir.

b. Data Sekunder

Merupakan sebuah data yang secara tidak langsung didapatkan oleh peneliti lewat perantara menurut Sugiyono (2008:402) dalam Pratiwi (2017). Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah data website, buku-buku, jurnal, artikel, media cetak dan elektronik yang mencangkup pembahasan topik penelitian ini untuk digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini, seperti contoh data dari website kpu tentang perolehan suara DPRD Kabupaten Banjarnegara pada pemilu 2019 dan 2024.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu menurut Sugiyono (2016:231) dalam Pratiwi (2017). Informasi penelitian ini didapatkan dari wawancara yang dilakukan dengan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dan pihak-pihak yang terkait dengan pendistribusian dana pokir. Dalam penelitian ini peneliti akan bertemu secara langsung dan melakukan wawancara untuk menggali data penelitian, di tempat sesuai kesepakatan peneliti dan narasumber.

Dalam penelitian ini nantinya, ada enam narasumber yang akan diwawancara yaitu, dua DPRD petahana dari daerah pemilihan wilayah kota, dua DPRD petahana dari daerah pemilihan wilayah pedesaan dan dua anggota DPRD yang kalah. Hasil dari wawancara tersebut nantinya yang akan digunakan sebagai alat untuk melihat, bagaimana kontribusi dana pokok pokir dalam berperan pada kemenangan petahana DPRD Kabupaten Banjarnegara pada pemilu 2024, terutama pada peningkatan perolehan suara pada kemenangan petahana. Pihak narasumber yang akan di wawancara mencangkup dua partai yaitu PDI-P dan Hanura,

dimana Partai PDI-P adalah partai mayoritas yang memperoleh kursi DPRD dan Partai Hanura adalah partai minoritas yang memperoleh kursi DPRD.

b. Observasi

Observasi adalah upaya pengumpulan data yang dilakukan ketika peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian (Creswell, 2013). Pengamatan dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung kelapangan untuk mengamati bagaimana pola distribusi dana pokir kepada anggota masyarakat di Kabupaten Banjarnegara serta mengamati bagaimana cara pendistribusianya. Nantinya observasi akan dilakukan untuk mengamati pola sosial masyarakat terhadap pendistribusian dana pokok pikir serta mengamati implementasi dari penyaluran dana pokir di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan jenis sumber data yang berkaitan dengan peristiwa dengan kegunaan untuk menambah kelengkapan penelitian berbentuk tertulis maupun karya monumental yang menambah informasi terkait penelitian yang dilakukan menurut Sugiyono (2016:240) dalam Pratiwi (2017). Pada penelitian ini dokumentasi berbentuk foto, arsip maupun surat yang berkaitan dengan pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara. seperti contoh dokumentasi yang akan digunakan adalah arsip ataupun proposal dan sejenisnya, yang digunakan saat pengajuan dana pokir.

4. Validasi Data

Pengujian validasi data antara lain dengan melakukan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dari sumber yang telah ada menurut Sugiyono (2015) dalam Zainuddin (2023).

- a. Triangulasi sumber, yaitu mengumpulkan data dengan sumber berbeda tetapi dilakukan dengan teknik yang sama.
- b. Triangulasi teknik, yaitu pengujian kredibilitas data dengan cara pengecekan kepada sumber data yang sama menggunakan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu, yaitu pengujian kredibilitas data dengan observasi, wawancara maupun teknik lain dalam keadaan dan waktu yang berbeda.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono (2016:244) dalam Pratiwi (2017). Analisis data adalah proses mencari serta melakukan penyusunan secara sistematis terhadap data yang didapatkan saat penelitian, sehingga lebih mudah dipahami serta dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif ada tiga tahapan analisis data yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan, menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) dalam Abdul (2020). Analisis merupakan suatu upaya mencari dan menyusun secara sistematis temuan hasil dari observasi, wawancara dan lainnya sekaligus menyajikan sebagai penemuan kepada orang lain.

a. Reduksi

Suatu proses penyederhanaan, meringkas, memilih dan menyatukan data hasil penelitian dari proses-proses dalam penelitian seperti wawancara, observasi dan data lainnya.

b. Penyajian Data

Merupakan proses pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang menjadi bagian dari pembahasan penelitian. Penyajian data juga membantu untuk memahami fenomena yang terjadi serta membantu untuk menganalisa lebih dalam permasalahan yang terjadi.

c. Penarikan kesimpulan

Tahapan terakhir adalah menganalisa penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan di dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang sebelumnya belum pernah ada (Sugiyono 2019). Pada penelitian ini peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian supaya pembaca dalam memahami poin-poin yang disimpulkan dalam penelitian ini. Penarikan kesimpulan dilakukan ketika berjalananya penelitian di lapangan sampai pada akhirnya dilakukan penarikan secara umum di akhir penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti membagi sub penulisan menjadi enam bagian di antaranya:

Bab I Pendahuluan

Di bab ini akan dijelaskan informasi masalah yang terkait politik distribusi dalam distribusi proyek dana pokir anggota Dewan yang mencangkup: Latar Belakang, Pertanyaan

Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Teori Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II Kerangka Teori

Pada bab ini akan membahas teori penelitian secara mendetail dan komprehensif sebagai acuan dalam penelitian ini, dengan menggunakan teori politik distributif. Politik distributif diartikan sebagai sebuah strategi politik yang dilakukan dengan melibatkan warga dalam proses dan pengalokasian sumberdaya.

Bab III Landscape Kabupaten Banjarnegara

Pada bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, yang meliputi gambaran umum Kabupaten Banjarnegara, letak geografis dan juga gambaran kehidupan masyarakat Kabupaten Banjarnegara, serta penyajian data lainnya seperti jumlah kursi anggota DPRD, jumlah dan pembagian dapil, jumlah pemilih di tahun 2024, susunan pemerintahan dan visi-misi Kabupaten Banjarnegara.

Bab IV Proyek Dana Pokir Dan Pendistribusianya

Pada bab IV akan membahas secara detail mengenai dana pokir di Kabupaten Banjarnegara serta pola pendistribusian proyek dana pokir dan juga akan membahas strategi petahana dengan pola pork barrel pada pendistribusian proyek dana pokir di Kabupaten Banjarnegara.

Bab V Dana Pokir Dan Insentif Elektoral Bagi Petahana

Dalam bab ini akan mengkaji dana pokir dan mesin politik serta akan membahas bagaimana dana pokir menjadi alat untuk mobilisasi pemilih oleh petahana pada pemilu 2024 dan di bab ini juga akan membahas dampak dana pokir pada keterpilihan kembali petahana sekaligus menjelaskan kontribusinya terhadap kenaikan suara petahana.

Bab VI Penutup

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil analisa dan kesimpulan dari keseluruhan rangkaian proses penelitian yang telah dilakukan serta menjadi jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini. Dalam BAB ini peneliti juga akan memberikan saran untuk penelitian yang serupa kedepan, agar bisa memberikan penelitian yang lebih baik dan bermanfaat dalam kontribusi wacana yang berkaitan dengan politik distribusi proyek pembangunan infrastruktur pada distribusi dana pokir.

BAB II

KERANGKA TEORI

1. Definisi Konseptual

a) Politik Gentong Babi (*pork barrel*)

Politik Gentong Babi atau *pork barrel* merupakan strategi kandidat petahana untuk memperoleh suara dan mempertahankan jabatannya dengan menggunakan anggaran negara atau dana pokir, *pork barrel* adalah sebuah proyek pemerintah yang dialokasikan ke daerah tertentu, dengan karakteristik proyek tersebut di alokasikan untuk umum dan di danai dengan anggaran negara, dengan tujuan supaya masyarakat memilih calon kandidat tertentu. Seperti contoh anggota DPRD yang mengalokasikan dana pokir di daerah konstituen, dengan tujuan supaya konstituen memilihnya kembali di pemilihan periode selanjutnya (Aspinall and Sukmajati 2015).

b) Politik Distributif

Politik distributif adalah suatu bentuk upaya pendistribusian sumber daya yang bertujuan untuk menarik perhatian konstituen yang mana dalam proses pendistribusian tersebut memiliki maksud untuk mendapatkan dukungan suara saat pemilu (Stokes, dkk, 2013). Politik juga mendistribusikan barang, seperti bentuk program pemerintah menyalurkan uang tunai, pekerjaan, kredit dan berbagai sumber daya-sumber daya yang lain kepada masyarakat, pejabat terpilih mendistribusikan atau memberikan manfaat kepada konstituen yang diunggulkan, distribusi barang secara politis lebih kontroversial dibandingkan distribusi barang melalui pasar, perkiraan pasar akan mendistribusikan barangnya ke seluruh ruang dan populasi, di negara demokrasi manapun terjalin kesepakatan yang luas bahwa otoritas politik berhak mendistribusikan sumber daya lintas generasi dari hasil pajak untuk mendanai pendidikan atau pengentasan kemiskinan (Stokes, dkk, 2013).

c) Patronase Politik

Patronase diartikan sebagai pemberian bantuan atau manfaat yang melibatkan patron dan klien, patron adalah pemberi atau pemilik sumberdaya sedangkan klien adalah penerima sumber daya, dalam politik patron diartikan sebagai pejabat pemerintah sedangkan klien adalah masyarakat di daerah pemilihan. Patronase politik adalah tindakan pembagian keuntungan antar para politisi dalam pendistribusian sesuatu secara individu kepada konstituen dan penggiat kampanye dengan tujuan mendapatkan dukungan politik dari mereka (Shefter 1994:283) dalam Aspinall and Sukmajati (2015).

d) Klientelisme

Klientelisme adalah karakter relasi hubungan antara politisi dan pendukung atau pemilih atau hubungan patronase yang lebih tersuktur dan juga sistematis, suatu pemberian keuntungan atupun bantuan yang di berikan secara teratur dan berulang kali sebagai imbalan terhadap dukungan politik yang diberikan (Aspinall and Sukmajati 2015). Dalam kata lain klientelisme lebih kearah hubungan yang terjalin atau hubungan jangka panjang antara pemberi manfaat dalam hal ini kandidat dengan penerima manfaat yaitu masyarakat atau pemilih di daerah konstituen.

e) Dana Pokir

Dana pokir adalah bentuk anggaran dari pemerintah yang di amanatkan kepada masing-masing anggota DPRD Kabupaten, untuk mendorong pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di wilayah daerah pemilihan (Mahsun, 2015). Alokasi anggaran ini didasarkan pada penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan atau disebut juga masa reses, dimana anggota DPRD turun langsung kelapangan atau kelingkungan masyarakat daerah konstituen untuk menyerap aspirasi dari masyarakat.

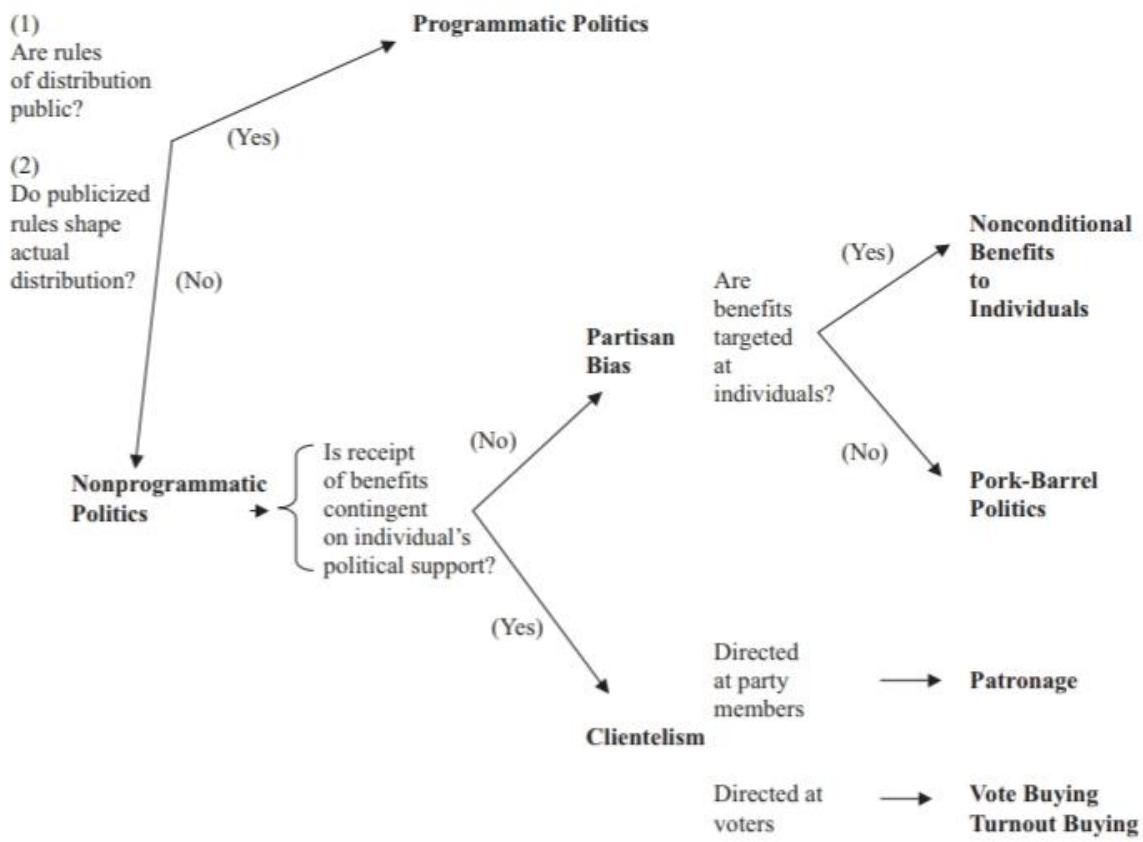
2. Teori Politik Distributif

Distribusi politik muncul dari sebuah proses pendistribusian sumber daya kepada masyarakat, seperti halnya pasar yang mendistribusikan barang, jasa dan keuangan, begitu juga dalam politik, bagaimana pemerintah lewat sebuah program kebijakan mendistribusikan barang, uang, pekerjaan dan sumber daya yang lain kepada masyarakat, begitu juga penjabat yang terpilih, mereka mendistribusikan sumber daya kepada daerah konstituen yang diprioritaskan, partai politik juga mendistribusikan sumber daya untuk mencari dukungan suara, distribusi sumber daya barang dalam politik lebih kontroversial berbeda dengan pasar yang akan mendistribusikan barang dengan area dsitribusi seluas mungkin. Kasus yang berkembang di negara demokrasi distribusi politik sering kali digunakan sebagai transaksi politik untuk jual beli dukungan suara (Stokes, dkk, 2013).

Susan C. Stokes adalah seorang profesor ilmuan politik di Universitas Yale Amerika serta Direktur Program Demokrasi Yale, Stokes juga tergabung dalam anggota Akademi Seni dan Sains Amerika, Dia pernah menjabat sebagai wakil presiden Asosiasi Ilmu Politik Amerika (APSA) serta mantan presiden bagian Komparatif Politik di APSA, pemikirannya yang membawa sumbangsih besar dalam keilmuan politik adalah pemikirannya tentang politik distributif (Stokes, dkk, 2013).

Menurut Susan Stokes (2013) mengartikan politik distributif sebagai bentuk upaya pendistribusian sumber daya yang bertujuan untuk menarik perhatian konstituen yang mana dalam proses pendistribusian tersebut memiliki maksud untuk mendapatkan dukungan suara saat pemilu. Stokes memaknai dan mengartikan sumberdaya sebagai sesuatu yang dapat dan memberi daya kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup (Ardiansa 2014). Teori politik distributif menurut Susan C. Stokes dalam bukunya yang berjudul Brokers, Voter, and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics membagi politik distributif menjadi dua yaitu politik distributif programatik dan politik distributif non-programatik(Stokes, dkk, 2013).

Gambar 1. Skema Konsep Politik Distributif



1) Distribusi Programatik

Dalam distribusi terpogram maka harus memenuhi dua kriteria yaitu *pertama* kriteria pendistribusiannya harus bersifat publik, yang berarti program ini mempunyai akses ke publik secara terbuka dan dapat diakses masyarakat secara luas, *kedua* berbentuk ditribusi yang bermanfaat atau sumberdaya yang sebenarnya, yang berarti program tersalurkan secara tepat sasaran (Stokes, dkk, 2013).

Pada penyusunan program pendistribusian sumber daya, maka langkah-langkahnya harus sesuai program serta demokratis. Ada dua kriteria yang menjadi landasan dalam distribusi programatik. Pertama, ditribusi program haruslah bersifat publik. Kedua, penyaluran program tepat sasaran. Beberapa kasus yang terjadi seringkali penyusunan strategi pada pendistribusian sumber daya, banyak dijumpai pada tahap implementasinya tidak sesuai dengan peraturan berlaku, dan hanya berdasar kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu. Jika dasar kepentingan publik diterapkan maka distribusi akan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka dapat disimpulkan, agar suatu pendistribusian menjadi terpogram, haruslah memenuhi dua kriteria yaitu:

- a. Umum dan Formal
- b. Berbentuk distribusi yang bermanfaat atau sumberdaya yang sebenarnya.

Banyak peneliti mempelajari berbagai bentuk politik distributif, kemudian menemukan bahwa ada beberapa bentuk politik distributif yang sah dan ada beberapa bentuk politik distributif yang tidak sah, mereka tidak menjelaskan secara rinci mengapa politik yang tidak bertanggung jawab atau distribusi yang berdasar kepentingan partisan itu salah. Contohnya adalah *pork barrel*, yang berarti menggunakan penerimaan pajan dari daerah pemilihan yang lebih luas, untuk membiayai barang publik di daerah pemilihan yang lebih kecil. Maka harus mencangkup pengeluaran sumberdaya pulik nasional untuk membangun proyek di daerah tertentu. Jika pendistribusian itu tidak sah, pasti karena disebabkan faktor lain, selain karena adanya transfer antar pemerintah (Stokes, dkk, 2013).

Perbedaan secara konseptual antara ditribusi terpogram dan non-terpogram tidak hanya dalam pandangan sisi akademis, setiap negara demokrasi memiliki peraturan hukum yang melarang jual beli suara, di masing-masing negara yang memiliki peraturan tersebut, hakim harus memberi batas antara pendistribusian sumber daya secara sah yang dilakukan oleh para pejabat yang berambisi besar dan melakukan tansaksi jual beli suara secara illegal. Ketika mereka melakukan itu maka publisitas mangambil peran (Susan C. Stokes, dkk, 2013). Penjelasan tentang distribusi programatik jika dibahas dengan konteks dana pokir maka dapat diartikan bahwa prosedur dan pendistribusian dana pokir haruslah berupa proyek

pembangunan dengan proses pendistribusian yang harus terprogram, tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat. Pendistribusian dana pokir tidak bolah berdasar kepada kepentingan individu atau kelompok masyarakat tertentu seperti digunakan untuk mobilisasi dukungan pemilih. Serta harus terbebas dari politik patronase dan klientelisme.

2) Distribusi Non-Programatik

Distribusi yang tidak bersifat publik, seperti yang terjadi di negara-negara demokrasi maju, seperti di Negara Australia pada minggu-minggu terahir menjelang pemilu di tahun 1990 dan 1993, partai yang berkuasa yaitu Partai Buruh mengalokasikan dana hibah di wilayah dapilnya, untuk membangun sebuah stadion olahraga. Oposisi Partai Buruh yang berada di parlemen mengecam program tersebut karena bias partisan, proyek itu akhirnya diselidiki oleh Auditor Jendral, kemudian Denmark mengkonfirmasi bias partisan itu, dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa hal itu bertentangan dengan ekspresi normatif dan politik distributif yang berlaku di Negara Australia, Departemen setempat mengatakan “kebutuhan masyarakat” adalah dasar utama dalam distribusi sumber daya, tetapi “tidak ada perkiraan dan ukuran kebutuhan masyarakat yang dipublikasikan” (Stokes, dkk, 2013)

Kriteria kedua dalam distribusi terprogram juga dilanggar, baik di negara dengan demokrasi yang sudah maju maupun yang masih berkembang. Dalam kasus ini penjabat politik menyusun peraturan yang formal serta publik dalam distribusi sumber daya, namun peraturan yang berlaku ini dikesampingkan, demi kepentingan yang lebih menguntungkan dalam kontestasi pemilu, para pejabat politik mendistribusikan sumber daya dengan tidak mempedulikan peraturan hukum, dan mendistribusikan sumber daya kepada masyarakat yang bukan prioritas atau masyarakat yang tidak seharusnya menerima sumber daya tersebut. Seperti contoh kasus di Negara Spanyol di tahun 1980an dan 1990an, pendistribusian sumber daya diatur berdasarkan kriteria formal untuk proyek pembangunan transportasi, namun dalam implementasinya, sumber daya tersebut didistribusikan kepada wilayah daerah yang menjadi basis suara *incumbent* saat pemilu (Stokes, dkk, 2013).

Perbedaan antara distribusi terprogram dan non-terprogram adalah antara pendistribusian sumber daya dengan tujuan manfaat publik dengan pendistribusian sumber daya untuk tujuan manfaat individu atau kelompok masyarakat tertentu (Stokes, dkk, 2013). Pendistribusian terprogram berdasar pada keplubikan sedangkan pendistribusian non-terprogram berdasar kepentingan individu atau kelompok, serta cenderung menimbulkan pola politik patronase dan klientelisme.

Bias partisan mengidentifikasi perbedaan dasar pada bentuk-bentuk distribusi non-programmatik, dalam beberapa situasi, pendistribusian yang diskriminatif secara politik menghasilkan niat yang baik dari para penerima bantuan, dan sebagai konsekuensinya, penerima bantuan akan cenderung memilih calon atau partai yang memberikan bantuan, dan jika penerima bantuan lebih memilih calon atau partai lain, mereka tidak dikenakan hukuman individu, kasus pada pendistribusian ini contohnya adalah masyarakat disebuah daerah diwilayah dapil mendapatkan program pengentasan kemiskina, tetapi disisi lain ada daerah kabupaten lain di dapil tersebut yang lebih membutuhkan dan lebih berhak untuk mendapatkannya, jika program seperti ini menargetkan individu maka disebut situasi keuntungan individu yang tidak bersarar dan jika program seperti ini menargetkan kelompok atau wilayah tertentu maka disebut *pork barrel*. Pemberian individu tanpa syarat atau *pork barrel* dapat meningkatkan dukungan suara bagi pemberi sumber daya, selama jumlah sumber daya meningkatkan niat baik pemilih terhadap calon dan partainya (Stokes, dkk, 2013).

a. Klientelisme

Dalam kasusnya, anggota petahana DPRD menawarkan keuntungan materi, dengan syarat penerima bantuan dana pokir membalas bantuan yang diterima melalui suara ataupun dukungan politik lainnya, pemilih akan mendapatkan konsekuensi jika membelot dari kesepakatan perjanjian dalam transaksi distribusi dana pokir, alasan ini yang menjadikan kehawatiran akan distrbusi dana pokir ditukar dengan dukungan suara. Ini disebut dengan distribusi non-programmatik yang dikombinasikan dengan klientelisme pesyaratan (Stokes, dkk, 2013).

Konsekuensi pertukaran dana pokir dengan dukungan suara menimbulkan bahaya secara normatif, kesepakatan ini melanggar kebebasan pemilih dalam menntukan pilihannya, sekalipun pada dasarnya pemilih itu sering dipengaruhi oleh keluarga,rekan kerja maupun teman, adalam transaksi distribusi dana pokir yang memposisikan pemilih untuk bertanggung jawab atas pilihannya, itu menimbulkan keresahan, hal ini didasari adanya ancaman terhadap pemilih di masa depan terkait pemotongan pemberian dana pokir akibat dari konsekuensi pilihan suara mereka, tindakan ini hamper mirip dengan pemaksaan, tetntunya tindakan ini bertentangan dengan demokrasi.

Patronase dalam distribusi dana pokir digunakan untuk mengerahkan dukungan suara, istrilah patronase sendiri merujuk pada aliran keuntungan antara DPRD petahana ke kelompok masyarakat, dana pokir digunakan untuk menuap masyarakat supaya memilih

mereka, tindakan ini disebut sebagai pembelian suara (Stokes, dkk, 2013). Patronase sendiri merujuk kepada anggota DPRD petahan sebagai patron atau pemberi sumber daya dan masyarakat sebagai klien atau penerima manfaat.

b. *Pork Barrel*

Jenis politik gentong babi mengidentifikasi dasar perbedaan dalam distribusi non-programatik, pada kasusnya distribusi yang didiskriminasi secara politik menimbulkan keinginan baik pada penerima manfaat, dengan akibat penerima sumberdaya akan mendukung kandidat yang memberikan sumberdaya, namun penerima yang membelot untuk memilih calon lain tidak mendapat hukuman, seperti pemotongan pemberian sumberdaya di tahun berikutnya, jika distribusi seperti ini menargetkan kelompok atau kolektivitas, ini disebut dengan *pork barrel* atau politik gentong babi (Stokes, dkk, 2013).

Politik gentong babi (*pork barrel*) adalah sebuah strategi kandidat yang digunakan untuk mendapatkan dukungan suara dimana program ini ditunjukkan untuk kelompok, ciri-ciri *pork barrel* adalah bahwa program strategi tersebut ditunjukkan untuk publik dan didanai dengan dana pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan suara,

c. *Club Good*

Perbedaan umum distribusi programatik dan non-programatik didasarkan kepada jenis barang yang diberikan: umum, klub, sasan dan sejenisnya. Adakalanya perbedaan utama terletak pada manfaat kolektif dan manfaat individu ataupun manfaat yang ditargetkan, distribusi yang menargetkan individu mengikuti kriteria publik yaitu distribusi manfaat sebenarnya. Dengan cara yang sama pula barang publik dapat disalurkan ke daerah ataupun kelompok dengan mengabaikan kepentingan publik, dalam kasus ini maka distribusi bersifat non-programatik (Stokes, dkk, 2013).

Barang-barang kelompok (*club goods*) di definisikan sebagai bentuk patronase yang lebih kepada keuntungan bersama untuk kelompok sosial tertentu daripada keuntungan secara individu, di Indonesia *club goods* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan dominasi komunitas yang tinggal dilingkungan perkotaan, pedesaan atau lingkungan lain. Kelompok masyarakat yang menerima *club goods* seperti kelompok keagamaan, kelompok olahraga, asosiasi pemuda, kelompok petani dan lain sebagainya, jenis barang yang dibagikan pun beragam seperti perlengkapan ibadah, peralatan olahraga, *sound system*, perlengkapan pertanian dan alat-alat yang lainnya yang digunakan untuk kebutuhan kelompok.

BAB III

LANDCAPE KABUPATEN BANJARNEGARA

A. Kondisi Geografis dan Kondisi Demografis Kabupaten Banjarnegara

1. Kondisi Geografis Kabupaten Banjarnegara

a. Letak Geografis Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Banjarnegara adalah salah satu wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banjarnegara mempunyai Letak Geografis dengan luas wilayah 1.064,52 km persegi, Dengan letak letak wilayah antara 712' sampai 731' Lintang Selatan dan 231' sampai 308' Bujur Timur. Di bagian utara Kabupaten Banjarnegara berbatasan langsung dengan Kabupaten Batam dan Kabupaten Pekalongan, bagian Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen, bagian wilayah Timur berbatsan dengan Kabupaten Wonosobo, dan pada bagian wilayah Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.

Gambar 2. Potret Wilayah Kabupaten Banjarnegara



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara

Ketinggian tempat di Kabupaten Banjarnegara beragam, yaitu antara 40 sampai 2.300 meter diatas permukaan laut, berdasarkan kemiringan tanah Kabupaten Banjarnegara sekitar

24,61% wilayahnya mempunyai kemiringan 0 sampai 15%, 45,04% wilayahnya mempunyai kemiringan 15 sampai 40%, sedangkan sisa wilayah yang lain mempunyai kemiringan 40%. Menurut jenis tanah, Kabupaten Banjarnegara tebagi kedalam empat jenis tanah yaitu: 66,25% wilayahnya adalah tanah latosol, 11,72% wilayahnya adalah tanah grumosol, 14,5% wilayahnya adalah tanah andosol dan 7,53% wilayahnya adalah jenis tanah campuran antara tanah alluvial, tanah organosol dan tanah litosol.

Dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara 1.064,52 km persegi atau sekitar 106,452 hektar, penggunaan wilayahnya dibagi menjadi enam jenis yaitu: 18,17% wilayahnya adalah tanah sawah, 47,17% adalah tanah kering, 0,3% adalah tanah kolam, 0,15% adalah tanah perkebunan rakyat, 15,57% adalah tanah hutan dan 18,43% adalah tanah lainnya. Berdasarkan keadaan geologisnya, struktur batuan Kabupaten Banjarnegara berbentuk lapisan dengan kondisi rawan longsor serta banyak patahan seperti dibagian utara Kabupaten Banjarnegara sehingga cukup membahayakan bagi prasarana atau bangunan fisik.

b. Topografi Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Banjarnegara sebagian besar wilayahnya berada di ketinggian 100 sampai 1000 meter diatas permukaan laut, wilayah dibagi berdasarkan letak topografi adalah sebagai berikut:

- Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 meter diatas permukaan laut meliputi 9,82% luas Kabupaten Banjarnegara, dengan wilayah diantaranya: Kecamatan Susukan, Kecamatan Purworejo Kelampok, Kecamatan Mandiraja , Kecamatan Purwanegara dan Kecamatan Bawang.
- Wilayah dengan ketinggian antara 100 sampai 500 meter diatas permukaan laut meliputi 37,4% luas Kabupaten Banjarnegara, dengan wilayah diantaranya: Kecamatan Punggelan, Kecamatan Wanadadi, Kecamatan Rakit, Kecamatan Madukara dan Sebagian wilayah Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Bawang, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Banjarnmangu, dan Kecamatan Banjarnegara.
- Wilayah dengan ketinggian antara 500 sampai 1000 meter diatas permukaan laut meliputi 28,74% luas Kabupaten Banjarnegara, dengan wilayah diantaranya:

Kecamatan Sigaluh, dan Sebagian Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Pagedongan dan Kecamatan Banjarmangu.

- Wilayah dengan ketinggian lebih dari 1000 meter diatas permukaan laut meliputi 24,40% luas Kabupaten Banjarnegara, dengan wilayah diantaranya: Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Batur, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Karangkobar, dan Kecamatan Pagentan.

Sebagian besar Wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah wilayah pegunungan, yang mayoritas berisi wilayah pedesaan, sedangkan wilayah dataran rendah adalah wilayah kota.

c. Iklim Kabupaten Banjarnegara

Wilayah Kabupaten Banjarnegara beriklim tropis, curah hujan pertahun adalah 3000 mm dan suhu rata-rata Kabupaten Banjarnegara adalah 20^0 - 26^0 C. wilayah dengan ketinggian 0 sampai 500 meter diatas permukaan laut memiliki suhu lebih hangat, sedangkan wilayah dengan ketinggian 500 meter diatas permukaan laut, suhunya lebih dingin, terutama saat musim kemarau di bulan Agustus suhunya bisa mengalami penurunan signifikan.

d. Hidrografi Kabupaten Banjarnegara

Sungai terbesar di Kabupaten Banjarnegara adalah Sungai Serayu, dan beberapa anak sungai seperti Kali Tulis, Kali Pekacangan, Kali Merawu, Kali Gintung dan Kali Sapi, sungai-sungai tersebut dimanfaatkan oleh warga Kabupaten Banjarnegara sebagai sumber irigasi pertanian, wilayah Kabupaten Banjarnegara juga dikelilingi perbukitan dengan ketinggian tumpat yang beragam, Gunung Lumbung yang terletak di pebatasan antara Kecamatan Pagentan dan Kecamatan Pejawaran, memiliki ketinggian hingga 1.348 meter diatas permukaan laut.

e. Sumber Daya Alam di Kabupaten Banjarnegara

Wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah kabupaten yang kaya akan sumber daya alam, kekayaan sumber daya alam ini mayoritas adalah hasil pertanian serta peternakan yang tumbuh subur di sepanjang sungai serayu, daerah pegunungan dan wilayah Dataran Tinggi Dieng, kekayaan hasil pertanian di Kabupaten Banjarnegara diantaranya the, kentang, kopi, sayur, palawija dan buah salak di wilayah Kecamatan Banjarmangu, hasil peternakan Kabupaten Banjarnegara mayoritas adalah kambing dan sapi.

2. Kondisi Demografi Kabupaten Banjarnegara

a. Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara

Jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara akhir tahun 2023 terdapat 923.192 jiwa, dengan pembagian jumlah laki-laki sebanyak 531.338 jiwa dan jumlah perempuan 1.147.226 jiwa.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	531.338
2	Perempuan	515.888
	Jumlah Total	1.147.226

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Banjarnegara

Jumlah penduduk jika digolongkan menurut generasi maka terbagi kedalam enam jenis yaitu: Kategori pra Boomer (kelahiran sebelum tahun 1945) dengan jumlah 2,44%, baby Boomer (kelahiran tahun 1946 sampai 1964) dengan jumlah 14,8%. Generasi X (kelahiran tahun 1965 sampai 1980) dengan jumlah 22,53%, Generasi Z (kelahiran tahun 1997 sampai 2012) dengan jumlah 23,31%, post generasi Z (kelahiran tahun 2013 sampai sekarang) dengan jumlah 10,61%.

b. Penduduk Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Usia

Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara dengan usia terbanyak adalah usia 30-34 dengan jumlah 82.227 jiwa, di ikuti usia 25-29 di urutan kedua dengan jumlah 80.143 jiwa dan urutan terbanyak ketiga adalah usia 0-4 tahun dengan jumlah 79.964 jiwa, sedangkan jumlah usia pling sedikit adalah usia 70-74 dengan jumlah 27.325 jiwa. Mayoritas penduduk Kabupaten Banjarnegara didominasi oleh usia produktif antara umur 25 tahun sampai 34 tahun, ini menjadi potensi yang besar untuk keberlanjutan masa depan Kabupaten Banjarnegara, tetapi ini juga menjadi masalah, banyaknya kaum produktif dan minimnya lapangan pekerjaan menjadikan Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan angka pengangguran, mereka yang berkerja juga lebih banyak memilih berkerja diluar kota guna mencari peluang lapangan pekerjaan yang lebih besar.

Tabel 2. Komposisi Penduduk Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Usia

Kelompok Umur Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	40.610	39.354	79.964
5-9	38.889	37.257	76.146
10-14	39.929	37.933	77.862
15-19	40.033	37.933	77.966
20-24	39.819	37.432	77.291
25-29	41.600	38.549	80.149
30-34	42.280	39.947	82.227
35-39	40.885	38.961	79.846
40-44	38.942	37.662	76.604
45-49	35.651	35.053	70.704
50-54	32.631	32.734	65.365
55-59	28.840	29.060	57.900
60-64	24.323	24.943	49.266
65-69	19.422	19.806	39.228
70-74	13.521	13.804	27.325
75+	13.963	15.420	29.383
Total Jumlah	531.338	515.888	1.147.226

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Banjarnegara

c. Penduduk Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Jenis Kelamin

Secara umum rasio jenis kelamin di Kabupaten Banjarnegara selaras dengan rasio jumlah di tingkat provinsi, jumlah jenis kelamin perempuan yang lebih banyak dari pada jumlah jenis kelamin laki-laki, juga menjadi masalah sosial di Kabupaten Banjarnegara, terutama perempuan usia 15 sampai 25 tahun, akibat jumlah yang cukup banyak dan dipengaruhi mahalnya biaya pendidikan serta mayoritas pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara yang mayoritas adalah pertanian yang penggerjaanya menggunakan tenaga secara fisik, menjadikan banyak perempuan usia 15 sampai 25 tahun memilih untuk menikah dibandingkan berkerja ataupun melanjutkan pendidikan.

Tabel 3. Komposisi Penduduk Kabupaten Banjarnegara Bedasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
531.338	515.888	1.147.226

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Banjarnegara

d. Penduduk Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Agama

Mayoritas penduduk di Kabupaten Banjarnegara adalah beragama Islam, ini menjadikan kultur masyarakatnya kental akan nuansa Islam, mulai dari kegiatan sosial, tempat pendidikan, maupun organisasi masyarakat, banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan warga Kabupaten Banjarnegara dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, seperti acara tahlilan rutin setiap minggu ataupun acara pengajian akbar yang diadakan beberapa bulan sekali.

Tabel 4. Komposisi Penduduk Kabupaten Banjarnegara Bedasarkan Agama

Agama	Jumlah
Islam	863.181 Jiwa
Kristen	3.575 Jiwa
Katolik	1. 028 Jiwa
Hindu	36 Jiwa
Budha	584 Jiwa
Kong Hu Chu	16 Jiwa
Lainnya	498 Jiwa

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Banjarnegara

e. Penduduk Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Pendidikan

Penduduk Kabupaten Banjarnegara berdasarkan pendidikan terakhir di dominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 332.038 jiwa, urutan terbanyak kedua adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jumlah 113.018 jiwa, urutan terbanyak ketiga adalah lulusan Sekolah Menengah Atas dengan jumlah adalah 108.895 jiwa dan jumlah yang paling sedikit adalah lulusan perguruan tinggi dengan jumlah 29.869 jiwa. Jumlah pendidikan yang mayoritas adalah lulusan sekolah dasar menjadikan tolak ukur bahwa masih sangat rendah kualitas masyarakatnya dilihat dari segi pendidikan terakhir, ini

depengaruhi oleh masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang mayoritas adalah petanai mengalami kesulitan dalam menyekolahkan anak mereka terutama masalah pembiayaan, tidak hanya itu, masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang kental akan kultur dan budaya agama Islam, menjadikan para orang tua lebih memilih pesantren sebagai tempat pendidikan anak mereka ketimbang pendidikan formal.

Tabel 5. Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	SD	332.038
2	SMP	113.018
3	SMA	108.895
4	Perguruan Tinggi	29.869
Jumlah Total		583.820

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Banjarnegara

f. Penduduk Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Pekerjaan

Data pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara terbagi dalam tiga jenis yaitu: Pertanian, Jasa dan Manufaktur, dengan jumlah di tahun 2023 di dominasi oleh jasa yaitu 205,603 jiwa diposisi kedua pertanian 175,915 jiwa dan posisi ketiga Manufaktur 166,444 jiwa, data dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami perubahan, 2021 di dominasi oleh pertanian, 2022 di dominasi oleh manufaktur dan 2023 di dominasi oleh jasa. Kategori pertanian mencangkup tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan usaha jasa pertanian serta kehutanan, manufaktur mencangkup sektor industri modern, sedangkan jasa mencangkup jasa pendidikan, transportasi, editor dll.

Mayoritas wilayah Kabupaten Banjarnegara yang merupakan pegunungan dengan tanah yang subur, menjadikan wilayahnya sangat cocok untuk bertani maupun bertenak sapi ataupun kambing, alasan ini yang menjadikan pertanian dan peternakan adalah mayoritas pekerjaan yang dipilih oleh masyarakat kabupaten Banjarnegara.

Tabel 6. Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	2021	2022	2023
1	Pertanian	202.407	118.456	175.915
2	Manufaktur	185.560	139.261	166.444
3	jasa	182.504	129.295	205.603

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Banjarnegara

B. Struktur Sosial dan Ekonomi Kabupaten Banjarnegara

1. Struktur Sosial Kabupaten Banjarnegara

Masyarakat Kabupaten Banjarnegara terbagi atas dua jenis masyarakat, yaitu masyarakat daerah kota dan masyarakat pedesaan, masyarakat daerah kota cenderung lebih maju dari segi pendidikan maupun modernisasi, sedangkan masyarakat wilayah desa cenderung tertinggal, masyarakat wilayah desa masih minim akan kesadaran pentingnya pendidikan, kesadaran akan pentingnya pendidikan juga dipengaruhi keadaan ekonomi wilayah pedesaan yang rendah, berbeda dengan masyarakat wilayah kota yang lebih tinggi secara ekonomi dibandingkan masyarakat di wilayah desa.

Masyarakat wilayah kota mayoritas pekerjaan adalah pegawai negeri, ASN maupun pedagang, sedangkan wilayah desa mayoritas adalah petani. Perilaku sosial masyarakat Kabupaten Banjarnegara juga dipengaruhi oleh ajaran agama terutama islam, banyak pesantren di Kabupaten Banjarnegara yang berfungsi sebagai tempat pendidikan agama islam, biaya pesantren yang lebih murah dibandingkan biaya pendidikan formal menjadikan para orang tua di Kabupaten Banjarnegara lebih memilih pendidikan pesantren untuk anaknya dibandingkan pendidikan formal yang lain.

Kabupaten Banjarnegara yang mayoritas wilayahnya adalah daerah pedesaan, menjadikan hubungan sosial kekeluargaan dan gotongroyong masih sangat kental di Kabupaten Banjarnegara, tidak hanya itu, faktor agama terutama islam yang masih menjadi bagian dari acuan kegiatan social masyarakat, menjadikan masyarakat di Kabupaten Banjarnegara mempunyai peluang banyak untuk membangun komunikasi dan kedekatan sesama warga masyarakat Kabupaten Banjarnegara.

2. Struktur Ekonomi Kabupaten Banjarnegara

a. Sistem Ekonomi

Ekonomi masyarakat Kabupaten Banjarnegara mayoritas bertumpu pada hasil pertanian, peternakan dan perikanan. Hasil produk pertanian yang menjadi unggulan diantaranya adalah kopi, padi dan salak, tiga hasil pertanian tersebut merupakan yang terbesar di kabupaten Banjarnegara. Produk perikanan adalah ikan lele, ikan gurame dan Ikan mujahir, tiga jenis ikan tersebut menjadi pilihan warga Kabupaten Banjarnegara untuk dibudidayakan karena lebih mudah dibandingkan jenis ikan lainnya, hasil budidaya ikan tersebut kemudian dijual untung menopang perekonomian mereka. salah satu kecamatan yang terkenal karna sektor perikanan adalah Kecamatan Purwonegoro.

Disamping pertanian dan perikanan, masyarakat Kabupaten Banjarnegara juga mencukupi biaya kebutuhan hidupnya dengan berternak domba, kambing dan sapi, system usaha mereka adalah dengan membeli anakan ternak di pasar hewan, nantinya anakan tersebut akan dipelihara hingga satu tahun atau sampai mendapatkan keuntungan ketika dijual kembali.

Pasar di Kabupaten Banjarnegara adalah pusat dari jalannya perekonomian pertanian maupun sektor yang lain, di pasar inilah para petani maupun perternak menjual hasil bumi maupun maupun hasil ternak kepada pengepul, sebelum nantinya hasil alam tersebut dikirim dan dijual keluar kota.

Tabel 7. Jumlah Pasar di Kabupaten Banjarnegara

Jenis Pasar	Jumlah Pasar di Kabupaten Banjarnegara
Pasar Umum	21
Pasar Hewan	3
Pasar Buah	1

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Banjarnegara

Kebayakan pasar dikabupaten Banjarnegara adalah pasara umum, pasar umum yang terbesar adalah Pasar Kota Banjarnegara yang terletak di Kecamatan Banjarnegara, pasar ini menjadi induk bagi pasar-pasar yang lebih kecil dalam mencukupi kebutuhannya. Pasar hewan juga menjadi bagian induk perekonomian Kabupaten Banjarnegara, yang terbesar adalah Pasar Hewan Pertambakan yang terletak di Kecamatan Madukara, di pasar hewan para peternak membeli anakan serta menjual hasil ternak mereka kepada para juragan. Pasar buah

Kabupaten Banjarnegara yang terbesar adalah Pasar Salak Banjarnegara, komoditas utama pasar ini adalah buah salak, tetapi tidak hanya salak buah-buahan yang lainpun tersedia di pasar ini, walupun tidak sebanyak komoditas buah salak.

C. Struktur Politik Kabupaten Banjarnegara

1. Peta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara

Tabel 8. Perolehan kursi DRPD Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Partai

No	Partai	Perolehan Kursi Berdasarkan Partai	
		Jumlah Kursi Yang Diperoleh	
		2019	2024
1	PDI-P	9	7
2	NasDem	4	3
3	PKB	7	9
4	Hanura	2	3
5	Demokrat	7	9
6	PAN	4	2
7	Golkar	4	6
8	PPP	5	3
9	Gerindra	3	2
10	PKS	5	6
Total		50	50

Sumber: KPU Banjarnegara

Jumlah Kursi Anggota DPRD kabupaten Banjarnegara adalah lima puluh kursi dengan pembagian terbagi ke dalam lima DAPIL yang ada di Kabupaten Banjarnegara, dari periode 2019 sampai periode 2024, DPRD Kabupaten Banjarnegara hanya dikuasai sepuluh partai politik yaitu Partai Nasdem, PDI-P, PKB, Hanura, Demokrat, PAN, Golkar, PPP, Gerindra dan Partai PKS.

2. Kepemimpinan Bupati Kabupaten Banjarnegara Pasca Reformasi

Pada awal era reformasi Kabupaten Banjarnegara dipimpin oleh Djasri sebagai Bupati didampingi Hadi Supeno sebagai Wakil Bupati, kepemimpinan pemerintahan ini berlangsung dua periode yaitu dari tahun 2001 hingga 2006 dan 2006 hingga 2011, pada periode kedua

wakil bupati dijabat oleh Soehardjo dibawah pemerintahan Djasri, Kabupaten Banjarnegara mengalami perubahan signifikan, seperti penerapan prinsip transparansi pada sektor system pemerintahan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembuatan kebijakan di Kabupaten Banjarnegara.

Pada pilkada tahun 2011, Sutedjo Slamet Utomo terpilih sebagai Bupati Kabupaten Banjarnegara didampingi Wakil Bupati Hadi Supeno, kepemimpinan ini berlangsung dari tahun 2011 hingga 2016, program dan kebijakan prioritas pada pemerintahan ini adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Banjarnegara lewat program-program pemberdayaan ekonomi lokal. Setelah kepemimpinan Sutedjo Slamet Utomo berakhir, Bupati Banjarnegara dijabat oleh Prijo Anggoro untuk memastikan kelancaran pada proses transisi pemerintahan, yang menjabat dari 7 November 2016 hingga 22 Mei 2017.

Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara selanjutnya di pimpimpin oleh Bupati Budi Sarwono didampingi Wakil Bupati Syamsudin yang menjabat dari tahun 2017 hingga 2021, kepemimpinan Budi Sarwono dikenal dengan terobosan dalam pengelolaan infrastruktur dan pengembangan system pemerintahan berbasis digital, di fase pemerintahan ini terjadi pembangunan besar-besaran terutama pada pembangunan dan perbaikan jalan raya, sebagian besar anggaran Kabupaten Banjarnegara dialokasikan untuk program tersebut. Karena terkendala kasus korupsi, Budi Sarwono harus mengakhiri kepemimpinannya pada tanggal 3 September 2021 dan dilanjutkan oleh Wakil Bupati Syamsudin hingga 22 Mai 2021.

Periode Selanjutnya Bupati Kabupaten Banjarnegara dijabat oleh Tri Harso Widirahmanto sebagai PJ bupati sejak 22 Mei 2022 hingga 20 Februari 2021 , fokus PJ bupati Tri Harso Widirahmanto adalah melanjutkan program pembangunan yang telah dirintis oleh bupati sebelumnya, dengan prioritas pemerataan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan infrakstruktur di Kabupaten Banjarnegara. sedangkan Bupati Kabupaten Banjarnegara yang menjabat sekarang adalah Amalia Desiana dan Wakhid Jumali sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara yang terpilih pada Pemilu 2024 dan dilantik pada 20 Februari 2021.

Dari semua bupati Kabupaten Banjarnegara, hanya Sutedjo Slamet Utomo yang diusung satu partai yaitu PDIP, sedangkan bupati lainnya diusung oleh partai koalisi, seperti halnya bupati Kabupaten Banjarnegara yang terpilih pada pemilu 2024, dimana pasangan calon bupati terpilih yaitu Amalia Desiana dan Wakhid Jumali diusung oleh tuju partai yaitu Partai PKB, Partai GERINDRA, Partai NASDEM, Partai PKS, Partai PAN, Partai DEMOKRAT

dan Partai PSI sedangkan lawannya yaitu pasangan calon Bugar Wijeseno dan Fahmi Umar Irawan diusung oleh Sembilan partai yaitu Partai PDIP, Partai GOLKAR, Partai PPP, Partai HANURA, Partai PERINDO, Partai PKN, Partai UMMAT, Partai GELORA dan Partai PBB.

D. Peta Dapil Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Banjarnegara terbagi menjadi 6 Daerah Pemilihan (dapil) dengan masing-masing daerah pemilihan mencangkup 3 sampai 4 daerah kecamatan. Dengan jumlah kursi adalah 50 kursi DPRD. dapil 1 terdiri dari empat kecamatan, dapil 2 terdiri dari tiga kecamatan, dapil 3 terdiri dari tiga kecamatan, dapil 4 terdiri dari tiga Kecamatan, dapil 5 terdiri dari empat kecamatan dan dapil 6 terdiri dari tiga kecamatan.

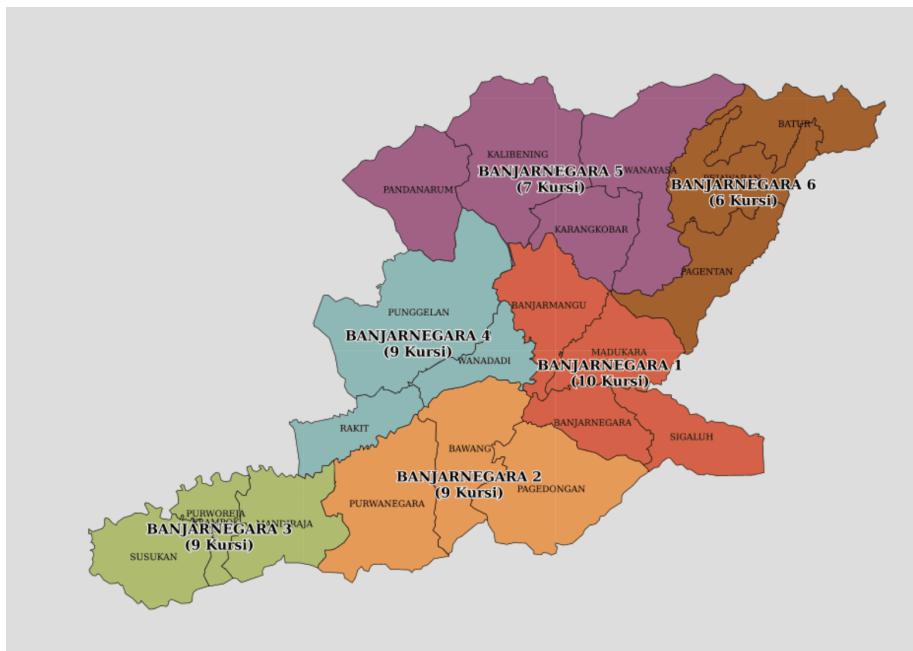
Tabel 9. Pembagian Daerah Pemilihan Kabupaten Banjarnegara

No	Daerah Pemilihan	Kecamatan
1	Banjarnegara 1	Banjarnegara, Sigaluh, Madukara, Banjarmangu
2	Banjarnegara 2	Purwanegara, Bawang, Pagedongan
3	Banjarnegara 3	Susukan, Purworeja Klampok, Mandiraja
4	Banjarnegara 4	Wanadadi, Rakit, Punggelan
5	Banjarnegara 5	Karangkobar, Wanayasa, Kalibening, Pandanarum
6	Banjarnegara 6	Pagantan, Pejawaran, Batur

Sumber: Sidapil KPU

Kabupaten Banjarnegara terdapat 50 kursi anggota DPRD dengan pembagian dapil 1 dengan 10 kursi, dapil 2 dengan 9 kursi, dapil 3 dengan 9 kursi, dapil 4 dengan 9 kursi, dapil 5 dengan 7 kursi dan dapil 6 dengan 6 kursi. Jumlah kursi terbanyak adalah sepuluh kursi di wilayah dapil 1, dengan wilayah mencangkup Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Madukara dan Kecamatan Banjarmangu, serta wilayah dengan jumlah kursi paling sedikit adalah dapil 6 dengan enam kursi, wilayah dapil 6 mencangkup Kecamatan Pagantan, Kecamatan Pejawaran dan Kecamatan Batur.

Gambar 3. Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Banjarnegara



Sumber: Sidapil KPU

Dari total dua puluh kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, pada pemilu 2024 total pemilih adalah 796.814 pemilih, dengan pembagian setiap kecamatan adalah Kecamatan Susukan dengan 48.757 pemilih, Kecamatan Klampok dengan 37.595 pemilih, Kecamatan Mandiraja dengan 61.663 pemilih, Kecamatan Purwanegara dengan 49.922 pemilih, Kecamatan Bawang dengan 45.999 pemilih, Kecamatan Banjarnegara dengan 53.73 pemilih. Kecamatan Sigaluh dengan 34.737 pemilih, Kecamatan Madukara dengan 35.525 pemilih, Kecamatan Banjarmangu dengan 36.555 pemilih, Kecamatan Wanadadi dengan 43.634 pemilih, Kecamatan Rakit dengan 42.469 pemilih, Kecamatan Punggelan dengan 37.301 pemilih, Kecamatan Karangkobar dengan 34.426 pemilih, Kecamatan Pagentan dengan 32.346 pemilih, Kecamatan Pejawaran dengan 26.469 pemilih, Kecamatan Batur dengan 29.316 pemilih, Kecamatan Wanayasa dengan 36.804 pemilih, Kecamatan Kalibening dengan 18.689 pemilih, Kecamatan Pandanarum dengan 17.688 pemilih dan Kecamatan Pagedongan dengan 39.384 pemilih. Jumlah total pemilih terbagi menjadi 403.760 pemilih laki-laki dan 394.054 pemilih perempuan.

BAB IV

PROYEK DANA POKIR DAN PENDISTRIBUSIANNYA

A. Mengenal Dana Pokir di Kabupaten Banjarnegara

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, dana pokir anggota DPRD adalah alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang diberikan kepada anggota DPRD untuk selanjutnya dialokasikan kepada konstituen di masing-masing Daerah Pemilihan, guna melaksanakan proyek pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahapan pendistribusian dana pokir adalah anggota DPRD melakukan reses atau kerja lapangan yang dilakukan tiga kali dalam satu tahun, dari kegiatan ini anggota DPRD mengumpulkan aspirasi usulan masyarakat, selanjutnya masyarakat mengajukan proposan dana pokir kepada anggota DPRD, setelah usulan didapatkan dan ditentukan proiritasnya, anggota DPRD mengajukan usulan pokir ke dalam Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah), didalam aplikasi SIPD ada empat tahapan proses validasi, pertama dilakukan oleh Sekretariat DPRD selanjutnya divalidasi oleh Bappeda, setelah itu divalidasi oleh Perangkat Daerah Tujuan dan validasi terakhir dilakukan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk menentukan disetujui atau tidaknya usulan tersebut, sebelum nantinya dana pokir didistribusikan kepada kelompok masyarakat secara langsung. Besaran dana pokir masing-masing anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah kisaran 1 milyar dan 1,5 milyar untuk ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Dana pokir atau dulu dikenal dengan dana aspirasi, bukanlah suatu barang baru, seperti halnya di beberapa negara di Eropa. Amerika ataupun Filipina dan negara lain yang memiliki kebijakan yang sama, menurut kawanaka (2007) anggota dewan mempunyai pengaruh dan kewenangan untuk mengarahkan pembangunan ketempat konstituen yang menjadi basis dukungan suara mereka (Aspinall & Sukmajati, 2015), pada umumnya di beberapa negara, anggota dewan menggunakan anggaran pokir sebagai alat patronase untuk membangun jaringan klientelisme pada konstituen mereka, dana pokir juga digunakan untuk pemberian suara secara kelompok pada saat momen pemilu menurut Kawanaka (2017) dalam Aspinall dan Sukmajati (2015).

Dana pokir di Kabupaten Banjarnegara dihadirkan sebagai bentuk implementasi dari dua fungsi DPRD yaitu fungsi penganggaran dan fungsi representasi, pada dasarnya hukum yang menjadi dasar regulasi dana pokir di Kabupaten Banjarnegara sama seperti kabupaten atau kota yang lainnya, yaitu berdasar pada Undang-Undang No.27 Tahun 2009 (UU MD3)

yang berisi peraturan tentang kewenangan, tugas serta kenggotaan MPR, DPR, DPRD dan DPD. Pasal UU MD3 yang secara spesifik menjelaskan pokir terdapat pada Pasal 80 huruf j UU MD3 yang mengatur pemberian kewenangan anggota DPRD untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan di daerah pemilihan. UU MD3 juga mengatur tentang hak, kewajiban, kede etik serta pelaksanaan tugas anggota legislatif, dalam Undang-Undang MD3 membahas empat fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran, fungsi pengawasan dan fungsi representasi.

Selain UU MD3 yang menjadi dasar regulasi dana pokir di Kabupaten Banjarnegara, dasar hukum dana pokir di Kabupaten Banjarnegara juga diperkuat oleh Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah. Pada Pasal 9 ayat 1 huruf c dan ayat 1 huruf d dalam PERBUP Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2024 menyebutkan jumlah anggaran belanja untuk belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Pada pasal 14 PERBUP Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2024 menyebutkan besaran anggaran belanja hibah termasuk belanja kepada kelompok masyarakat. Pada pasal 17 PERBUP Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2024 juga menyebutkan besaran anggaran belanja yang ditunjukan untuk belanja transfer. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah, secara langsung membahas pengelolaan anggaran belanja daerah termasuk dana bantuan sosial dan dana hibah. Peraturan ini juga mempengaruhi besaran dana pokir di setiap tahunnya, faktornya adalah karena besaran dana pokir setiap tahun ditentukan dari besaran dana keuangan daerah dan pembagiannya belanja anggaran daerah untuk kebutuhan yang lainnya.

Setiap Kabupaten di Indonesia, besaran anggaran dana pokir berbeda-beda, di kabupaten Banjarnegara besaran untuk setiap anggota DPRD berkisar 500 Juta sampai 1 Milyar, sedangkan untuk pimpinan DPRD berkisar 1 sampai 1.5 Milyar, dana pokir pertama kali diberlakukan pada tahun 2020, saat pemerintahan Budhi Sarwono dan Syamsudin, Tujuan dana pokir di Kabupaten Banjarnegara sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan serta harmonisasi dengan dengan kebijakan pada RKPD, pokir yang meluli SIPD juga mendorong transparansi dan efektifitas pendistribusian dana pokir itu sendiri. Dana aspirasi dengan dana pokir itu adalah dua hal sama, seperti yang disampaikan oleh Pak Anton Hermawan Kepala Bidang Perencanaan Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara yang mengatakan:

“Aspirasi dan dana pokir, berasal dari sumber dana yang sama yaitu APBD, yang mengerjakan juga sama dari dinas teknis, jika masuk jenis belanja non transfer, jika masuk belanja transfer seperti bantuan keuangan, maka yang melaksanakan adalah penerima bantuan tersebut, tetapi dana aspirasi dan pokir adalah suatu yang berbeda dan tidak saling berkaian dari sumber usulannya” (Wawancara, Anton, 24 Desember 2024).

Proyek pokir, dikerjakan oleh dinas terkait jika itu dalam bentuk penyaluran program atau barang jadi, tetapi pokir yang disalurkan untuk bantuan sosial atau dana hibah, yang menetukan penggerjaanya adalah anggota DPRD itu sendiri atas dasar reses dan kesepakatan dengan kelompok masyarakat. Pihak ketiga yang mengerjakan proyek ditentukan dan dipilih oleh anggota DPRD itu sendiri, tetapi di Kabupaten Banjarnegara biasanya ada kesepakatan atas dasar reses, dan pihak yang mengerjakan proyek adalah pihak kelompok masyarakat secara langsung. Perbedaan asal-usul aspirasi dan pokir juga disampaikan Bapak Hermawan Tutut Indarjo selaku Kepala Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara yang mengatakan:

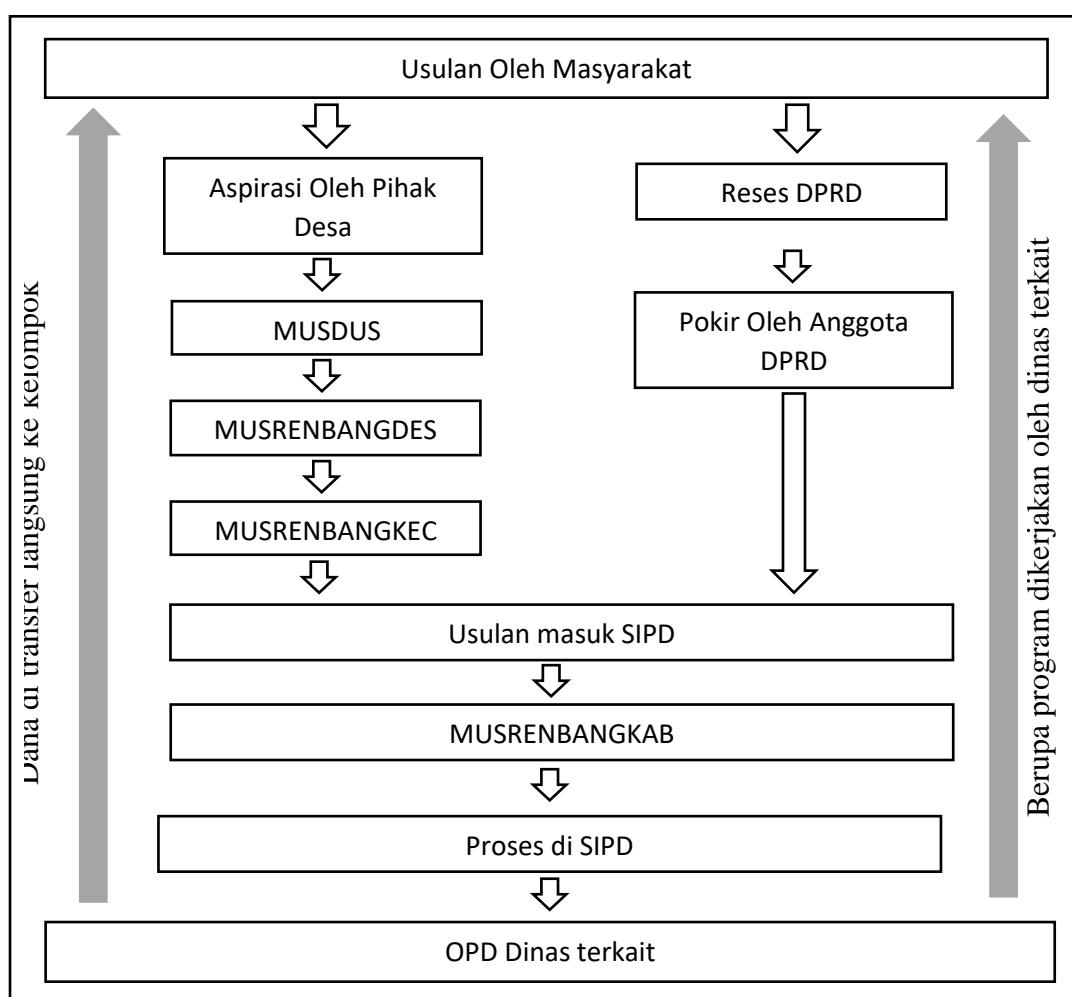
“Aspirasi dan pokir memiliki perbedaan seperti yang ada di aplikasi SIPD, aspirasi itu diajukan oleh pemerintah desa lewat akun pemerintah desa, sedangkan pokir itu pengajuan yang dilakukan oleh anggota DPRD itu sendiri melalui mekanisme reses” (Wawancara, Tutut, 16 Desember 2024).

Dana aspirasi dan pokir adalah dua hal yang sama, perbedaanya hanya pada asal-usul pengusulannya. Di Kabupaten Banjarnegara proses dana pokir ada dua jenis, yaitu aspirasi yang diusulkan oleh pemerintah desa dan dana pokir yang usulannya langsung lewat anggota DPRD, mekanisme tahapan pendistribusiannya sedikit berbeda, dana aspirasi melalui proses MUSDUS, MUSRENBANGDES, MUSRENBANGKEC dan nanti di input ke SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) pada saat menjelang MUSRENBANGKAB, sedangkan pokir yang usulannya langsung lewat anggota DPRD, itu langsung diinput ke SIPD setelah proses reses, proses reses sendiri dilakukan sembilan kali dalam satu tahun anggaran, dengan perhitungan dalam satu tahun anggaran itu ada tiga kali masa sidang, setiap kali masa sidang ada tiga kali masa reses, hasil reses ini nantinya dimusawarahkan lagi di MUSRENBANGKAB, di tahapan inilah antar usulan aspirasi oleh pemerintah desa dan

usulan pokir oleh DPRD, sudah sama-sama dikelola oleh masing-masing pihak DPRD pengusul untuk proses tahapan selanjutnya.

Tahapan berikutnya setelah proses di SIPD yang meliputi verifikasi oleh BAPEDA, SEKDA dan Perangkat daerah yang terkait, serta SEKWAN, di proses ini dilakukan penyesuaian dengan RPJMD Kabupaten, penyesuaian dengan anggaran pokir kabupaten, serta penyesuaian volume dan kebutuhan di lapangan. Selanjutnya dana pokir akan di transfer ke kelompok masyarakat oleh OPD dinas terkait maupun dengan bentuk program yang pengerjaannya dilakukan oleh dinas yang bersangkutan.

Gambar 4. Tahapan Distribusi Dana Pokir di Kabupaten Banjarnegara



Anggota DPRD juga tidak hanya mengerjakan program yang berasal dari dana pokir, mereka bisa mengerjakan program dari dinas dan berkerjasama dengan dinas terkait, seperti contoh dinas dinas pendidikan mempunyai program pendidikan, maka masing-masing anggota DPRD akan bersaing untuk merebutkan prioritas penempatan program itu, supaya

dialokasikan ke dapil mereka, proyek jenis ini dikerjakan oleh dinas terkait dan pihak ketiga yang mengerakan proyek tersebut ditentukan berdasarkan lelang, jika nominal besaran dana proyek diatas duaratus juta rupiah, jika besaran anggaran dibawah duaratus juta maka pihak ketiga penggera proyek dipilih atau penunjukan langsung oleh dinas.

B. Mode Distribusi Proyek Dana Pokir

Pada distribusi dana pokir di Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan mengikuti regulasi yang ada, mengaikuti tahapan pendistribusian sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, tetapi pada proses alokasinya itu bisa menjadi distribusi programatik ataupun distribusi non-programatik.

1. Distribusi Programatik

Distribusi dana pokir di Kabupaten Banjarnegara, ada sebuah temuan yang teridentifikasi sebagai distribusi programatik, sesuai dengan teori yang digunakan pada penelitian ini, yang menjelaskan bahwa distribusi programatik haruslah mencangkup dua kriteria yaitu: a) kriteria pendistribusian harus bersifat publik, b) berbentuk distribusi yang bermanfaat atau sumber daya yang sebenarnya (Stokes, dkk, 2013), dua kriteria tersebut menerangkan bahwa distribusi programatik didasarkan pada pendistribusian yang sesuai dengan regulasi yang ada, pendistribusian juga tidak bias partisan yang berarti bahwa pendistribusian tidak memandang antara wilayah yang menjadi basis dukungan maupun wilayah yang bukan basis dukungan dan tidak menargetkan kelompok tertentu.

Pada temuan penelitian ini, ada sebagian petahana yang mendistribusian dana pokir secara programatik, seperti yang terjadi di desa Wilayah Dapil 1, anggota petahana mendistribusian dana pokir di wilayah desa yang notabennya wilayah tersebut adalah basis dari partai lain. Incumbent tersebut mendistribusian dana pokir sesuai regulasi yang ada serta berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tidak ada unsur bias partisan, teknik strategi ini seperti melempar kail mata pancing, petahana tersebut tidak menuntut kemenangan suara di wilayah tersebut, setelah petahana mendistribusikan dana pokir ke wilayah tersebut, strategi ini berkerja dengan cara petahana lewat tim suksesnya mengumpulkan masyarakat di wilayah tersebut, setelah itu petahana melakukan orasi lapangan saat kampanye ke wilayah tersebut, menjanjikan jika mereka menangkan suara dan terpilih kembali di pemilu yang akan datang, maka petahana tersebut akan memberikan jatah dana pokir kekelompok tersebut di tahun berikutnya atau adakalanya berjanji akan memberikan jatah dana pokir setiap tahun kepada kelompok tersebut di periode yang akan datang. Pada dasarnya distribusi programatik ini

adalah distribusi pokir yang didistribusikan tanpa melihat wilayah basis dukungan atau bukan, seperti halnya pada temuan ini yang dimana pokir didistribusikan di wilayah yang bukan basis dukungan petahana tersebut.

Jenis distribusi programatik ini digunakan petahana untuk membuka basis dukungan baru atau melebarkan wilayah pendukungnya. Hasil analisa ini berdasarkan pengembangan observasi lapangan dari hasil wawancara dengan Bapak Bambang, Petahana dari Partai Nasdem yang menyampaikan:

“Teman saya yang berasal dari satu partai, dia itu punya uang banyak, dia menggunakan strategi turun kelapangan mengumpulkan orang serta berorasi didalam perkumpulan itu, teman saya ini menggunakan teknik strategi itu karena dia tidak punya hubungan kekerabatan maupun kedekatan dengan masyarakat di wilayah tersebut” (Wawancara, Bambang, 09 November 2024)

Pada wawancara tersebut, Pak Bambang menceritakan temannya yang berasal dari Partai Nasdem serta sama-sama petahana yang terpilih kembali di pemilu 2024, petahana tersebut menyalurkan dana pokir di wilayah yang bukan basis dukungannya, serta wilayah tersebut merupakan basis dukungan dari partai lain, dengan strategi penyaluran pokir dan pendekatan turun ke lapangan secara langsung, petahana tersebut memenangkan perolehan suaranya di wilayah desa itu pada pemilu 2024, bahkan petahana tersebut adalah petahana yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara 2024 dengan perolehan suara mencapai 12.902 suara.

Pada temuan jenis programatik ini, jenis proyek yang didistribusikan sama halnya dengan yang non-programatik, seperti pembangunan TPQ, Aula Dusun serta pembangunan fasilitas kebutuhan masyarakat yang lain, system yang berkerja pada distribusi proyek programatik ini, murni usulan masyarakat berdasarkan kebutuhan dilapangan, masyarakat yang mempunyai jalur komunikasi dengan anggota petahana, akan menghubungi anggota petahana tersebut dan mengajukan pengajuan proposal kebutuhan dana pembangunan, setelah itu petahana akan memproses proposal tersebut hingga dana pokir dicairkan kepada kelompok masyarakat tersebut, pendistribusian dilakukan sesuai regulasi serta tidak ada kepentingan broker maupun dukungan untuk memobilisasi dukungan pemilih.

Jenis distribusi programatik ini sesuai dengan temuan hasil wawancara, seperti keterangan hasil wawancara Bapak Arya, petahana dari Partai PPP yang menjelaskan:

“Pemberian pokir itu dilandasi untuk kepentingan masyarakat, seperti contoh di Desa Beji, Dusun Kalijambe, tahun 2023 saya alokasikan pengaspalan jalan dengan dana pokir karena infrastruktur jalan sangat sulit dilalui, kasian kan para petani salak harus berkerja melewati jalan rusak, setelah jalan saya bangun, itukan otomatis akan meningkatkan pendapatan masyarakat” (Wawancara, Arya, 17 November 2024).

Peneliti berpendapat pada temuan ini, bahwa distribusi model programatik juga dilakukan bersamaan dengan distribusi model non-programatik. alasannya adalah temuan distribusi programatik ini juga dilakukan saat momen pemilu, layaknya petahana lainnya yang pada momen itu mendistribusikan dana pokir dengan model non-programatik.

2. Distribusi Non-Programatik

Distribusi dana pokir di Kabupaten Banjarnegara tidak hanya di salurkan secara programatik, tetapi sebagian besar justru di distribusian secara non-programatik, identifikasi temuan ini berdasarkan pada teori penelitian yang menjelaskan bahwa, distribusi non-programatik mencangkup beberapa kriteria yaitu: a) pendistribusian tidak bersifat publik, b) pendistribusian bias partisan, jika pendistribusian menargetkan kelompok maka itu menjadi ditribusi non-programatik jenis *pork barrel* atau juga disebut politik gentong babi (Stokes, dkk, 2013). Pada temuan pendistribusian non-programatik ini, pendistribusian disasarkan pada kelompok tertentu yang dimana kelompok tersebut adalah bagian dari basis dukungan petahana yang mendistribusiakan, ini mengidentifikasi bahwa pendistribusian non-programatik yang ditemukan adalah jenis *pork barrel*. Tidak hanya itu, pola *pork barrel* yang terjadi pada pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara juga telah menimbulkan politik patronase dan Klientelisme.

Anggota DPRD petahana di Kabupaten Banjarnegara menggunakan dana pokir untuk merawat konstituen basis dukungan mereka dengan cara memberikan jatah pokok-pokok pikir setiap tahun, atau dalam hal ini mereka mendistribusikan pokir ke wilayah basis dukungannya, serta adakalanya anggota petahana membuat basis dukungan baru di wilayah dapil mereka dengan dana pokir seperti temuan pada distribusi model programatik, prioritas mereka tetap pada perawatan pendukung lama ketimbang menggunakan dana pokir untuk membuat basis pendukung baru. Pendistribusian dana pokir kewilayah basis dukungan didasari sikap balas budi kelompok masyarakat yang diberi jatah dana pokir merasa terbantu oleh anggota DPRD tersebut dan akan mendukungnya kembali di pemilihan berikutnya, begitu juga petahana yang mendistribusikan pokir, mereka diuntungkan atas sumbangsih

dukungan suara atau kemenangan perolehan suaranya di wilayah kelompok masyarakat tersebut, yang secara otomatis petahana tersebut akan mendistribusikan lagi dana pokirnya ke kelompok masyarakat atau wilayah yang memenangkan suaranya sebagai ucapan terimakasih, ini seperti apa sampaikan informan Bapak Arya, petahana dari Partai PPP, yang berpendapat:

“Ya otomatis lah, contohnya tahun kemarin saya mengalokasikan pengaspalan jalan di desa A, karena masyarakat merasa diperhatikan oleh saya, dan merasakan manfaat dari pembangunan itu, pemilu kemarin saya menang mutlak di desa A” (Wawancara, Arya, 17 November 2024).

Pernyataan Pak Arya juga diperkuat oleh Pak Bambang, petahana dari Partai Nasdem yang berpendapat:

“Ketika kita sudah terpilih, karena keterbatasan anggaran dana pokir, pendistribusianya kita tetap menggunakan skala prioritas, tetapi kita mempertimbangkan bahwa daerah itu banyak yang memilih saya pada pemilihan sebelumnya, kalau daerah itu kosong tidak ada yang memilih saya pada pemilu sebelumnya, buat apa saya distribusikan daerah itu, sedangkan saya tidak diuntungkan” (Wawancara, Bambang, 09 November 2024),

Keterangan diatas memperkuat identifikasi temuan penelitian ini, bahwa pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara bias partisan, ini juga menjadi faktor pendistribusiannya tidak bersifat publik, pertimbangan pokir yang seharusnya berdasar kepada kebutuhan realita masyarakat serta prioritas pendistribusian berdasar kepada kelompok masyarakat atau wilayah mana yang paling membutuhkan, itu menjadi di kesampingkan, petahana mendistribusikan berdasar prioritas wilayah basis dukungannya. Adakalanya pendistribusian dana pokir oleh petahana kekelompok basis dukungan juga didasari kesepakatan antara petahana dan tokoh masyarakat tersebut, bahwa kelompok tersebut siap untuk memenangkan suara petahana yang mendistribusikan pokir pada pemilu yang akan datang.

a) Pork Barrel

Pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara di identifikasi sebagai politik gentong babi atau *pork barrel* alasan yang meperkuat ini adalah pendistribusian bersifat bias

partisan serta sasaran pendistribusian adalah kelompok masyarakat tertentu bukan individu (Stokes, dkk, 2013). Sistem pemilu proporsional terbuka telah membuat persaingan semakin ketat untuk mengalahkan lawan politiknya serta membuat kebutuhan sumber daya untuk kampanye semakin besar, dalam kontestasi pemilu pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, petahana cenderung lebih diuntungkan dengan adanya dana pokir, petahana DPRD mengalokasikan anggaran pokir kepada kelompok masyarakat di wilayah konstituen yang menjadi basis dukungannya, seperti hasil wawancara dengan Pak Bambang, petahana dari Partai Nasdem yang menyampaikan:

“Anggaran pokir yang terbatas, serta adanya muatan kepentingan politik di dalamnya, maka kami mendistribusikan dana pokir berdasarkan skala prioritas serta wilayah konstituen yang dulu membantu saya pada pemilu sebelumnya (wilayah yang memberi dukungan pada pemilu sebelumnya)” (Wawancara, Bambang, 09 November 2024).

Pernyataan ini juga sependapat dengan Pak Arya petahana dari Partai PPP yang menyatakan:

“Menurut saya tentu sesuatu yang wajar ketika saya mendistribusikan pokir ke suatu wilayah dan saya memperoleh dukungan suara banyak disitu, kan umumnya seperti itu, masyarakat saya bantu untuk pembangunan menggunakan dana pokir, setelah itu masyarakat berbalas budi dengan memberikan dukungan kepada saya” (Wawancara, Arya, 17 November 2024).

Dua keterangan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa, pendistribusian dana pokir oleh petahana, menargetkan kelompok masyarakat tertentu di wilayah basis dukungan mereka atau wilayah yang dulu telah membantunya dalam dukungan suara di pemilu sebelumnya, sebagaimana yang dibahas pada teori penelitian ini, pendistribusian yang menargetkan kelompok tertentu dan menargetkan wilayah tertentu serta bias partisan, itu dikategorikan sebagai model distribusi non-programatik jenis pork barrel. Pendistribusian juga tidak selalu dilakukan menjelang momen pemilu adakalanya dilakukan setelah pemilu usai, ini bergantung pada kesepakatan antara petahana dan kelompok masyarakat tersebut.

Pendistribusian yang dilakukan di momen menjelang pemilu, biasanya disalurkan kepada kelompok loyalis, yaitu kelompok yang memang sudah dijamin bahwa akan

memenangkan suara petahana tersebut di pemilu yang akan berlangsung ataupun pada momen pemilu sebelumnya, kelompok masyarakat tersebut pernah memenangkan petahana tersebut dengan suara mayoritas atau mutlak, ini berbeda dengan pendistribusian yang dilakukan setelah momen pemilu, pendistribusian pokir setelah momen pemilu, disasarkan kepada kelompok masyarakat yang dulu pernah menyumbang suara pada pemilu sebelumnya, tetapi tidak memenangkan perolehan suara petahana tersebut saat pemilu, biasanya sebelum pendistribusian pokir, terjadi kesepakatan, jika di momen pemilu yang akan berlangsung kelompok masyarakat tersebut memenangkan suaranya maka petahana yang memberi dana pokir akan menjamin penyaluran dana pokir kekelompok masyarakat tersebut setelah pemilu, jika kelompok masyarakat tersebut hanya menyumbang sebagian suara dan tidak memenangkannya maka dana pokir akan disalurkan sebagian atau tidak sesuai nominal besaran uang pada kesepakatan pertama, adakalanya jika petahana kalah dalam perolehan suara di kelompok tersebut maka dana pokir tidak akan dicairkan kepada kelompok masyarakat tersebut.

Banyaknya usulan pengajuan dana pokir dari kelompok masyarakat dan keterbatasan anggaran dana pokir, juga menjadi alasan anggota DPRD petahana harus menentukan prioritas wilayah dan kelompok masyarakat, serta kepentingan politik didalamnya yang menjadikan arah pendistribusian ke wilayah basis dukungan. besaran anggaran pokir setiap tahun berbeda, disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Daerah (PAD), besaran anggaran dana pokir setiap tahunnya juga berbeda. perbedaan ini dikarenan ada prioritas kebijakan lain di Kabupaten Banjarnegara. seperti contoh pada pandemic covid-19, besaran dana pokir untuk setiap anggota DPRD dipangkas dan alihkan untuk penanganan covid 19.

Tabel 10. Usulan Pokir DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025

No	Proses Usulan	Jumlah
1	Usulan Sampai per 14 Maret 2024	912
2	Usulan Sampai per 21 Maret 2024	1.123
3	Usulan Dilanjutkan (dalam proses di SIPD)	1.025
4	Usulan dikembalikan	102

Sumber: Bapertlitbang Kabupaten Banjarnegara

b) Klientelisme

Petahana dalam merawat konstituennya adalah dengan cara menjalin kedekatan hubungan dengan tokoh masyarakat serta pemerintah desa, wilayah Kabupaten Banjarnegara yang notabennya di dominasi oleh wilayah pedesaan, menjadikan proses hubungan kedekatan antara *incumbent*, broker maupun tim sukses serta masyarakat terjalin sangat erat, faktornya adalah masyarakat desa masih erat budayanya dengan hubungan kekeluargaan maupun kultur gotong royong. seperti pernyataan Pak Bambang DPRD dari Partai Nasdem saat wawancara yang menyampaikan:

“Sebagai bagian dari strategi politik saya menjalin hubungan kedekatan dengan tokoh masyarakat di desa tersebut, seperti pihak RT dan sebagainya, ketika kedekatan sudah terjalin disitulah masyarakat mulai meminta bagian jatah proyek pokir, dengan syarat kemenangan suara saya” (Wawancara, Bambang, 09, November, 2024).

Kedekatan yang dibangun dengan tokoh masyarakat adalah dengan cara membangun hubungan kekeluargaan, hal-hal kecil sering dilakukan oleh petahana seperti silaturahmi datang kerumah tokoh masyarakat secara langsung dan adakalanya ini dibarengi pemberian uang sebagai tanda kekeluargaan atau pemberian jasa kepada tokoh tersebut, sikap masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang masih menjunjung tinggi hubungan persaudaraan atau kekeluargaan, mendorong hubungan kedekatan yang menumbuhkan rasa tidak enakan atau rasa tidak etis jika tokoh masyarakat tersebut tidak membantu memenangkan petahana tersebut pada momen pemilu atau sampai berbalik mendukung calon lain.

Petahana dalam merawat basis dukungan di wilayah konstituen juga tidak hanya memberikan pokir dalam bentuk pork barrel, mereka juga memberikan bantuan jasa, seperti halnya keterangan Pak Bambang DPRD dari Partai Nasdem saat wawancara yang menyampaikan:

“Diwilayah dapil saya, saya membantuk anak dari tokoh masyarakat di salah satu desa, anak tokoh masyarakat tersebut diangkat menjadi pekerja P3K, yang penempatannya kerjanya jauh dari rumah, saya membantu perpindahan penempatan kerja anak tokoh tersebut supaya ditempatkan diwilayah yang dekat rumahnya, karena bantuan tersebut saya kemarin diwilayah desa itu memenangkan dukungan suara mutlak” (Wawancara, Bambang, 09, November, 2024).

Keterangan diatas menujukan bagaimana hubungan klientelisme dibangun oleh petahana DPRD di Kabupaten Banjarnegara tidak hanya dengan dana pokir, tetapi juga dengan bantuan jasa. Petahana tidak hanya menjalin hubungan klientelisme dengan tokoh masyarakat, mereka juga menjalin hubungan klientelisme dengan pihak pemerintah desa, seperti yang disampaikan Bapak Hamdan, selaku Sekretaris Desa Beji, yang menyampaikan:

“Langkah kita sebagai pemerintah desa adalah menampung sebanyak-banyaknya program pokir yang masuk ke desa, nanti Kepala Desa sebagai penanggung jawab wilayah desa, akan membagi wilayah desa untuk masing-masing dukungan kepada DPRD yang mendistribusikan pokir, komitmen kesepakatan antara anggota DPRD dan Kepala Desa adalah menjamin anggota DPRD tersebut memenangkan suara saat pemilu di wilayah titik desa tersebut, kalau kita berhasil mewujudkan komitmen tersebut, maka tahun berikutnya desa akan mendapatkan jatah pokir lagi, dan sebaliknya kalau kita gagal mewujudkan kemenangan suara, kita tidak mendapat proyek pokir lagi di tahun berikutnya” (Wawancara, Hamdan, 30 Desember 2024).

Pernyataan Pak Hamdan juga diperkuat oleh keterangan Pak Wawan selaku KADES Desa Pekandangan yang berpendapat:

“Ilmu politik (dalam hal ini dana pokir) itu ilmu balas budi menurut saya, bahwa daerah mendapatkan proyek pokir, pasti akan memenangkan anggota dewan tersebut saat pemilu, penyaluran pokir yang melalui pemerintah desa, nantinya tugas kita sebagai pemerintah desa menjelaskan kepada masyarakat melalui MUSRENBANGDES tentang penyaluran dana pokir serta siapa anggota DPRD yang menyalurkan, supaya nantinya tidak ada benturan ataupun konflik antar pendukung dan saya menjamin bahwa dana pokir yang disalurkan ke desa saya, pasti DPRD yang menyalurkan akan menang dalam perolehan suaranya saat pemilu di titik kelompok masyarakat tersebut” (Wawancara, Wawan, 30 Desember 2024).

Hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa hubungan kepentingan antara pemerintah desa dengan petahana itu terjalin dalam waktu jangka panjang, hubungan ini oleh petahana dijalin dari tahun ke tahun bahkan dari periode sebelumnya sampai periode jabatan berikutnya. Peran pihak desa dalam hubungan ini adalah dengan memberikan bantuan kepada petahana saat momen pemilu dengan cara mengarahkan masyarakat untuk memilih petahana

tersebut, pihak pemerintah desa juga menjaga kelompok tersebut supaya tidak dimasuki kampanye oleh petahana maupun calon lain, tujuannya agar petahana yang menyalurkan pokir di desa mereka memenangkan suaranya saat pemilu, kemenangan petahana akan berdampak kepada semakin banyak proyek pokir yang masuk kewilayah desa mereka di tahun berikutnya, sebaliknya jika petahana yang mendistribusikan pokir di wilayah mereka kalah dalam perolehan suara, maka akan ada pemangkasan jumlah proyek pokir yang di salurkan ke desa tersebut di tahun berikutnya.

C. Strategi Petahana Pada Pendistribusian Dana Pokir Dengan Pola Pork Barrel

Petahana DPRD Kabupaten Banjarnegara pada strategi politik di pemilu 2024, membagi masyarakat menjadi tiga jenis yaitu: Masyarakat ekonomi kelas atas, masyarakat ekonomi kelas menengah dan masyarakat ekonomi kelas bawah. Dari tiga jenis kelompok itu, petahana mengkategorikan kelompok masyarakat kelas atas berada di wilayah perkotaan, sedangkan kelompok ekonomi menengah dan kebawah berada di wilayah pedesaan.

1. Strategi Pendistribusian Dana Pokir di Wilayah Kota Dengan Masyarakat Ekonomi Kelas Atas

Pada strategi dana pokir wilayah kota di Kabupaten Banjarnegara, petahana mengalami kesulitan dalam menggunakannya sebagai strategi kampanye dan cenderung tidak efektif, ini seperti apa yang disampaikan Bapak Endar, DPRD dari Partai PDIP yang menyampaikan:

“Karena kultur masyarakat kelas atas (wilayah kota) itu lebih individualis maka pendekatannya adalah secara personal, dan seandainya menggunakan pokir itu lebih susah karena kebutuhan pembangunan sudah lebih tercukupi, masyarakat ekonomi kelas menengah (wilayah desa) itu yang lebih pemberian pokir serta pemberian individu, sedangkan masyarakat kelas bawah (wilayah desa) itu lebih terpengaruh terhadap ketokohan, maka strateginya cukup dengan mendekati tokok masyarakatnya” (Wawancara, Endar, 05 November 2024).

Petahana memahami wilayah kota pada kontestasi pemilu sebagai wilayah dengan ekonomi kelas atas, ini berdasar kepada masyarakat kota yang yang mayoritas adalah berpendidikan yang menjadikan kehidupan mereka lebih modern secara pemikiran, ekonomi masyarakat wilayah kota cenderung sudah mapan serta pembangunan diwilayah kota juga sudah terfasilitasi dengan lengkap, sehingga strategi pokir dengan model distribusi

programatik maupun non-programatik sulit untuk diterapkan, kultur masyarakat wilayah kota yang mempunyai sikap individualis juga menjadi faktor strategi target kelompok saat momen pemilu tidak efektif. Analisa ini juga sesuai dengan pernyataan Pak Bambang DPRD petahana dari Partai Nasdem saat wawancara yang mnyampaikan:

“kalau wilayah kota masyarakat sudah tidak terlalu peduli dengan dana pokir, dengan alasan kalau di wilayah kota pembangunan itu sudah tercukupi dibandingkan dengan wilayah desa, di wilayah kota, seperti fasilitas gedung sekolah, tempat ibadah dan lainnya, itu sudah lebih baik, masyarakat wilayah kota itu sudah tidak berbicara tentang dana pokir” (Wawancara, Bambang, 09, November, 2024).

Wilayah kota yang sudah tercukupi dalam segi kebutuhan untuk pembangunan, menjadikan dana pokir sudah tidak menarik bagi masyarakat terutama saat momen pemilu.

Dalam strateginya di wilayah kota, pendistribusian dana pokir hanya digunakan untuk pintu masuk atau hanya sekedar jembatan untuk mendekati masyarakat, selebihnya petahana lebih memilih pendekatan secara personal, yaitu dengan cara money politik dengan model pemberian individu, metode ini lebih efektif untuk mengikat pemilih dibandingkan dengan dana pokir.

2. Strategi Pendistribusian Dana Pokir di Wilayah Desa Dengan Masyarakat Ekonomi Kelas Menengah dan Ekonomi Kelas Bawah

Strategi distribusi pokir di wilayah desa, petahana membagi wilayah masyarakat menjadi dua, yaitu wilayah desa dengan ekonomi menengah dan wilayah desa dengan ekonomi kelas bawah. Desa dengan ekonomi kelas menengah diidentikan dengan masyarakat semi modern, masyarakat sudah mulai berpendidikan walupun jumlahnya masih sedikit dibandingkan masyarakat yang tidak bependidikan, agama menjadi patokan penting dalam budaya maupun kehidupan sehari-hari, ekonomi mereka berada di posisi tengah antara kelas atas dengan kelas bawah, mereka cukup dalam segi ekonomi tetapi masih jauh dibandingkan ekonomi kelas atas di wilayah kota, mayoritas pekerjaan mereka adalah petani yang penghasilanya tidak menentu setiap bulannya.

Masyarakat kelas menengah inilah yang menjadi sasaran dana pokir dalam strategi pemilu, wilayah masyarakat kelas menengah yang notabennya masih wilayah pedesaan, menjadikannya pembangunan diwilayah tersebut masih kurang, banyak fasilitas masyarakat seperti masjid atau sarana dan prasarana yang lain, yang menjadi peluang untuk

didistribusikan dana pokir. Di masyarakat kelas menengah ini distribusi pokir dengan model programatik atau non-programatik berkerja. Kultur masyarakat ekonomi kelas menengah yang masih kental dengan hubungan kekeluargaan dan sikap gotong royong juga menjadi faktor pendukung efektifnya penggunaan dana pokir sebagai strategi politik, ini seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang, petahana dari Partai Nasdem yang menyampaikan:

“Pemberian program pokir setiap tahun, menjadikan masyarakat merasa terbantu dan menumbuhkan rasa balas budi serta dibarengi dengan kultur masyarakat desa yang masih kental akan gotong-royong dan hubungan kekeluargaan, menjadikan salah satu strategi efektif untuk marawat dukungan konstituen di wilayah pedesaan” (Wawancara, Bambang, 09 November 2024).

Pernyataan Pak Bambang juga diperkuat oleh pernyataan Pak Arya petahana dari partai Nasdem saat wawancara yang menyampaikan:

“Kabupaten Banjarnegara wilayah kota dengan Kabupaten Banjarnegara wilayah kota itu berbeda, terutama pada strategi politik saat momen pemilu, kalo di wilayah desa pendekatan secara emosional itu sangat penting (hubungan kekeluargaan) sedangkan kalo di wilayah kota itu instan, sekalipun kita menjalin kedekatan kalau di hari H menjelang pemilu tidak di eksekusi (diberi politik uang) ya dukungan kita akan hilang” (Wawancara, Arya, 17 November 2024).

Diwilayah masyarakat desa ekonomi kelas menengah ini, juga tidak hanya strategi dana pokir, tetapi juga sering terjadi politik uang jenis lain, seperti jenis politik uang pemberian individu yang digunakan untuk memperkuat strategi pendistribusian pokir, ini berbeda dengan wilayah kota yang strategi kemenang suara bergantung sepenuhnya pada strategi money politik.

Wilayah desa dengan ekonomi kelas bawah, kultur masyarakatnya sedikit berbeda dengan desa ekonomi kelas menengah, perbedaannya adalah masyarakatnya lebih tradisional, mayoritas mereka masih berpedoman pada keyakinan budaya dibandingkan agama sebagai patokan kehidupan, ekonomi mereka lebih rendah dari masyarakat desa kelas menengah, mereka sangat terpengaruh dengan penokohan, maka tidak heran jika di desa dengan ekonomi kelas bawah ini, masyarakatnya akan patuh dan mengikuti semua arahan tokoh masyarakat di desa tersebut. Kultur masyarakat desa dengan ekonomi kelas bawah ini dimanfaatkan *incumbent* sebagai strategi politik pada momen pemilu, seperti yang disampaikan Pak Bambang, *incumbent* Partai Nasdem saat wawancara yang menyampaikan:

“Pemilu 2024 kemarin, saya menang di wilayah desa yang disana saya tidak memberikan pokir, saya hanya kenal dengan tokoh sesepuh disana dan perangkat desa, saya sama sekali tidak kenal masyarakatnya, tetapi saya memenangkan suara disana hanya karena saya pernah memberikan bantuan jasa kepada tokoh masyarakat tersebut” (Wawancara, Bambang, 09 November 2024).

Di wilayah desa dengan ekonomi kelas bawah ini, petahana cukup dengan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakatnya tanpa harus menggunakan strategi pokir maupun jenis politik uang yang lain, petahana sudah bisa memenangkan suaranya di wilayah desa tersebut. Nantinya setelah petahana memenangkan suara di wilayah tersebut barulah di tahun berikutnya petahana tersebut memberikan dana pokir, ini digunakan untuk merawat dukungan di wilayah desa dengan ekonomi kelas bawah tersebut.

Tabel 11. Pengawasan dan Pelaksanaan Pokir 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Wilayah	Jumlah Usulan
1	Wilayah Desa	364
2	Wilayah perkotaan dan Kecamatan	127
Total Usulan		491
Total Anggaran		Rp. 30.599.500.000

Sumber: Bapertlitbang Kabupaten Banjarnegara

Dari data yang didapat saat penelitian di lapangan, memang menunjukkan mayoritas dana pokir didistribusikan kewilayah desa, hanya sedikit yang didistribusikan ke wilayah kota, dari 127 usulan yang masuk kewilayah perkotaan dan kecamatan, itupun kecamatan yang didistribusikan kebanyakan masih dengan kultur budaya desa, hanya sedikit yang masuk ke keluarahan wilayah kota.

D. Peran Broker Pada Pendistribusian Proyek Dana Pokir

1. Broker yang Berkerja Sama Dengan Masyarakat Secara Langsung

Broker pada distribusi dana pokir di Kabupaten Banjarnegara, berperan penting dalam menjembatani pengajuan proposal dana pokir dari masyarakat ke petahana, broker berperan membangun komunikasi antara masyarakat dan petahana yang mendistribusikan pokir, pada penelitian ini ditemukan tiga jenis broker, pertama adalah pemerintah desa yang berperan melakukan pengajuan proposal ke anggota dewan, sebelum proposal diajukan desa

melakukan musyawarah dengan masyarakat terkait titik proyek yang akan disalurkan pokir, setelah titik proyek ditentukan, pemerintah desa menginformasikan kepada masyarakat besaran dana dan DPRD siapa yang mencairkan, broker pemerintah desa bertugas mengerjakan semua proses pengajuan proposal, berkomunikasi dengan petahana yang mendistribusikan pokir, serta mengawal pengajuan pokir dari musrembang kecamatan sampai musrembang kabupaten, sebelum nantinya sampai ke tangan petahana yang akan mendsitribusikan pokir.

Pemerintah desa juga bertindak menjaga wilayah yang didistribusikan dana pokir agar tidak dimasuki dukungan dari petahana maupun calon yang lain, adakalanya pemerintah desa juga berperan mengarahkan suara masyarakat, salah satunya adalah dengan mengalokasikan bantuan desa yang dibungkus dengan kepentingan dukungan politik dari pemerintah desa itu sendiri, ini seperti keterangan yang disampaikan Bapak Pujo Hardiansyah, Petahan dari Partai PKS yang tidak terpilih kembali pada pemilu 2024, beliau menyampaikan:

“Sekarang desa maupun kelurahan seringkali memberikan program bantuan seperti BLT dan sejenisnya, yang menyebabkan seringkali benturan dengan kepentingan politik pemerintah desa, sehingga strategi dengan pokok-pokok pikiran sama saja antara di desa maupun dikota” (Wawancara, Pujo, 20 Desember 2024).

Pemerintah desa dalam hal ini, menggunakan bantuan dana desa maupun bantuan dari pemerintah pusat yang didistribusikan lewat desa, untuk mengarahkan kepentingan politiknya, cara kerjanya adalah pemerintah desa akan memutus penyaluran bantuan kepada nasyarakat yang tidak mengikuti arahan pihak pemerintah desa, tujuannya adalah untuk mengarahkan masyarakat agar memilih petahana yang mendistribusikan dana pokir ke desa mereka.

Jenis kedua adalah broker yang berasal dari organisasi masyarakat, seperti NU (Nahdatul Ulama), Muhamadiyah, SI (Syarikat Islam) dan organisasi masyarakat yang lainnya, cara kerja broker ini adalah mencari titik kelompok masyarakat yang akan didistribusikan pokir, setelah mereka menemukan titik kelompok masyarakatnya, mereka menginformasikan besaran dana pokir yang akan didistribusikan serta Anggota DPRD yang mendistribusikan, pada broker jenis ini, proposal sepenuhnya dikerjakan oleh kelompok masyarakat, setelah proposal dikerjakan, broker bertugas mengantarkan proposalnya secara langsung kepada anggota petahana yang mendistribusikan pokir.

Selanjutnya yang ketiga adalah broker yang berasal dari kader partai, cara kerja broker ini bertugas mencari titik kelompok masyarakat yang akan didistribusikan, setelah menemukan titik kelompok masyarakat, broker membangun komunikasi dengan masyarakat, adakalanya pada tahap ini, broker secara terang-terangan mengkampanyekan calon yang akan mendistribusikan dana pokir, pada broker jenis ini, proposal dikerjakan oleh broker sendiri, setelah itu proposal diserahkan kepada tim sukses kecamatan, selanjutnya tim sukses kecamatan mengantarkan proposal dana pokir kepada anggota DPRD yang akan mendistribusikan pokir secara langsung.

Temuan tiga jenis broker pada penelitian ini, mempunyai pola yang sama, disamping mereka menjembatani pengajuan proposal dana pokir, mereka juga menjembatani komunikasi perjanjian antara kelompok masyarakat dengan petahana, bahwa kelompok masyarakat tersebut siap memenangkan anggota DPRD yang mendistribusikan dana pokir tersebut. Para broker ini dijanjikan diberi jabatan atupun diberikan jasa bantuan oleh petahana yang mereka dukung, temuan pada kasus penelitian ini, adakalanya broker meminta jatah uang kepada kelompok masyarakat yang menerima pokir, penerima bantuan dana pokir di Kabupaten Banjarnegara mayoritas adalah wilayah desa, yang notabennya masyarakat rendah akan literasi politik serta rendahnya pendidikan, menjadikanya peluang untuk dimanfaatkan oleh para broker, mereka terkadang meminta uang kepada kelompok masyarakat sebelum dana pokir itu dicairkan dengan alasan sebagai pelicin suapaya dana pokir dijamin distribusinya ke kelompok masyarakat tersebut, atau adakalanya broker memotong jumlah dana yang dicairkan ke masyarakat, sehingga jumlah nominal dana pokir yang diterima masyarakat berbeda dengan jumlah nominal dana pokir yang tertera pada proposal pengajuan.

2. Jaringan Mesin Politik dalam Memperkuat Strategi Pendistribusian Dana Pokir

Pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara melibatkan beberapa mesin politik, mesin politik ini tidak terlibat pada proses pengajuan maupun pembuatan proposal dana pokir, mereka berkerjasama dengan petahana atas dasar kepentingan politik masing-masing. Pada temuan penelitian ini, Eksekutif pemerintah kabupaten juga terlibat sebagai mesin politik, ini seperti yang disampaikan Pak Bambang, Petahana dari Partai Nasdem, yang menyampaikan:

“Karena anggota dewan punya kepentingan di politik pilkada, pada distribusi pokir kita kan tidak bisa merubah titik ketika sudah masuk SIPD, tapi kita bisa negosiasi,

dengan alasan kalau titik ini dikasih pokir, ini bisa memenangkan bupati A di tahun 2025” (Wawancara, Bambang, 09 November 2024)

Negosiasi yang dilakukan petahana untuk melakukan perpindahan titik distribusi dana pokir, dilakukan dengan Bupati atau pihak dinas terkait yang yang mempunyai kepentingan politik pada pilkada. Mesin politik selanjutnya adalah partai pengusung petahana itu sendiri, partai pengusung seringkali mendistribusikan sumberdaya partai guna membantu biaya kampanye dari petahana yang akan mencalonkan lagi peda pemilu mendatang, penelitian ini menemukan partai mengalokasikan sumberdaya seperti sembagi dan sebagainya, jauh-jauh hari sebelum pemilu berlangsung, nantinya sumberdaya itu dibagikan secara langsung oleh petahana ketika kampanya dilapangan, adakalanya pada pendistribusian ini melibatkan pemerintah desa, dimana pemerintah desa berperan mengumulkan masyarakat dan menentukan masyarakat yang akan menerima bantuan sumberdaya tersebut.

Mesin politik pada pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara juga melibatkan petahana itu sendiri dengan petahana dari partai lain atau dari partai yang sama, mereka melakukan transfer dana pokir ke sesama anggota DPRD petahana, guna mencukupi pendistribusian dana pokir diwilayah dapil mereka, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang, petahana dari partai Nasdem yang menyampaikan:

“Kita sesama anggota dewan juga ada kersama antar anggota dewan, seperti halnya pembagian wilayah pendistribusian, kita juga bisa mentransfer dana pokir ke anggota dewan yang lain atau dana pokir punya saya, saya distribusikan ke titik DPRD yang lain” (Wawancara, Bambang, 09 November 2024)

Pernyataan Pak Bambang juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Endar, DPRD dari Partai PDIP yang tidak terpilih kembali di pemilu 2024, yang menyampaikan:

“Partai besar (partai mayoritas), seperti Partai PDIP, pemilu kemarin kan saya nyalon tidak terpilih, tapi ada teman saya yang terpilih dari partai yang sama, maka nanti konstituen saya, masih terawatt lewat anggota partai saya yang terpilih kemarin” (Wawancara, Endar, 05 November 2024)

Keterangan hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa meski politik dari partai yang sama maupun beda partai, saling berkerja di dalam penggunaan strategi dana pokir

sebagai alat kampanye, adalanya petahana yang tidak terpilih atau tidak mencalonkan kembali, menitipkan konstituennya kepada anggota yang terpilih dari partai yang sama. Kerja sama juga terjalain antara petahana yang beda partai atau terkadang beda dapil, mereka akan saling transfer dana pokir untuk penggunaan sebagai alat kampanye pada momen pemilu.

Distribusi dana pokir Kabupaten Banjarnegara sekarang melalui SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) dimana didalam sistem ini informasi bisa diakses oleh semua dinas terkait termasuk penentuan pihak ketiga yang mengerjakan proyek pembangunan yang didanai dengan dana pokir, sehingga pendistribusian lebih tranparan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada celah-celah kenakalan para petahana dalam memilih pihak ketiga dalam penggerjaan proyek dengan unsur muatan kepentingan politik didalamnya, ini seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Arya, Petahana dari Partai PPP yang menyampaikan:

“Sistem SIPD sekarang membuat pendistribusian dana pokir itu lebih terawasi dan akan sulit untuk melakukan kecurangan, karena sekarang lebih tranparan, tetapi tergantung keniatan DPRD itu sendiri, tidak menutup kemungkinan terjadi perilaku curang” (Wawancara, Arya, 28 Desember 2024).

Analisa hasil wawancara tersebut memberi indikasi, bahwa pada penggerjaan proyek pokir yang penentuan pihak ketiganya adalah anggota DPRD, mereka akan memilih pihak ketiga yang mempunyai hubungan dekat dengan anggota DPRD tersebut, alasannya beragam, seperti pihak ketiga tersebut telah membantunya mendanai kampanye pencalonannya, sehingga ketika terpilih, petahana tersebut memilih pihak ketiga tersebut untuk mengerjakan proyek pokir sebagai balas budi atau adakalanya juga karna faktor kedekatan hubungan kekeluargaan.

BAB V

DANA POKIR DAN INSENTIF ELEKTORAL BAGI PETAHANA

A. Dana Pokir dan Keuntungan Pada Pembentukan Tim Sukses

Adanya dana pokir tentu membuat anggota DPRD petahana di Kabupaten Banjarnegara mempunyai tambahan pada strategi politiknya diluar uang pribadi mereka, pemilu terbuka yang membuat persaingan semain ketat menyebabkan mereka harus berkerja keras dalam membuat strategi politik termasuk pada pembentukan tim sukses dan tentunya ini membutuhkan sumberdaya, adanya dana pokir sangat berkontribusi dalam membantu anggota DPRD petahana dalam pembentukan tim sukses.

Dalam distribusi dana pokir di Kabupaten Banjarnegara, anggota petahana menyebarkan anggota tim suksesnya dari tingkat pengurus kecamatan untuk menemukan titik pendistribusian dana pokir sekaligus mencari tokoh masyarakat ataupun tokoh pemuda untuk diajak berkerja sama dalam pendistribusian dana pokir, setelah mereka menemukan titik lokasi dan tokoh masyarakat ataupun tokoh pemuda yang akan diajak berkerja sama, tim sukses dari tingkat kecamatan tersebut akan mulai mengajak tokoh tersebut untuk memilih calon yang di dukung, setelah itu mereka akan menginformasikan kepada tokoh masyarakat tersebut terkait adanya pendistribusian dana pokir, komunikasi antara tim sukses kecamatan dengan tokoh masyarakat biasanya berlangsung tidak hanya sekali, tim sukses kecamatan akan sering berkunjung kerumah tokoh masyarakat tersebut dan pada tahap ini tokoh masyarakat juga membagi informasinya kepada tokoh masyarakat lain di kelompok tersebut sampai nantinya ada kesepakatan terkait pendistribusian dana pokir kekelompok tersebut dan dukungan suara, adakalanya pada proses ini akan ada perjanjian bahwa kalau wilayah kelompok masyarakat tersebut siap untuk memenangkan petahana yang akan memberikan dana pokir, maka dana pokir akan dicairkan ketitik wilayah mereka, atau adakalanya dana pokir dicairkan setelah pemilu ketika suara petahana tersebut sudah terbukti menang diwilayah kelompok masyarakat yang akan disistribusikan dana pokir.

Setelah proses komunikasi dengan tim sukses tingkat kecamatan menemui kesepakatan, para tokoh masyarakat akan mengumpulkan warga untuk melakukan musyawarah, para tokoh masyarakat akan saling berkerja mengordinir kelompok masyarakat agar memilih dan memenangkan petahana yang mendistribusikan dana pokir ke wilayah mereka, di tahap inilah secara tidak langsung anggota petahana yang mendistribusikan pokir telah membentuk tim suksesnya di tingkat desa ataupun dusun, pada

temuan penelitian ini, tokoh masyarakat yang melakukan komunikasi dengan tim sukses kecamatan dijadikan ketua kordinator desa, dusun, atau ketua kordinator pada kelompok tersebut untuk kemenangan kandidat petahana yang telah mendistribusikan pokir, adakalanya tokoh masyarakat atau tokoh pemuda yang terlibat direkrut menjadi kader partai dari partai pengusung petahana tersebut.

Dalam memenuhi kewajibannya sebagai kordinator kemenangan, tokoh masyarakat akan berkerja sama dengan tokoh pemuda untuk mengawasi masyarakat dalam menjamin kemenangan petahana yang mereka dukung, mereka berkerja melakukan pengawasan terhadapa masyarakat yang mendukung calon lain, mencegah adanya money politik dari calon lain, serta memastikan suara mayoritas mendukung petahana yang mendistribusikan pokir tersebut, adakalanya masyarakat yang memberikan dukungan suaranya kepada calon lain akan dukucilkan secara sosial oleh tokoh masyarakat dan masyarakat yang lainnya.

Distribusi dana pokir yang melibatkan pemerintahan desa, juga secara tidak langsung menjadikan pemerintah desa bagian dari tim sukses, cara kerja proses ini adalah ketika petahana mendistribusikan dana pokir, maka akan ada kesepakatan antara kepala desa dengan petahana,

Pemerintah desa berperan memberikan dukungan pengawalan wilayah yang akan didistribusikan bahwa wilayah tersebut tidak akan dimasuki petahana lain serta petahana lain tidak akan mendistribusikan pokir ke wilayah tersebut

Pemerintah desa berkerja dengan cara membagi wilayah desa kepada masing-masing petahana yang mendistribusikan dana pokir agar dukungan untuk masing-masing petahana tidak berbenturan, ini juga didasari kesepakatan bahwa jika wilayah yang didistribusikan pokir memenangkan petahana yang memberi dana pokir tersebut, desa itu akan mendapatkan jatah pokir ditahun berikutnya atau adakalanya diberikan jatah dana pokir setiap tahun. Ini sejalan dengan keterangan Sekretaris Desa Beji Bapak Hamdan saat wawancara, yang menyampaikan:

“langkah kita sebagai pemerintah desa adalah menampung sebanyak-banyaknya program pokok-pokok pikiran yang masuk ke desa, nanti Kepala Desa sebagai penanggung jawab wilayah desa, akan membagi wilayah desa untuk masing-masing dukungan kepada DPRD yang mendistribusikan pokok-pokok pikiran, komitmen kesepakatan antara anggota DPRD dan Kepala Desa adalah menjamin anggota DPRD tersebut memenangkan suara saat pemilu di wilayah titik desa tersebut, kalau kita berhasil mewujudkan komitmen tersebut, maka di tahun berikutnya desa akan

mendapatkan jatah pokir lagi, dan sebaliknya kalau kita gagal mewujudkan kemenangan suara, kita tidak mendapat lagi jatah dana pokir di tahun berikutnya” (Wawancara, Hamdan, 30 Desember 2024).

Peneliti berkesimpulan bahwa adanya dana pokir itu memberikan kontribusi keuntungan pada saat pembentukan tim kampanye bagi petahana, atas adanya kepentingan distribusi dana pokir, ini meminimalisir biaya sekaligus memberikan efektifitas pada pembentukan tim sukses bagi petahana yang melibatkan tokoh kelompok masyarakat maupun pemerintah desa. Tim sukses yang terbentuk di pemerintah desa maupun di masyarakat, mereka akan menjalin hubungan dan komunikasi jangka panjang dengan petahana, mereka yang berperan mewakili kelompok masyarakat dalam mengurus pendistribusian dana pokir di tahun-tahun berikutnya, hubungan dan komunikasi yang terus berjalan dari tahun ke tahun, menjadikan hubungan antara tokoh masyarakat maupun pemerintah desa dengan petahana terjalin sangat erat, nantinya di momen pemilu periode berikutnya, petahana akan melakukan kerja sama lagi dengan para tokoh masyarakat dan pemerintah desa untuk mengamankan kemenangan suaranya di wilayah tersebut, terutama pada penggunaan strategi dana pokir.

B. Dana Pokir dan Mobilisasi Pemilih

Di Kabupaten Banjarnegara wilayah kota, strategi dana pokir hanya dijadikan pintu masuk untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat, setelah mereka berhasil melakukan pendekatan dengan masyarakat, mereka menggunakan politik uang jenis pemberian individu untuk mengikat dukungan kepada masyarakat. Ini seperti yang disampaikan Bapak Endar, DPRD dari Partai PDIP yang tidak terpilih di pemilu 2024 saat wawancara yang menyampaikan:

“Dana pokir itu hanya untuk sarana silaturahmi dengan masyarakat, hanya memberikan efek sekitar 10 persen, contoh saya ngasih bantuan hibah senilai Rp 20 juta untuk 20 orang, nanti yang milih saya cuma 20 orang itu, mereka disuruh nyari tambahan orang untuk dukungan lagi ya tidak mau” (Wawancara, Endar, 05 November 2024).

Alasan tidak efektifnya penggunaan dana pokir untuk strategi di wilayah kota, juga menjadikan wilayah kota bukan sasaran pendistribusian pokir untuk strategi mobilisasi dukungan suara. Ini berbeda dengan wilayah desa di Kabupaten Banjarnegara, dimana

petahana menggunakan dana pokir sebagai prioritas strategi pada mobilisasi dukungan suara, salah satunya adalah dengan cara melakukan perjanjian dengan kelompok masyarakat yang akan menerima distribusi dana pokir tersebut, petahana membuat perjanjian bahwa masyarakat harus siap memenangkan suara mayoritas untuk petahana yang memberikan pokir di wilayah kelompoknya. Perjanjian ini dilakukan antara tokoh masyarakat lewat tim sukses dari DPRD tersebut, begitu juga dengan dana pokir yang didistribusikan lewat pemerintah desa, kesepakatan pemerintah desa dengan petahana menjadikan faktor adakalanya pemerintah desa terlibat langsung dalam mengarahkan masyarakat untuk memilih petahana tersebut saat pemilu. Adakalanya kelompok masyarakat memberikan dukungannya secara otomatis ketika momen pemilu, tanpa ada perjanjian, dikarenakan di tahun atau periode sebelumnya mereka sudah rutin mendapatkan jatah pokir dari petahana tersebut, ketika mereka memenangkan kembali suara petahana yang memberikan pokir, maka secara otomatis juga petahana tersebut akan memberinya jatah dana pokir lagi di tahun atau periode berikutnya. Pada distribusi dana pokir model programatik petahana tidak melakukan perjanjian, tetapi mereka mengkampanyekan bahwa ketika mereka terpilih kembali di pemilu yang akan datang, petahana tersebut berjanji akan mendistribusikan dana pokir setiap tahun kepada kelompok masyarakat tersebut.

Petahana DPRD juga tidak hanya menjalin kesepakatan kemenangan, mereka melakukan kampanye dengan cara datang kepada kelompok masyarakat secara langsung terkait penyerapan aspirasi kebutuhan pembangunan diwilayah tersebut, nantinya usulan mereka akan direalisai melalui dana pokir di tahun berikutnya ketika mereka sudah terpilih kembali. Dana pokir cukup efektif untuk mobilisasi pemilih dan itu akan menjamin kemenangan ketika diperkuat dengan money politik jenis pemberian individu, karena adakalanya juga strategi pokir itu kalah dengan strategi serangan fajar, ini seperti temuan hasil wawancara dengan Pak Endar DPRD dari Partai PDIP yang tidak terpilih di pemilu 2024, yang menyampaikan:

“Pemilu kemarin saya ngasih pokir Rp 50 Juta untuk pembangunan jalan di dusun A, pas pemilu saya Cuma dapat 18 suara, habis dikasih uang seratusribu calon lain”
(Wawancara, Endar, 05 November 2024).

Dari pemaparan diatas, distribusi dana pokir untuk mobilisasi pemilih ditemukan beberapa strategi diantaranya di wilayah kota strategi dana pokir hanya dijadikan pintu masuk untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, di wilayah desa dana pokir dijadikan untuk

tombak strategi mobilisasi pemilih, mulai dari kampanye pemberian dana pokir di periode berikutnya, perjanjian kemenangan suara hingga pemutusan pendistribusian dana pokir kepada kekelompok masyarakat tersebut ataupun pengurangan jumlah titik distribusi dan pengurangan jumlah nominal uang distribusi dana pokir, jika petahana kalah dukungan atau tidak medapatkan dukungan suara mayoritas di wilayah yang didistribusikan dana pokir tersebut.

Menariknya pada temuan mobilisasi pemilih menggunakan dana pokir adalah di wilayah desa, terutama desa dengan ekonomi kelas menengah, ditemukan masyarakat yang bukan wilayah basis dukungan tetapi secara otomatis memberikan dukungan suaranya kepada petahana yang memberikan dana pokir, tanpa harus dilakukan kampanye terlebih dahulu oleh petahana, masyarakat dikelompok ini mempunyai pemikiran bahwa sudah menjadi bagian dari proses pendistribusian dana pokir ketika mereka memberikan dukungan suaranya di momen pemilu pada petahana yang memberikan pokir, pemahaman ini sudah tertanam dipikiran mereka bahwa cara yang harus dilakukan untuk mendapatkan jatah dana pokir DPRD adalah dengan cara menukarnya dengan dukungan suara dan ketika mereka tidak memberikan dukungan suaranya maka mereka tidak dapat memperoleh jatah pokir, perilaku ini menurut peneliti disebabkan kultur masyarakat desa yang rendah akan pendidikan dan minimnya pemahaman mereka tentang politik terutama pemahaman tentang dana pokir dan proses pendistribusianya.

Pada teori yang peneliti gunakan yaitu teori Stokes tentang politik distributif (Skokes, dkk, 2013). Stokes menjelaskan bahwa daerah wilayah dengan ekonomi kelas atas atau dalam hal ini wilayah kota, itu efektif menggunakan strategi *pork barrel* ataupun strategi distribusi programatik dan wilayah dengan ekonomi kelas bawah, dalam hal ini wilayah desa itu efektif menggunakan strategi *vote buying*. Tetapi pada studi ini peneliti menemukan temuan yang berbeda, dimana strategi *pork barrel* ataupun strategi distribusi programatik itu efektif di wilayah masyarakat dengan ekonomi kelas bawah atau wilayah desa dan *vote buying* itu lebih efektif digunakan pada masyarakat ekonomi kelas atas atau wilayah kota.

Pada beberapa temuan adakalanya strategi *pork barrel* ataupun strategi distribusi programatik yang digunakan di wilayah dengan ekonomi kelas bawah, juga menggunakan *vote buying*, dengan tujuan strategi *vote buying* ini digunakan untuk memperkuat strategi *pork barrel* atau strategi distribusi programatik, dengan tambahan strategi *vote buying* maka peluang kemenangan perolehan suara petahana yang mendistribusikan dana pokir diwilayah tersebut semakin besar, bahkan bias menjadi jaminan kemenangan suara di wilayah tersebut.

C. Dampak Dana Pokir Pada Keterpilihan Petahana

1. Dampak Dana Pokir Terhadap kemenangan Petahana

Penggunaan dana pokir oleh *incumbent* DPRD Kabupaten Banjarnegara, sebagai bagian dari strategi kampanye juga menjadikannya tambahan anggaran biaya kampanye petahana dan meminimalisir anggaran kampanye dari dana pribadi. Berbeda dengan calon pendatang baru yang hanya mengandalkan biaya kampanye dari dana pribadi, tentu menjadi alasan keterbatasan anggaran dari calon pendatang baru itu sendiri. Perbedaan ini juga menjadi penyebab petahana di Kabupaten Banjarnegara sulit dikalahkan oleh pendatang baru. Petahana mempunyai dua senjata di dalam strategi kampanye, yaitu pokok-pokok pikiran untuk sasaran dukungan kelompok, serta dana pribadi digunakan untuk memperkuat itu ataupun melebarkan sayap dukungannya dengan politik uang pemberian personal. Keterbatasan anggaran kampanye pada calon pendatang baru, menjadikan strateginya lebih kepada *money politik* pemberian secara personal, dibandingkan menggunakan anggaran kampanye untuk sasaran kelompok. Analisa ini persis seperti apa yang sampaikan Pak Bambang, petahana dari Partai Nasdem.

“Sekarang ideologi partai itu sudah tidak seperti dulu, ideologi sekarang itu kepentingan perorangan, dulu orang akan memilih karena berdasarkan partai dan ideologinya, tapi sekarang tidak, sekarang memilih itu berdasarkan kepentingan didalamnya, seperti teman saya yang sama-sama dari Partai Nasdem, pada pemilu kemarin, itu masuk ke wilayah desa yang disana itu tidak ada basis Partai Nasdem, strategi teman saya yang terjun kelapangan, memberikan uang saat kampanye, memberikan proyek dana pokir saat menjabat periode sebelumnya, akhirnya pada pemilu kemarin dia memenangkan kembali suaranya di wilayah desa tersebut” (Wawancara, Bambang, 09 November 2024).

Penelitian ini juga menemukan antara petahana DPRD Kabupaten Banjarnegara yang berasal dari wilayah desa dengan petahana DPRD Kabupaten Banjarnegara yang berasal dari wilayah kota memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, ini juga yang membuat strateginya pada distribusi pokir sedikit berbeda, petahana dari wilayah kota mereka tidak terlalu paham dengan kultur desa, mereka datang kepada masyarakat dengan perilaku kultur masyarakat kota yang individualis dan tidak terlalu padai untuk membaur dengan kultur masyarakat desa yang masih kental dengan hubungan kekeluargaan dan gotong royong, mereka mendistribusikan pokir dengan cara turun kelapangan serta memberikan orasi dan

janji kampanye, strategi dana pokir petahana yang berasal dari wilayah kota ini dikuatkan dengan money politik jenis pemberian individu.

Tabel 12. Daftar Asal Wilayah Domisili, Petahana DPRD Kabupaten Banjarnegara yang Terpilih Kembali di Pemilu 2024.

Petahana yang menang dan asal wilayah domisilinya				
No	Nama	Partai	Wilayah Domisili	
1	H. Khusnul Latoif	PKB	Kota	
2	H. Bambang Suparno	PKB		Desa
3	Tugiyono	PKB	Kota	
4	Hj. Ernawati Lathifah	PKB		Desa
5	H. Achmad Sriyadi	Gerindra		Desa
6	Ismawan Setya Handoko	PDIP	Kota	
7	Anwar	PDIP		Desa
8	H. Didi Sunaryo	PDIP		Desa
9	Marno	PDIP		Desa
10	M. Sholakhudin F	PDIP		Desa
11	Muhammad Guruh Da Pamuji	Golkar	Kota	
12	Djarkasi	Golkar		Desa
13	Agus Junaidi	Golkar		Desa
14	Udani Puji Lestari	Nasdem	Kota	
15	Bambang Purnomo Adi	Nasdem		Desa
16	Nurul Iptak	Nasdem		Desa
17	H. Dedi Suromli	PKS		Desa
18	H. Achmad Salabi	PKS		Desa
19	Revi Tenel Lia	Hanura	Kota	
20	Endi Haryanto	Hanura	Kota	
21	Ryan Aditya Wahyu Pradana	PAN	Kota	
22	H. Isnani Rijadi Achmad	PAN		Desa
23	Mochammad Rachmanuddin	Demokrat	Kota	
24	Ana Susanto	Demokrat		Desa
25	Sri Rahayu	Demokrat	Kota	
26	Guruh Tri Adi Putra	Demokrat	Kota	

27	Slamet	Demokrat		Desa
28	Arya Achmad Zakaria	PPP		Desa
29	H. Edy Purwanto	PPP		Desa
30	Hj. Lilis Ujianti	PPP		Desa
Total		Wilayah Kota	11	
		Wilayah Desa		19

Sumber: DPRD Kabupaten Banjarnegara

Tabel di atas menunjukan bahwa petahana yang terpilih kembali di pemilu 2024 moyoritas adalah mereka yang berasal dari wilayah desa, petahana yang berasal dari wilayah desa mereka sangat paham dengan budaya kultur masyarakat desa, sehingga mereka pandai melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat ataupun pemerintahan desa dengan pola menjalin hubungan kekeluargaan yang erat sehingga hubungan mereka lebih klientistik daripada petahana yang berasal dari wilayah kota, petahana yang berasal dari wilayah desa strategi mereka cukup dengan melakukan kunjungan kepada tokoh masyarakat tersebut layaknya seorang saudara, ketika mereka sudah memiliki hubungan kedekatan itu, petahana yang berasal dari wilayah desa cukup dengan memberikan pokir kewilayah tersebut, maka mereka mayoritas memperoleh kemenangan suara diwilayah tersebut tanpa harus memperkuat strateginya dengan mobey politik yang lain.

Dana pokir di wilayah Kabupaten Banjarnegara, telah memberikan manfaat kepada petahana untuk mengamankan dukungan suara di wilayah basis dukungan mereka, dengan cara memberikan dana pokir mereka secara rutin setiap tahun. ini mempermudah petahana untuk memperoleh kemenangan suara, tanpa harus memulai atapun membuat pendukung baru layaknya calon DPRD pendatang baru, kelebihan ini juga yang menjadi faktor mayoritas kemenagan DPRD di Kabupaten Banjarnegara di dominasi oleh petahana.

Pada temuan kasusnya dalam penelitian ini, ditemukan kelompok masyarakat yang secara otomatis memberikan dukungannya ketika diberi jatah dana pokir oleh petahana, seperti temuan diwilayah desa dapil 1, dana pokir yang diterima masyarakat tidak sesuai jumlahnya dan mereka diminta uang pelicin oleh broker agar pokir disalurkan kekelompok mereka, kelompok masyarakat dengan mudahnya menyetujui kesepakatan itu, karena faktor pendidikan yang rendah dan pemahaman politik tentang distribusi dana dana pokir yang minim, mereka beranggapan bahwa cara seperti itu adalah cara yang harus mereka lakukan suapaya dana pokir didistribusikan kekelompok mereka, dan pada momen pemilu secara

otomatis mereka memberikan dukungan suaranya kepada petahana yang memberi dana pokir tersebut, sehingga petahana yang memberi pokir memperoleh kemenangan suara mutlak di wilayah itu.

Teori politik distributif yang digunakan pada penelitian ini (Stokes, dkk, 2013). Menjelaskan bahwa adanya dana pokir telah memberikan manfaat tambahan sumber daya kepada petahana dan ketika sumber daya itu digunakan sebagai alat untuk mendapatkan dukungan suara tentu akan menambah persentase keberhasilan kemengangan suara petahana diwilayah tersebut. Tetapi pada penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan petahana tidak hanya berfokus pada adanya dana pokir, sebagai tambahan sumber daya kepada petahana, tetapi keberhasilan petahana dalam penggunaan dana pokir untuk mendapatkan dukungan suara juga harus dibarengi dengan strategi yang tepat, terutama pemahaman petahana terhadap kultur budaya wilayah konstituen guna menentukan strategi yang tepat pada penggunaan dana pokir sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan suara.

Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa anggota DPRD petahana Kabupaten Banjarnegara yang terpilih kembali pada pemilu 2024 adalah mayoritas berasal dari wilayah desa, ini menjadikan mereka sangat memahami kultur masyarakat desa, dimana masyarakat desa ini adalah masyarakat dengan ekonomi kelas menengah kebawah yang notabennya menjadi wilayah prioritas penggunaan strategi dana pokir untuk mendapatkan dukungan suara, inilah yang menjadikan faktor keberhasilan para petahana yang terpilih kembali dalam menggunakan dana pokir sebagai alat untuk mendapatkan dukungan suara.

2. Signifikansi Dana Pokir Terhadap Insentif Elektoral Petahana

Dana pokir telah memberikan kontibusi besar terhadap kemenangan dan keterpilihan kembali petahana DPRD di Kabupaten Banjarnegara. sebanyak 60% DPRD di Kabupaten Banjarnegara yang terpilih kembali adalah petahana. Perolehan kursi berdasarkan mayoritas juga berbeda, antara pemilu 2019 dan 2024.

Tabel 13. Perolehan kursi berdasarkan partai

Perolehan kursi berdasarkan partai			
No	Partai	Jumlah kursi yang diperoleh	
		2019	2024
1	PDI-P	9	7
2	NasDem	4	3
3	PKB	7	9

4	Hanura	2	3
5	Demokrat	7	9
6	PAN	4	2
7	Golkar	4	6
8	PPP	5	3
9	Gerindra	3	2
10	PKS	5	6
Total		50	50

Sumber: KPU Banjarnegara

Tabel 14. Perbandingan perolehan suara petahana di pemilu 2019 dan pemilu 2024

Jumlah perolehan suara petahana di pemilu 2019 dan 2024							
No	Nama	Partai	Dapil	2019	2024	Jumlah Kenaikan Atau Penurunan Suara	Kenaikan dan Penurunan Suara dalam persen
1	H. Khusnul Latoif	PKB	Dapil 1	5.879	2.985	Turun 2.894	49,2%
2	H. Bambang Suparno	PKB	Dapil 2	4.734	6.435	Naik 1.701	35,9%
3	Tugiyono	PKB	Dapil 3	4.780	5.301	Naik 521	10,8%
4	Hj. Ernawati Lathifah	PKB	Dapil 6	3.963	4.635	Naik 671	16,9%
5	H. Achmad Sriyadi	Gerindra	Dapil 6	3.187	8.182	Naik 4.995	156%
6	Ismawan Setya Handoko	PDIP	Dapil 2	2.403	7.085	Naik 4.682	194%
7	Anwar	PDIP	Dapil 3	3.613	5.855	Naik 2.242	62%
8	H. Didi Sunaryo	PDIP	Dapil 3	5.050	5.197	Naik 147	2,9%

9	Marno	PDIP	Dapil 5	7.239	7.706	Naik 467	6,4%
10	M. Sholakhudin F	PDIP	Dapil 6	3.704	1.969	Turun 1.735	46,8%
11	Muhammad Guruh Da Pamuji	Golkar	Dapil 1	3.654	3.525	Turun 129	3,5%
12	Djarkasi	Golkar	Dapil 2	5.358	4.347	Turun 1.011	18,8%
13	Agus Junaidi	Golkar	Dapil 4	3.897	4.200	Naik 303	7,7%
14	Udani Puji Lestari	Nasdem	Dapil 1	5.336	12.902	Naik 7.566	141%
15	Bambang Purnomo Adi	Nasdem	Dapil 4	2.087	4.847	Naik 2.760	132%
16	Nurul Iptak	Nasdem	Dapil 5	6.630	7.000	Naik 370	5,5%
17	H. Dedi Suromli	PKS	Dapil 3	4.310	5.133	Naik 823	19%
18	H. Achmad Salabi	PKS	Dapil 6	4.464	4.725	Naik 261	5,8%
19	Revi Tenel Lia	Hanura	Dapil 2	8.517	6.503	Turun 2.014	23,6%
20	Endi Haryanto	Hanura	Dapil 3	5.554	6.895	Naik 1.341	24,1%
21	Ryan Aditya Wahyu Pradana	PAN	Dapil 1	3.646	4.397	Naik 751	20,5%
22	H. Isnan Rijadi Achmad	PAN	Dapil 3	2.877	3.888	Naik 1.011	35,%
23	Mochammad Rachmanuddin	Demokrat	Dapil 1	5.224	8.889	Naik 3.665	70,1%
24	Ana Susanto	Demokrat	Dapil	2.958	5.637	Naik: 2.679	90.5%

			2				
25	Sri Rahayu	Demokrat	Dapil 3	4.882	5.330	Naik: 448	9,1%
26	Guruh Tri Adi Putra	Demokrat	Dapil 4	4.928	8.213	Naik: 3.285	66,6%
27	Slamet	Demokrat	Dapil 5	4.053	8.699	Naik: 4.646	114%
28	Arya Achmad Zakaria	PPP	Dapil 1	4.897	6.548	Naik: 1.651	33,7%
29	H. Edy Purwanto	PPP	Dapil 2	9.694	9.682	Turun 12	0,12%
30	Hj. Lilis Ujianti	PPP	Dapil 4	4.665	4.275	Turun 390	8,3%

Sumber: KPU Banjarnegara

Dari pemaparan table diatas, sebagian besar kandidat petahana yang terpilih mengalami kenaikan suara, dengan jumlah yang mengalami kenaikan suara adalah 23 petahana atau 60% dari total petahana yang terpilih kembali, kenaikan jumlah suaranya variatif dari ratusan hingga ribuan, rata-rata kenaikan suara petahana adalah 55% suara atau 2.033 suara, dari 23 petahana yang mengalami kenaikan suara, 6 petahana mengalami kenaikan suara lebih dari 90% dengan 5 petahana di antaranya mengalami kenaikan lebih dari 100% suara, sedangkan petahana yang mengalami penurunan suara ada 7 petahana dengan rata-rata penurunan adalah 1.169 suara atau 21,4% suara. Ini menjelaskan bahwa dana pokir memberikan kontibusi besar terhadap kenaikan suara dan juga keterpilihan kembali petahana.

Kehadiran dana pokir memberikan peluang lebih kepada petahana dalam mengatur strategi politiknya untuk memengkan suara, dengan adanya dana pokir petahana tidak perlu repot membangun dukungan suara baru pada pemilu yang akan datang, petahana cukup merawat hubungan kedekatan serta pemberian dana pokir secara rutin kepada wilayah basis dukungannya. Menurut peneliti dana pokir juga tidak hanya digunakan untuk merawat basis dukungan, tetapi juga bisa digunakan untuk membuat dukungan baru di wilayah lain, petahana hanya cukup memberikan pokir dan menjamin bahwa di tahun berikutnya wilayah tersebut akan diberikan lagi, secara otomatis masyarakat akan memberikan dukungannya

kepada petahana tersebut, walupun itu tidak menjamin kemenangan suara, jika petahana menargetkan kemenangan suara maka harus dikuatkan dengan money politik.

Alasan kemenangan petahana DPRD di Kabupaten Banjarnegara lebih mendominasi dibandingkan dengan pendatang baru, bisa dilihat dari strategi dan sumberdayanya, petahana mempunyai dua sumberdaya yaitu dana pokir dan uang pribadi, berbeda dengan calon pendatang baru yang hanya mengandalkan money politik, maka petahana punya dua senjata pada pemilu 2024 yaitu dana pokir untuk sasaran mobilisasi dukungan kelompok dan dana pribadi untuk memperkuat distribusi pokir, serta adakalanya untuk membuat basis dukungan baru atau melebarkan wilayah dukunganya, berbeda dengan pendatang baru yang hanya menggunakan strategi sasaran perorangan dengan money politik, sekalipun menggunakan dananya untuk menargetkan dukungan kelompok itu akan menguras sumberdaya lebih banyak dan titik pendistribusian yang terbatas, dilihat dari strategi dan sumberdaya petahana lebih unggul dari pada calon pendatang baru.

Petahana juga memiliki kelebihan dilihat dari relasi politiknya daripada calon pendatang baru, petahana sudah memiliki hubungan politik patronase dan klientalisme yang sudah sistematis dan sudah terawat yang mempermudah petahana untuk memobilisasi dukungan suara, berbeda dengan calon pendatang baru yang memulai dari awal membangun basis dukungan.

3. Kekalahan Petahana Sebagai Akibat dari Kegagalan Strategi Pendistribusian Dana Pokir

Petahana yang berasal dari wilayah desa juga mempunyai peluang keberhasilan lebih besar untuk memobilisasi suara dengan strategi dana pokir dibandingkan petahana dari wilayah kota, petahana yang berasal dari wilayah desa lebih pandai dalam membangun kedekatan hubungan kekeluargaan seperti umumnya budaya desa, sedangkan petahana yang berasal dari wilayah kota tidak pandai dalam membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat desa, dana pokir bagi petahana yang berasal dari wilayah kota bukanlah jaminan untuk kemenangan dukungan suara, tanpa penguatan dengan *vote buying* strategi pokir akan sia-sia, sedangkan petahana yang berasal dari wilayah desa mereka sangat paham median strategi pendistribusian dana pokir, sehingga presentase keberhasilan strategi mobilisasi suara menggunakan dana pokir lebih efektif, temuan penelitian ini juga menunjukan di wilayah desa dengan ekonomi kelas bawah, terkadang petahana bisa memenangkan suara mayoritas tanpa harus mendistribusikan pokir, cukup dengan pendekatan kepada tokoh masyarakat,

barulah setelah kemenangan perolehan suara itu, di tahun berikutnya petahana akan memberikan dana pokir untuk perawatan dukungan konstituen.

Tabel 15. Daftar Asal Wilayah Domisili, Petahana DPRD Kabupaten Banjarnegara yang tidak Terpilih Kembali di Pemilu 2024.

Petahana yang kalah dan asal wilayah domisilinya				
No	Nama	Partai	Wilayah Domisili	
1	Amalia Desiana	PDIP	Kota	
2	Wahyu Hidayat	PDIP	Kota	
3	Sri Hartati	PDIP	Kota	
4	Dyah Catur	PDIP	Kota	
5	Arif Budi Waluyo	PKB	Kota	
6	Siti Komariah	PKB	Kota	
7	Istiatun Minalloh	PKB	Kota	
8	Siti Murdiati	Demokrat		Desa
9	Nur Muhammad Salim	Demokrat	Kota	
10	Galih Pamungkas	PPP	Kota	
11	Dian Eka Winartiningsing	PPP	Kota	
12	Pujo Hardiansyah	PKS	Kota	
13	Wasis Pujianto	PKS		Desa
14	Dedi Suromli	PKS	Kota	
15	Slamet Sunaryono	Nasdem	Kota	
16	Bambang Prawoto Sutikno	PAN	Kota	
17	Slamet Santoso	PAN	Kota	
18	Dyah Windarti	Golkar	Kota	
19	Marsudin	Golkar	Kota	
20	Bawono	Golkar		Desa
TOTAL	Wilayah Kota		17	
	Wilayah Desa			3

Sumber: DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Data tabel diatas menunjukan bahwa petahana DPRD yang kalah pada pemilu 2024 didominasi oleh petahana yang berasal dari wilayah kota, ini memperkuat temuan bahwa petahana yang berasal dari desa lebih berpeluang terpilih kembali dibandingkan petahana yang berasal dari wilayah kota, salah satu alasannya adalah karena mereka paham dengan kultur masyarakat wilayah desa dan ini yang menjadikan kesuksesan mereka dalam menggunakan dana pokir sebagai alat strategi politik untuk mendapatkan dukungan suara pada momen pemilu. Berbeda dengan petahana kota, mereka tidak paham tentang kultur masyarakat desa sehingga pada penggunaan dana pokir sebagai alat strategi politik untuk mendapatkan dukungan suara, mereka gagal dalam strateginya.

Petahana yang kalah atau tidak terpilih kembali pada pemilu 2024, mereka gagal dalam menggunakan dana pokir sebagai strategi politik untuk mendapatkan dukungan suara, kegagalan mereka salah satunya adalah karena tidak bisa membedakan antara kultur masyarakat di Kabupaten Banjarnegara wilayah desa dengan wilayah kota, mereka menganggap dua wilayah itu memiliki kultur yang sama, ini seperti yang disampaikan Bapak Pujo Hardiansyah *incumbent* dari Partai PKS yang gagal terpilih kembali pada pemilu 2024.

“Kita tidak bisa menyimpulkan, pokok-pokok pikiran itu efektif untuk strategi di daerah kota atau daerah pedesaan, karena banyak faktor-faktor lain yang mepengaruhinya, seperti hubungan komunikasi maupun hubungan emosional dengan masyarakat dan juga sekarang desa maupun kelurahan seringkali memberikan program bantuan seperti BLT dan sejenisnya, yang menyebabkan seringkali benturan dengan kepentingan politik pemerintah desa, sehingga strategi dengan pokok-pokok pikiran sama saja antara di desa maupun dikota” (Wawancara, Pujo, 20 Desember 2024).

Perbedaan pandangan strategi pendistribusian dana pokir antara petahana yang terpilih kembali dan yang kalah adalah penyebab yang mejadikan strategi menggunakan dana pokir itu efektif atau tidaknya saat digunakan untuk strategi pada momen pemilu. Kesalahan petahana yang kalah dengan memandang masyarakat desa dan kota sama saja adalah salah satu faktor yang menyebabkan mereka kalah dan tidak terpilih kembali. Mayoritas wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah pedesaan, yang otomatis jumlah pemilih paling banyak adalah di wilayah desa, kegagalan mereka dalam memahami kultur masyarakat di wilayah desa menjadikan strategi politiknya itu tidak efektif terutama strategi penggunaan dana pokir untuk dukungan suara pada momen pemilu.

Kegagalan lain yang menyebabkan petahana kalah dan tidak terpilih kembali adalah mereka gagal membangun kedekatan dengan pihak pemerintah desa maupun tokoh masyarakat, seperti yang disampaikan Bapak Pujo Hardiansyah, salah satu petahana yang tidak terpilih kembali di pemilu 2024, beliau menyampaikan

“Masyarakat desa sekalipun, sekarang tidak menjamin efektif tidaknya penggunaan money politik, termasuk strategi menggunakan dana pokok-pokok pikiran, sekarang desa banyak menggelontorkan bantuan ke warga, berupa uang tunai ataupun dalam bentuk lain seperti sembako, ini menjadi sebuah hubungan ikatan antara masyarakat dan pemerintah desa, sehingga ketika pemilu dan pemerintah desa mengarahkan ke calon lain, otomatis basis dukungan kita buyar disana” (Wawancara, Pujo, 20 Desember 2024).

Kegagalan mereka dalam melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat ataupun pemerintah menyebabkan dukungan politik memihak kepada petahana yang menang karena mereka pandai dalam menjalin hubungan kekeluargaan dengan tokoh masyarakat ataupun pihak pemerintah desa, adakalanya petahana yang kalah dan gagal dalam menggunakan strategi dana pokir juga kerana faktor serangan money politik dari petahana lain, pendapat ini disampaikan saat wawancara oleh Pak Endar DPRD dari partai PDIP yang kalah pada pemilu 2024, yang menyampaikan:

“Pokok-pokok pikiran itu tidak menjamin kemenangan di wilayah yang diberi proyek pokok-pokok pikiran, adakalanya masyarakat itu lebih memilih pemberian individual dibanding pokok-pokok pikiran, kemarin saya menyalurkan dana pokok-pokok pikiran itu 50 juta rupiah, untuk pengecoran jalan lingkungan dusun, dan saya hanya Cuma dapat suara 18 orang, kalah dengan pesaing saya yang melakukan serangan fajar 100 ribu per orang” (Wawancara, Endar, 05 November 2024).

Dari pemaparan diatas peneliti menyimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan petahana kalah dan tidak terpilih kembali adalah, *pertama*, mereka tidak memahami perbedaan kultur masyarakat desa dengan kota terutama pada penggunaan dana pokir sebagai strategi mendapatkan dukungan suara, *kedua*, mereka gagal dalam membangun kedekatan dengan pemerintah desa maupun tokoh masyarakat, *ketiga*, adakalanya kegagalan mereka

dalam mendistribusikan dana pokir sebagai strategi politik adalah karena serangan money politik dari petahana yang lain ataupun dari calon pendatang baru.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penelitian mengenai politik alokasi proyek dana pokir oleh anggota DPRD di Kabupaten Banjarnegara periode 2019-2024, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama. Pada distribusi dana pokir DPRD di Kabupaten Banjarnegara ditemukan ada dua jenis model distribusi yaitu distribusi programatik dan non-programatik, pada temuan penelitian ini, distribusi model programatik digunakan untuk membuka basis dukungan baru di wilayah yang belum ada pendukung kandidat petahana yang mendistribusikan dana pokir, sedangkan pada model distribusi non-programatik digunakan untuk merawat kelompok masyarakat yang merupakan pendukung lama, yaitu pendukung yang dulu memberikan dukungannya kepada petahana yang memberikan pokir pada pemilu sebelumnya atau dana pokir didistribusikan kepada wilayah basis dukungannya, pada jenis distribusi non-programatik ini teridentifikasi sebagai *pork barrel* karena sasaran distribusinya adalah kelompok serta bias partisan, pada distribusi non-programatik jenis pork barrel ini juga ditemukan politik patronase dan klientelisme, yang terjadi antara tokoh masyarakat atau pemerintah desa dengan petahana yang mendistribusikan pokir, petahana sendiri menargetkan masyarakat dengan ekonomi kelas menengah (wilayah desa) sebagai target distribusi dana pokir untuk mendapatkan dukungan suara. Broker pada distribusi dana pokir di Kabupaten Banjarnegara ada tiga jenis, yaitu pemerintah desa, organisasi masyarakat dan kader dari partai pengusung petahana yang mendistribusikan pokir, keberhasilan petahana dalam pendistribusian dana pokir juga dibantu pihak pemerintah kabupaten yang lain seperti Bupati atau pendukungnya yang berkerja di dinas, kerja sama dengan anggota DPRD yang lain dan pihak ketiga penggera proyek, pihak-pihak tersebut berkerja atas dasar kepentingan politik masing-masing dengan anggota petahana yang mendistribusikan pokir.

Kedua. Dana pokir DPRD di Kabupaten Banjarnegara memberikan keuntungan electoral yang besar kepada DPRD petahana dalam hal kenaikan suara dan keterpilihan kembali, terutama untuk petahana yang berasal dari wilayah desa, mereka mempunyai kelebihan dapat memahami kultur masyarakat desa, sehingga memudahkan mereka dalam membangun komunikasi dan kedekatan dengan kelompok masyarakat desa, berbeda dengan petahana berasal dari wilayah kota mereka kesulitan atau bahkan gagal dalam membangun komunikasi dan hubungan kedekatan dengan masyarakat desa, sehingga menjadikan strategi

dana pokir mereka tidak efektif, ini juga yang menjadi faktor petahana yang tidak terpilih kembali mayoritas adalah petahana yang berasal dari wilayah kota. Keuntungan lain adanya dana pokir bagi petahana adalah dalam pembentukan tim sukses, adanya dana pokir meminimalisir biaya pembentukan tim sukses, adakalanya tim sukses ini akan direkrut menjadi kader partai dan kembali berkerja untuk petahana yang memberikan pokir di pemilu selanjutnya, dana pokir di Kabupaten Banjarnegara digunakan untuk mobilisasi pemilih, dengan cara melakukan perjanjian untuk kemenangan dukungan suara dengan masyarakat ataupun adakalanya hanya digunakan sebagai pintu masuk oleh petahana untuk membangun kedekatan dengan masyarakat, dana pokir telah memberikan dampak terhadap kenaikan suara petahana, ini dikarenakan keberhasilan petahana dalam menggunakan dana pokir sebagai strategi politiknya, petahana yang berasal dari wilayah desa juga lebih berpeluang untuk menang kembali di pemilu dibandingkan dengan petahana yang berasal dari wilayah kota.

Dari penjelasan diatas memberikan penjelasan bahwa dana pokir di Kabupaten Banjarnegara didistribusikan dalam dua model yaitu programatik dan non-programatik, model non-programatik teridentifikasi sebagai pork barrel dan juga menyebabkan politik patronase dan klientelisme, dana pokir di Kabupaten Banjarnegara juga memberikan kontribusi besar terhadap keterpilihan kembali petahana DPRD pada pemilu 2024 di Kabupaten Banjarnegara terutama bagi petahana yang berasal dari wilayah desa atau kelompok masyarakat ekonomi menengah kebawah, adanya dana pokir memberikan efektifitas pada strategi yang digunakan DPRD petahana di Kabupaten Banjarnegara pada kontestasi pemilu 2024.

B. Lesson Learned dan Kelemahan Studi

1. Pembelajaran yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah pentingnya pemahaman tentang sistem politik terutama sistem pendistribusian dana pokir, penelitian ini menjelaskan bagaimana muatan kepentingan-kepentingan politik pada distribusi dana pokir memberikan celah kepada oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi.
2. Kontribusi penelitian ini pada keilmuan terutama tentang politik distributif adalah menemukan bahwa patronase dan klientelisme yang terjadi di masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah atau wilayah desa, dengan pendidikan dan pemahaman politik yang rendah lebih berbahaya dibandingkan dengan patronase dan klientelisme yang terjadi di masyarakat ekonomi kelas atas atau wilayah kota, yang lebih maju dalam hal pendidikan dan pemahaman politik, ketidaktahuan dan minimnya pemahaman masyarakat desa,

menjadikanya rentan dan mudah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab terutama pada pendistribusian dana pokir.

3. Kelemahan studi ini adalah kurang mendalam dalam membahas kepentingan pemerintah tingkat kabupaten terutama dinas-dinas terkait pada pendistribusian dana pokir, kepentingan-kepentingan ini terjalin antara Bupati, pihak Dinas terkait dan juga DPRD, karena penelitian ini berfokus pada DPRD maka tidak mendalam dalam membahas kepentingan-kepentingan tersebut.

C. Saran

Berdasarkan hasil studi diatas, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan berperan dalam distribusi dana pokir, serta saran untuk penelitian-penelitian yang akan datang tentang distribusi dana pokir, dengan saran sebagai berikut:

1. Perlunya peran pemerintah untuk memperketat pengawasan pendistribusian dana pokir, terutama di tingkat desa, tujuannya adalah agar program dana pokir lebih efektif manfaatnya, serta meminimalisir oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan dana pokok-pokok pikiran.
2. Pemerintah harus mendorong dan melakukan sosialisasi memberikan pemahaman masyarakat terutama di wilayah desa, tentang pemahaman politik serta bagaimana dana pokir itu didistribusikan, tujuannya adalah agar medorong masyarakat desa menjadi pemilih yang cerdas dan paham tentang proses distribusi dana pokir
3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan meneliti tentang dana pokir DPRD terhadap kepentingan di tingkat pemerintah kabupaten, untuk melihat bagaimana peran-peran dinas terkait dan juga Bupati serta kepentingan didalamnya pada proses distribusi dana pokir.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaz, P., & Suswanta. (2021, Agustus). Bentuk dan Jaringan Patron-Klien Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. *E-ISSN 2720-9393, Vol 2, No 3 (2021), 2(3)*, 170-183. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i3.12793>
- Anggoro, T. (2019, April 1). Politik Patronase dan Klientelisme Purnawirawan Tni Pada Pemilu Legislatif. *Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 4(1), 64-74. doi:<http://dx.doi.org/10.24905/jip.v4i1.1242>
- Ardiansa, D. (2014, Oktober 26). *Politik Distributif*. Retrieved from Cakra Wikara Indonesia: <https://cakrawikara.id/publikasi/artikel/politik-distributif/>
- Aspinal, E., & Sukmajati, M. (2015). Patronase dan Klientelisme dalam Politik Elektoral di Indonesia. Dalam E. Aspinall, & M. Sukmajati (Penyunt.), *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014* (Cetakan 1 ed., hal. 1-49). Yogyakarta: PolGov.
- Aziz, A. (2020). Teknik Analisis Data. *Teknik Analisis Data Analisis Data*., 1-15.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design : choosing among five approaches* (3rd ed.). (L. Habib, K. Koscielak, B. Bauhaus, & M. Masson, Eds.) Washington DC, United States of America: SAGE Publications, Inc.
- Dini Safitri, S. D. (2022). Politik Distributif Bantuan Sosial Sembako Di Akar Rumput Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 (Studi kasus di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang). *Skripsi S1 Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Uin Walisongo Semarang*, 1-46.
- DPRD, & DINKOMINFO Kabupaten Banjarnegara. (n.d.). *DPRD Banjarnegara*. Retrieved from Tentang DPRD: <https://dprd.banjarnegarakab.go.id/kedudukan-tugas-pokok-dan-fungsi-dprd/>
- Haliza, N. A., Fendri, A., Andora, H., Khairani, & Rosari, A. (2023). Penganggaran Dana Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *ISSN: 2548-1398*, 8(1), 143-151.
- Hendriansyah, D. S. (2019). Patronase Politik Dalam Pemilu: Studi Tentang Mobilisasi Dukungan Yuniar Ramadhana Padapileg 2014 Di Desa Paowan Kabupaten

Situbondo. *Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.*

Hilmawan, T. (2022). Politik Patronase Partai Kebangkitan Bangsa Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019. *Masters Thesis, Universitas Lampung.* Retrieved from <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/63817>

Iba, Z., & Wardhan, A. (2023). Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*(17), 28-35. Retrieved from <http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf>

KPU. (2024, Mei 16). *JDIH KPU RI.* Retrieved from Komisi-JDIH KPU RI: <https://jdih.kpu.go.id/jateng/banjarnegara/countkepkpuk-426554565255395552544d253344>

Kurniawan, R. H. (2023). Patronase Dan Klientelisme Dalam Dukungan Politik Tuanku Tarekat Syathariyah Pada Pilkada Di Sumatera Barat. *Ensiklopedia Education Review*, 5, 32-41. doi:<https://doi.org/10.33559/eer.v5i1.1728>

Mahsun, M. (2015). Kota Palembang, Sumatera Selatan: Dana Aspirasi dan Politik Klientelisme. Dalam E. Aspinall, & M. Sukmajati (Penyunt.), *Politik Uang di Indonesia Patronase dan Klientelisme di Pemilu Legislatif 2014* (Cetakan 1 ed., hal. 174-197). Yogyakarta: PolGov.

Marasabessy, M. D. (2022). Pemanfaatan Dana Aspirasi Anggota Dprd Maluku Tengah. *Hipotesa, Volume. 16. No. 2 November 2022*(2), 36-49. Retrieved from <https://ejurnal.stiaalazka.ac.id/index.php/ojs-hipotesa/article/view/62>

Nurahma, F. (2022). Gaya Kepemimpinan Dan Dampaknya Terhadap Elektabilitas Kandidat Petahana: Studi Keterpilihan Kusin yang Ketiga Kalinya pada Pilkades 2018 di Desa Sikasur Kecamatan Belik Kab. Pemalang. *Skripsi SI Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.*

Pratama, R. A. (2017, Maret 1). Patronase Dan Klientalisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017. *Jurnal Wacana Politik - ISSN 2502 - 9185*, 2(1), 33-44.

Pratiwi, N. I. (2017, Agustus). Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1, 202-222.

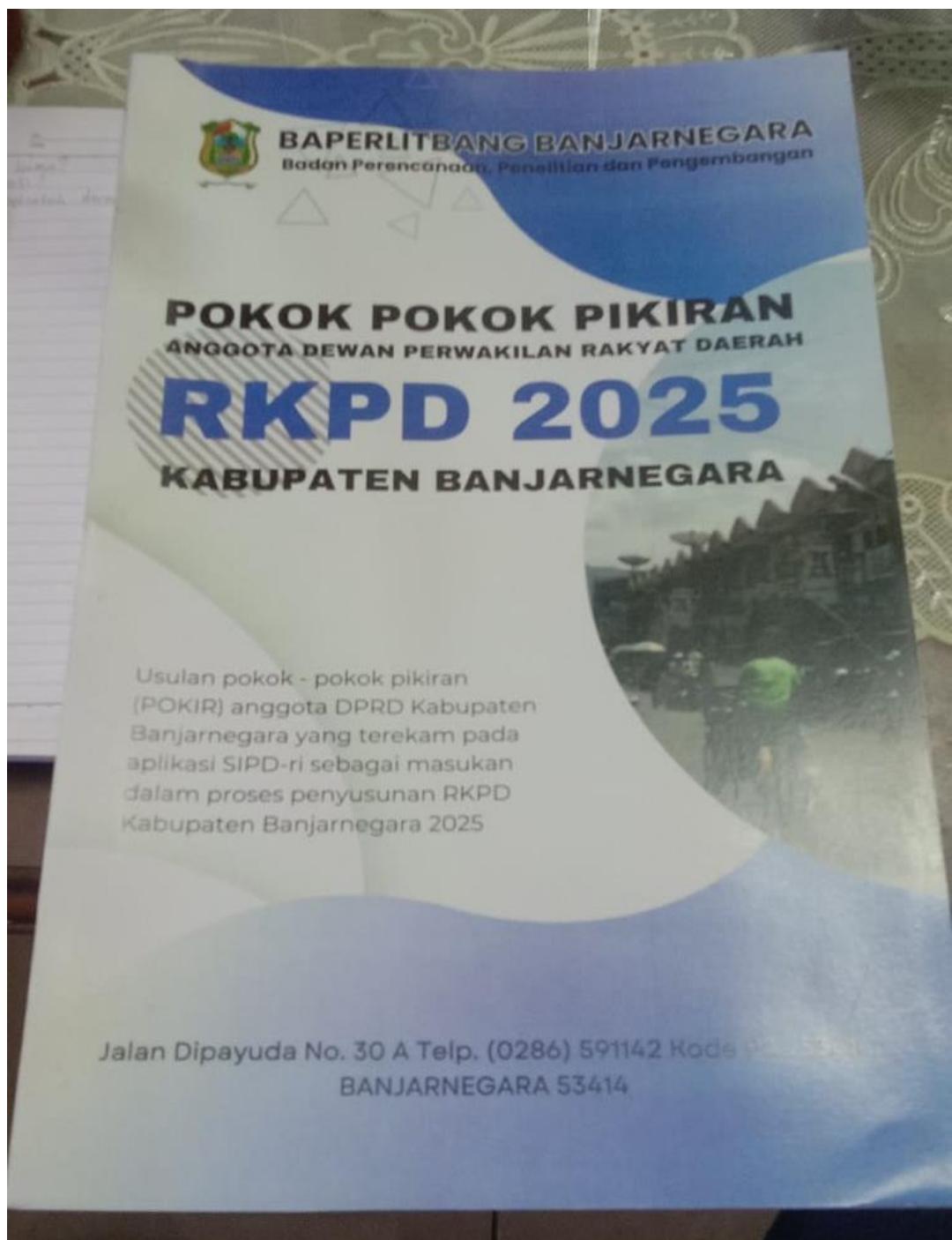
- Saragintan, A., & Hidayat, S. (2016, 9 30). Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011. *Jurnal Politik Aktor Politik dan Kepentingan*, 2(1), 1-25. doi:DOI: 10.7454/jp.v2i1.1130
- Sari, E. L. (2021, Januari 1). Politik Elektoral: Pemenangan Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu (Studi Pemilu Legislatif Jawa Timur 2019). *Jurnal Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya*, 1(1), 98-120.
- STOKES, S. C., Dunning, T., Nazareno, M., & Brusco, V. (2013). *Brokers, Voters, and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics* (First Published ed.). New York, United States of America: Cambridge University Press. Retrieved from www.cambridge.org
- Susanto, M. (2017, April). Kedudukan Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia*, 24(2), 255-278. Retrieved from <http://jurnal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM>
- Wibowo, K. A. (2020). Strategi Pemberdayaan Sdm Sekretariat Dprd Dalam Pelayanan Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran Dprd Sebagai Sarana Perjuangan Aspirasi Masyarakat. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Magister Manajemen Universitas Muria Kudus*, 1-56.

Daftar Wawancara

- Wawancara, Bambang Adi Purnomo, 09 November 2024
- Wawancara, Arya Achmad Zakaria, 17 November 2024 dan 28 Desember 2024
- Wawancara, Pujo Hardiansyah, 20 Desember 2024
- Wawancara, Endar Agus Triono, 05 November 2024
- Wawancara, Anton Hermawan, 09 Desember 2024
- Wawancara, Hermawan Tutut Indarjo, 16 Desember 2024
- Wawancara, Nurul Ni'mah, 19 Desember 2024
- Wawancara, Seyadi, 19 Desember 2024
- Wawancara, Wawan, 30 Desember 2024
- Wawancara, Hamdan, 30 Desember 2024

LAMPIRAN

Dokumentasi Foto



Usulan Pokok-Pokok Pikiran tahun 2025 Kabupaten Banjarnegara

NO	URAIAN KEGIATAN	NOMINAL AKHIR	OPD
1	Hibah keuangan kepada Kelompok Tani Sido Dadi Rt. 02 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Punggelan.	50.000.000	DISTANKAN KP
2	Hibah keuangan kepada Kelompok Tani Perintis Makmur Rw 02 Desa Kasilib Kecamatan Wanadadi	50.000.000	DISTANKAN KP
3	Hibah kepada Syarikat Islam untuk Wanita Syarikat Islam PAC Kecamatan Pejawaran	55.000.000	BAKESBANG
4	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk TPQ Darul Faroh Rt 04 Rw 03 desa Kalilunjar Kec. Pejawaran	40.000.000	BAKESBANG
5	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk TPQ Darul Hikmah Rt 03 Rw 01 desa Kalilunjar Kec. Pejawaran	40.000.000	BAKESBANG
6	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk Masjid AL Barokah Rt 03 Rw 05 dusun Kalikuning Desa Pejawaran, Kec. Pejawaran	15.000.000	BAKESBANG
7	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk Mushol AL Barokah Rt 02 Rw 02 desa Tegaljeruk Kec. Pagentan	30.000.000	BAKESBANG
8	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC Muhammadiyah untuk Majelis Ta'lim AL Zaytun Pemuda Muhammadiyah dukuh Tiodas Desa Sarwodadi Kec. Pejawaran	25.000.000	BAKESBANG
9	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk Majelis Ta'lim Alfa Salam dusun Ngasinan Desa Pejawaran, Kec. Pejawaran	20.000.000	BAKESBANG
10	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk TPQ AL Mutaqin Rt 01 Rw 01 Desa Karangsari, Kec. Pejawaran	50.000.000	BAKESBANG
11	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk Masjid Baiturohman dukuh Sipetung Rt 07 Rw 04 desa Kasmaraan, Kec. Pagentan	25.000.000	BAKESBANG
12	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC Muhammadiyah untuk Sarpas Ranting Muhammadiyah Desa Sarwodadi	30.000.000	BAKESBANG
13	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk Majelis Ta'lim AL Hijrah Desa Sarwodadi	10.000.000	BAKESBANG
14	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk Fatayat dukuh Pawuhan Desa Karangtengah, Batur	15.000.000	BAKESBANG
15	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk Mushola AL Ghofur dusun Simpangan Rt 01 Rw 03 Desa Karangtengah, Kec. Batur	20.000.000	BAKESBANG
16	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk Masjid Baiturohman Dusun Simpangan Rt 04 Rw 03 Desa Karangtengah, Kec. Batur	20.000.000	BAKESBANG
17	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk Majelis Ta'lim Miftahusholihin dukuh Gunung Putih Desa Kalitлага Kec. Pagentan	15.000.000	BAKESBANG
18	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk Majelis Ta'lim Khoirunnisa Desa Larangan Kec. Pagentan	15.000.000	BAKESBANG
19	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk Majelis Ta'lim AL Hikmah dukuh Bululurang Rt 02 Rw 05 Desa Pagentan, Kec. Pagentan	15.000.000	BAKESBANG
20	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk Majelis Ta'lim AL Hidayah Rt 04 Rw 02 Desa Gumingsir, Kec. Pagentan	15.000.000	BAKESBANG
21	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk Majelis Ta'lim AL Hidayatulloh Desa Gemuruh Kec. Bawang	20.000.000	BAKESBANG
22	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk Mushola Baiturohman Rt 03 Rw 02 Desa Dieng Kulon	20.000.000	BAKESBANG
23	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC Muhammadiyah untuk Mushola Nurul Badar Rt 02 Rw 03 Desa Batur	20.000.000	BAKESBANG
24	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk Majelis Ta'lim Nguku Dulai Rt 02 Rw 03 Desa Karangsari	15.000.000	BAKESBANG
25	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk Majelis Ta'lim Nurul Ilmi Desa Sokaraja Kec. Pagentan	15.000.000	BAKESBANG
26	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk Majelis Ta'lim AL Khazanah Desa Dieng Kulon	20.000.000	BAKESBANG
27	Bantuan Hibah Keuangan Untuk PC NU Kabupaten Banjarnegara	20.000.000	BAKESBANG
28	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk Majelis Ta'lim AL Amanah Desa Karangtengah Rw 1 Kec. Batur	40.000.000	BAKESBANG

NO	URAIAN KEGIATAN	NOMINAL AKHIR	OPD
29	Hibah kepada PD. Muhammadiyah Banjarnegara untuk grup shalawatan Al Hikmah Dusun Karanggedang Desa Jembangan Kec. Punggelan	20.000.000	BAKESBANG
30	Hibah kepada PD. Muhammadiyah Banjarnegara untuk rehab mushala Al Kamal Dusun Mertaina Desa Tribuana Kec. Punggelan	50.000.000	BAKESBANG
31	Hibah kepada PD. Muhammadiyah Banjarnegara untuk tralis mushala Al Ikhlas Dusun Mertaina Desa Tribuana Kec. Punggelan	40.000.000	BAKESBANG
32	Hibah kepada PD. Muhammadiyah Banjarnegara untuk rehab mushala Al Hikmah Dusun Trisi Desa Tribuana Kec. Punggelan	60.000.000	BAKESBANG
33	Hibah kepada PD. Muhammadiyah Banjarnegara untuk pembangunan TPQ Nurul IMAN Dusun Karanglewas Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi	20.000.000	BAKESBANG
34	Hibah kepada PD. Muhammadiyah Banjarnegara untuk rehab mushala Al Amin RT 03 RW 04 Desa Sawangan Kec. Punggelan	20.000.000	BAKESBANG
35	Hibah kepada PD. Muhammadiyah Banjarnegara untuk Majlis Taklim Darul Ikhwan RT 03 RW 02 Dusun Suwuk Desa Tlaga Kec. Punggelan	20.000.000	BAKESBANG
36	Hibah kepada PD. Muhammadiyah Banjarnegara untuk pembangunan Majlis Taklim Hidayatuth Tholibin Dusun Penisihan Desa Bondolharjo, Kec. Punggelan	75.000.000	BAKESBANG
37	Hibah kepada PD. Muhammadiyah Banjarnegara untuk rehab Mushala Al Ashlah RT 01 RW 03 Dusun Karangmenjangan Desa Sawangan, Kec. Punggelan	20.000.000	BAKESBANG
38	Hibah kepada PD. Muhammadiyah Banjarnegara untuk pembangunan Mushala Al Inabah RT 03 RW 10 Desa Punggelan, Kec. Punggelan	20.000.000	BAKESBANG
39	Hibah kepada PD. Muhammadiyah Banjarnegara untuk tralis Mushala Arrohman Dukuh sirebut Desa Purwasana, Kec. Punggelan	20.000.000	BAKESBANG
40	Hibah PD. Muhammadiyah Banjarnegara untuk rehab TPQ Miftahul Falah RT. 01 RW. 02 Dusun Blabar Desa Kecepit Kec. Punggelan	20.000.000	BAKESBANG
41	Hibah kepada Ormas NU Masjid Al Ikhlas Desa Gunungjati Rt. 04 Rw.04 Kecamatan Pagedongan	10.000.000	BAKESBANG
42	Hibah kepada Ormas NU TPQ Badru Salam Desa Gunungjati Rt. 05 Rw.07 Kecamatan Pagedongan	10.000.000	BAKESBANG
43	Hibah kepada Ormas NU Mushola Al Hikmah Desa Gunungjati Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Pagedongan	10.000.000	BAKESBANG
44	Hibah kepada Ormas NU Mushola Al Ittihad Rt. 01 Rw. 01 Desa Gunungjati Kecamatan Pagedongan	15.000.000	BAKESBANG
45	Hibah kepada Ormas NU Mushola Al Muhtasor Desa Pagedongan Rt. 04 Rw. 07 Kecamatan Pagedongan	10.000.000	BAKESBANG
46	Hibah kepada Ormas NU Masjid Baiturohman Desa Pagedongan Rt. 01 Rw. 04 Kecamatan Pagedongan	10.000.000	BAKESBANG
47	Hibah kepada Ormas NU TPQ Nurul Falah Desa Pagedongan Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Pagedongan	10.000.000	BAKESBANG
48	Hibah kepada Ormas NU Mushola Al Ikhlas Desa Pagedongan Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Pagedongan	10.000.000	BAKESBANG
49	Hibah kepada Ormas NU Mushola Nurul Huda Desa Pagedongan Rt. 04 Rw. 06 Kecamatan Pagedongan	10.000.000	BAKESBANG
50	Hibah kepada Ormas Muhammadiyah Majelis Taklim al Kamal Rt. 03 Rw. 01 Desa Masaran Kecamatan Bawang	15.000.000	BAKESBANG
51	Hibah kepada Ormas Muhammadiyah Mushola Baiturohman Rt. 04 Rw. 05 Desa Duren Kecamatan Pagedongan	10.000.000	BAKESBANG
52	Hibah kepada ranting NU Desa Duren Kecamatan Pagedongan	30.000.000	BAKESBANG
53	Hibah kepada Ormas Muhammadiyah Majelis Taklim Al Iksan Desa Gemuruh Sireok Rt. 03 Rw 01 Kecamatan Bawang	15.000.000	BAKESBANG
54	Hibah kepada Ormas Muhammadiyah Masjid Baetul Salam Rt. 02 Rw. 09 Desa Lebakwangi Kecamatan Pagedongan	15.000.000	BAKESBANG

Pengawasan Pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran 2024 Kabupaten Banjarnegara

NO	URAIAN KEGIATAN	NOMINAL AKHIR	OPD
55	Hibah kepada Ormas NU Majelis Taklim Baitu Salam Desa Kebutuh Jurang Rt. 01 Rw. 09 Kecamatan Pagedongan	10.000.000	BAKESBANG
56	Hibah kepada Ormas NU Masjid Nurul Hidayah Rt. 04 Rw. 05 Desa Kebutuh Duwur Kecamatan Pagedongan	15.000.000	BAKESBANG
57	Hibah kepada Ormas NU Mushola Al Ikhlas Rt. 08 Rw. 01 Desa Gentansari Kecamatan Pagedongan	10.000.000	BAKESBANG
58	Hibah kepada Ormas NU Mushola Al Amin Rt. 06 Rw. 01 Desa Gentansari Kecamatan Pagedongan	10.000.000	BAKESBANG
59	Hibah kepada Ormas Muhammadiyah TPQ Al Munawar Rt. 03 Rw. 02 Desa Pagedongan Kecamatan Pagedongan	10.000.000	BAKESBANG
60	Hibah kepada Ormas Muhammadiyah TPQ Al Fath Sidua Rt. 06 Rw. 01 Desa Somawangi Kecamatan Mandiraja	10.000.000	BAKESBANG
61	Hibah kepada Ormas NU Mushola Al Ikhlas Desa Pagedongan Rt. 01 Rw. 07 Kecamatan Pagedongan	10.000.000	BAKESBANG
62	Hibah kepada Ormas NU Ranting Desa Twelagiri Kecamatan Pagedongan	20.000.000	BAKESBANG
63	Hibah kepada Ormas NU Masjid At Tagwai Blimbing Kulon Rt. 01 Rw. 04 Desa Kebutuhduwur Kecamatan Pagedongan	10.000.000	BAKESBANG
64	Hibah kepada Ormas Muhammadiyah Majelis Taklim Miftahul Janah Desa Lebakwangi Rt. 03 Rw. 06 Kecamatan Pagedongan	10.000.000	BAKESBANG
65	Hibah kepada Ormas NU Ranting Desa Twelagiri Kecamatan Pagedongan	20.000.000	BAKESBANG
66	Hibah NU tpq azzainudin dukuh balter pucang rt 2 rw 4. Bawang	20.000.000	BAKESBANG
67	Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi	25.000.000	BAKESBANG
68	BANTUAN HIBAH KEPADA MWL NU WANAYASA KEC. WANAYASA	25.000.000	BAKESBANG
69	BANTUAN HIBAH KEPADA MUSLIMAT NU WANAYASA KEC. WANAYASA	25.000.000	BAKESBANG
70	BANTUAN HIBAH KEPADA FATAYAT NU WANAYASA KEC. WANAYASA	25.000.000	BAKESBANG
71	BANTUAN HIBAH KEPADA GP ANSOR WANAYASA KEC. WANAYASA	20.000.000	BAKESBANG
72	BANTUAN HIBAH KEPADA PAC BANSER NU WANAYASA KEC. WANAYASA	20.000.000	BAKESBANG
73	BANTUAN HIBAH KEPADA LDNU WANAYASA KEC. WANAYASA	15.000.000	BAKESBANG
74	BANTUAN HIBAH KEPADA IPNU/PPNU WANAYASA KEC. WANAYASA	15.000.000	BAKESBANG
75	BANTUAN HIBAH KEPADA PENGADAAN SARPRAS KEPADA LPBI NU WANAYASAKEC. WANAYASA	20.000.000	BAKESBANG
76	BANTUAN HIBAH UNTUK PENGADAAN SARPRAS KEPADA GARFA NU Wanayasa KEC. WNAYASA	15.000.000	BAKESBANG
77	BANTUAN HIBAH UNTUK PENGADAAN SARPRAS KEPADA MASJID AR ROHMAH RT 02 RW 01 DESA DAWUHAN KEC. WANAYASA	25.000.000	BAKESBANG
78	BANTUAN HIBAH UNTUK PENGADAAN SARPRAS MAJELIS TAKLIM ROUHUL JANAH RT01 RW 02 DESA KUBANG KEC. WANAYASA	20.000.000	BAKESBANG
79	BANTUAN HIBAH UNTUK PENGADAAN SARPRAS MAJELIS TAKLIM NURUL IKHLAS RT 02 RW 01 DESA LEGOKSAYEM KEC. WANAYASA	20.000.000	BAKESBANG
80	BANTUAN HIBAH UNTUK PENGADAAN SARPRAS MAJELIS TAKLIM SADAT KAWEDAR RT 05 RW 03 DESA PAGERGUNUNG KEC. WANAYASA	20.000.000	BAKESBANG
81	BANTUAN HIBAH UNTUK PENGADAAN SARPRAS MAJELIS TAKLIM RIJALUL ANSOR RT 04 RW 01 DESA PAGERGUNUNG KEC. WANAYASA	20.000.000	BAKESBANG
82	BANTUAN HIBAH UNTUK JAMAAH YASIN AL HIDAYAH DUKUH PAYAMAN LOR DESA WANAYASA KEC. WANAYASA	20.000.000	BAKESBANG
83	BANTUAN HIBAH UNTUK PENGADAAN SARPRAS KEPADA MADRASAH DINIYAH TAKMILYAH (MDT) KRANDEGAN DESA PAGERPELAH KEC. KARANGKOBAR	20.000.000	BAKESBANG

NO	URAIAN KEGIATAN	NOMINAL AKHIR	OPD
84	BANTUAN HIBAH UNTUK PENGADAAN SARPRAS PAC FATAYAT PANDANARUM, KEC. PANDANARUM	15.000.000	BAKESBANG
85	BANTUAN HIBAH UNTUK PENGADAAN SARPRAS PAC GP ANSOR PANDANARUM, KEC. PANDANARUM	15.000.000	BAKESBANG
86	Permohonan bantuan sarpras untuk anak ranting Fatayat NU dukuh Sironge Desa Sironge KEC. PANDANARUM	15.000.000	BAKESBANG
87	BANTUAN HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN MASJID DARUSSALAM DUKUH SIDAU RIP DESA SINDUAJI KEC. PANDANARUM	20.000.000	BAKESBANG
88	BANTUAN HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN MASJID AL IKHLAS DUSUN PAGIRANJA DESA LAWEN KEC. PANDANARUM	20.000.000	BAKESBANG
89	BANTUAN HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN TPQ AL FATAH DUSUN KENDILWESI DESA LAWEN KEC. PANDANARUM	20.000.000	BAKESBANG
90	BANTUAN HIBAH UNTUK PENGADAAN SARPRAS MDT RIYADUL JANAH DUKUH BANTENGAN DESA SIRONGE KEC. PANDANARUM	20.000.000	BAKESBANG
91	BANTUAN HIBAH UNTUK PENGADAAN SARPRAS KEPADA MUSLIMAT ANAK RANTING MANGLI DESA LAWEN KEC. PANDANARUM	20.000.000	BAKESBANG
92	BANTUAN HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN MASJID DARUL MUTTAQIN DKHH BEJI KARANGKOBAR DESA BEJI, KEC. PANDANARUM	20.000.000	BAKESBANG
93	BANTUAN HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN MUSHOLLA HIDAYATUL JANAH BANTENGAN DESA SIRONGE KEC. PANDANARUM	20.000.000	BAKESBANG
94	BANTUAN HIBAH UNTUK PENGADAAN SARPRAS KEPADA MUSHOLLA FATHUL QOLBI MANGLI DESA LAWEN KEC. PANDANARUM	20.000.000	BAKESBANG
95	BANTUAN HIBAH SARPRAS KEPADA PAC FATAYAT NU KALIBENING KEC. KALIBENING	20.000.000	BAKESBANG
96	BANTUAN HIBAH SARPRAS KEPADA PAC MUSLIMAT NU KALIBENING KEC. KALIBENING	20.000.000	BAKESBANG
97	BANTUAN HIBAH KEPADA PC NU BANJARNEGARA	75.000.000	BAKESBANG
98	BANTUAN HIBAH KEPADA PC GP ANSOR BANJARNEGARA	40.000.000	BAKESBANG
99	Hibah kepada Muhammadiyah untuk pengembangan Masjid Al Hikmah Desa Tunggara Kec. Sigaluh	30.000.000	BAKESBANG
100	Hibah kepada Muhammadiyah untuk pengadaan trtag. Masjid Al Hidayah RT 01 RW 01 Desa Kesenet Kec. Banjarmangu	25.000.000	BAKESBANG
101	Hibah kepada Muhammadiyah untuk TPQ AL MUKOROBIN Dukuh Clapar Desa Clapar Kec. Madukara	25.000.000	BAKESBANG
102	Hibah kepada Muhammadiyah utk TPQ. " AL 'ASHRIYAH " Desa Sigeblog Kec. Banjarmangu	30.000.000	BAKESBANG
103	Hibah Kepada PC NU Kabupaten Banjarnegara untuk Rehab Mushola Ar Rohman RT 02 RW 08 Jambean Dusun Sipoh Desa Bondolharjo Kec Punggelan	50.000.000	BAKESBANG
104	Hibah kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjarnegara	700.000.000	BAKESBANG
105	Bantuan Hibah Kepada Ranting NU Desa Gumiwang kec. Purwanegeara	25.000.000	BAKESBANG
106	Bantuan Hibah Kepada Ranting Muslimat NU desa Gunungjati Kec. Pagedongan	20.000.000	BAKESBANG
107	Bantuan Hibah Kepada Ranting NU desa Kaitengah kec. Purwanegeara	25.000.000	BAKESBANG
108	Bantuan Hibah Kepada Ranting Muslimat NU Dusun Pulasari Desa Danaraja	10.000.000	BAKESBANG
109	Bantuan Hibah Kepada PC NU Kabupaten Banjarnegara	10.000.000	BAKESBANG
110	Bantuan Hibah Kepada Ranting Muslimat/Fatayat Desa Wiramastra kec. Bawang	70.000.000	BAKESBANG
111	Bantuan Hibah Kepada Ranting GP ANSOR Desa Wiramastra kec. Bawang	10.000.000	BAKESBANG
112	HIBAH KEPADA PD. MUHAMMADIYAH KAB. BANJARNEGARA UNTUK PEMBANGUNAN MASJID BAITURROKHIM DUSUN KARANGLO DESA KALITLAGA KEC. PAGENTAN	150.000.000	BAKESBANG

Pengawasan Pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran 2024 Kabupaten Banjarnegara

NO	URAIAN KEGIATAN	NOMINAL AKHIR	OPD
113	HIBAH KEPADA PD. MUHAMMADIYAH KAB. BANJARNEGARA UNTUK PEMBELIAN KOMPUTER TPQ ASLAHAL JANNAH DESA KALITLAGA KEC. PAGENTAN	10.000.000	BAKESBANG
114	HIBAH KEPADA PD. MUHAMMADIYAH KAB. BANJARNEGARA UNTUK PEMBELIAN KOMPUTER TPQ MIFTAHUSSOLIHIN DESA KALITLAGA KECAMATAN PAGENTAN	10.000.000	BAKESBANG
115	HIBAH KEPADA PD. MUHAMMADIYAH KAB. BANJARNEGARA BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID AL BAROKAH DUSUN GUNTURAN DESA KALITLAGA KEC. PAGENTAN	10.000.000	BAKESBANG
116	HIBAH KEPADA PD. MUHAMMADIYAH KAB. BANJARNEGARA UNTUK PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN CHUBBUL WATHON DUSUN JAMBEAN DESA KALITLAGA KEC. PAGENTAN	200.000.000	BAKESBANG
117	HIBAH KEPADA PD. MUHAMMADIYAH KAB. BANJARNEGARA UNTUK PEMBANGUNAN MAJLIS TAKLIM DUSUN KARANGANGKA DESA KARANGANGKA KEC. PAGENTAN	100.000.000	BAKESBANG
118	HIBAH KEPADA PD. MUHAMMADIYAH KAB. BANJARNEGARA UNTUK PEMBANGUNAN MASJID KRAJAN DESA SOKARAJA KEC. PAGENTAN	15.000.000	BAKESBANG
119	Hibah kepada Muhammadiyah untuk Masjid Baitul Mutakim Desa Masaran RT 01 RW 04 Kec. Bawang	50.000.000	BAKESBANG
120	Hibah kepada Muhammadiyah untuk Masjid Al Munawaroh Desa Masaran RT 01 RW 02 Kec. Bawang	30.000.000	BAKESBANG
121	Hibah kepada Muhammadiyah untuk Mushola Nurul Falah Desa Masaran RT 02 RW 04 Kec. Bawang	20.000.000	BAKESBANG
122	Hibah kepada Muhammadiyah untuk Mushola Al Kamal RT 03 RW 01 Desa Masaran Kec. Bawang	25.000.000	BAKESBANG
123	Hibah kepada Muhammadiyah untuk Mushola Baiturrohman Desa Masaran RT 04 RW 03 Kec. Bawang	20.000.000	BAKESBANG
124	Hibah kepada Muhammadiyah untuk Mushola Al Huda Desa Masaran RT 02 RW 03 Kec. Bawang	20.000.000	BAKESBANG
125	Hibah kepada Muhammadiyah untuk Mushola Al ikhlas Desa Masaran RT 03 RW 04 Kec. Bawang	20.000.000	BAKESBANG
126	Hibah kepada Si untuk Majelis Taklim Desa Masaran Kec. Bawang	80.000.000	BAKESBANG
127	Hibah Kepada Ormas NU untuk TPQ NURUL QOLBI Rt 02 Rw 09 Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara	10.000.000	BAKESBANG
128	Hibah Kepada Ormas NU untuk TPQ TARBIYATUL FATAH Rt 02 Rw 06 Karang Sambung Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara	10.000.000	BAKESBANG
129	Hibah Kepada Ormas NU untuk TPQ AL HIDAYAH Rt 05 Rw 05 Santrien Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara	10.000.000	BAKESBANG
130	Hibah Kepada Ormas NU untuk TPQ A NNUR ASSHOLIHIN Rt 03 Rw 01 Desa Karangjati Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara	10.000.000	BAKESBANG
131	HIBAH KEPADA PD MUHAMMADIYAH BANJARNEGARA UNTUK MAJELIS TAKLIM AL BAROKAH DUKUH SIWARU RT 05 RW 06 DESA GENTANSARI KEC.PAGEDONGAN	20.000.000	BAKESBANG
132	HIBAH PD MUHAMMADIYAH BANJARNEGARA KEPADA TPQ AL HIDAYAH RT 02 RW 07 DESA GUMIWANG KECAMATAN PURWANEGARA	25.000.000	BAKESBANG
133	HIBAH PD. MUHAMMADIYAH BANJARNEGARA KEPADA BADAN KEMATIAN DAN PENGELOLAAN MAKAM (BKPM) DESA KUTAWULUH KEC. PURWANEGARA	30.000.000	BAKESBANG

NO	URAIAN KEGIATAN	NOMINAL AKHIR	OPD
134	HIBAH PD MUHAMMADIYAH BANJARNEGARA KEPADA TPQ AL IKHLAS DUSUN KRUCIL DESA WINONG KECAMATAN BAWANG	25.000.000	BAKESBANG
135	HIBAH KEPADA PD. MUHAMMADIYAH BANJARNEGARA UNTUK MAJELIS TAKLIM AL BAROKAH DUSUN KUWENI DESA KUTAWULUH KEC. PURWANEGARA	25.000.000	BAKESBANG
136	HIBAH KEPADA PD. MUHAMMADIYAH BANJARNEGARA UNTUK MASJID AL MU'MININ DUKUH SRI WINGIN RT. 05 RW. 02 DESA KUTAYASA KEC. BAWANG	25.000.000	BAKESBANG
137	HIBAH KEPADA PD. MUHAMMADIYAH BANJARNEGARA UNTUK MASJID IBRAHIM AL JUNAIDY DS PULASARI DANARAJA KEC. PURWANEGARA	20.000.000	BAKESBANG
138	Bantuan Kepada Ormas NU untuk Pembangunan Pondok Pesantren ROUDHOTUL IKSAN Rt 01 Rw 03 Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara	25.000.000	BAKESBANG
139	Hibah kepada TPQ Bidayatul Bidayah Desa Wanadri Kec. Bawang (melalui NU)	30.000.000	BAKESBANG
140	Hibah kepada TPQ Al Hikmah RT 03 RW 06 Dusun Mangu Desa Kebutuhduwur Kec. Pagedongan untuk sarpras (melalui NU)	15.000.000	BAKESBANG
141	Hibah kepada Masjid Al Huda RT 02 RW 07 Pagedongan Tengah Desa Pagedongan Kec. Pagedongan (melalui NU)	25.000.000	BAKESBANG
142	Hibah kepada Mushola An Nafik RT 04 RW 06 Desa Twelagiri Kec. Pagedongan (melalui NU)	20.000.000	BAKESBANG
143	Hibah untuk sarpras Majelis Taklim Al Hidayah RT 03 RW 06 Desa Twelagiri Kec. Pagedongan (melalui NU)	45.000.000	BAKESBANG
144	Hibah untuk sarpras Majelis Taklim Fatimah Az Zahra RT 03 RW 04 Desa Kalipelus Kec. Purwanegara (melalui NU)	15.000.000	BAKESBANG
145	Hibah kepada Muhammadiyah Kabupaten Banjarnegara untuk Masjid Al Mukhsinah RT 02 RW 03 Desa Kalipelus Kec. Purwanegara	40.000.000	BAKESBANG
146	Hibah Kepada Masjid Al Umar RT 02 RW 01 Desa Gunungjati Kec. Pagedongan (melalui NU)	20.000.000	BAKESBANG
147	Hibah kepada Mushola Al Amin RT 02 RW 02 Desa Parakan Kec. Purwanegara (melalui NU)	20.000.000	BAKESBANG
148	Hibah kepada Mushola Al Faalah RT 06 RW 04 Desa Kalajir Kec. Purwanegara (melalui NU)	25.000.000	BAKESBANG
149	Hibah kepada TPQ AL ATQO Dusun Wiradrama Desa Majalengka Kec. Bawang (melalui NU)	20.000.000	BAKESBANG
150	Hibah kepada Masjid Al Istiqomah RT 04 RW 07 Desa Mantrianom Kec. Bawang (melalui NU)	25.000.000	BAKESBANG
151	Hibah kepada untuk Mushola Baiturrohim RT 01 RW 04 Desa Mantianom Kec. Bawang (melalui NU)	15.000.000	BAKESBANG
152	Hibah kepada Mushola Baitul Iman RT 02 RW 04 Desa Mantianom Kec. Bawang (melalui NU)	15.000.000	BAKESBANG
153	Hibah kepada Muhammadiyah Kab. Banjarnegara untuk Majelis Taklim Sedyarukun RT 04 RW 06 Desa Blambangan Kec. Bawang	20.000.000	BAKESBANG
154	Hibah kepada Majelis Taklim dan Mujahadah Al Huda Dusun Kaliputih Desa Wiramastra Kec. Bawang (melalui NU)	15.000.000	BAKESBANG
155	Hibah untuk sarpras Majelis Taklim Nurul Barokah RT 05 RW 03 Desa Winong Kec. Bawang (melalui NU)	15.000.000	BAKESBANG
156	Hibah kepada Grup rebana Az Zahra Desa Joho Kec. Bawang melalui (Muhammadiyah)	15.000.000	BAKESBANG
157	Hibah kepada untuk Masjid Baltussalam Desa Waturip Kec. Bawang (melalui NU)	15.000.000	BAKESBANG
158	Hibah kepada Masjid Masjid Al Barokah RT 01 RW 09 Tambor Desa Gumiwang Kec. Purwanegara (melalui NU)	25.000.000	BAKESBANG
159	Hibah kepada Mushola Al Amin RT 04 RW 05 Desa Pesangkalan Kec. Pagedongan (melalui NU)	20.000.000	BAKESBANG
160	Hibah sarpras kepada MWC NU Kec. Pagedongan	20.000.000	BAKESBANG

Pengawasan Pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran 2024 Kabupaten Banjarnegara

NO	URAIAN KEGIATAN	NOMINAL AKHIR	OPD
161	Hibah Kepada NU untuk Majelis Taklim Salibalarosyad NU Desa Penusupan RT 03 RW 05 Kec. Pejawaran	70.000.000	BAKESBANG
162	Hibah kepada NU untuk TPQ An-Nur RT 04 RW 01 Desa Linggasari Kec. Wanadadi	25.000.000	BAKESBANG
163	Hibah kepada ranting NU Desa Gumsir Kec. Wanadadi	25.000.000	BAKESBANG
164	Hibah kepada NU untuk TPQ Salafiyah RT 03 RW 05 Penusupan Desa Kalipelus Kec. Purwonegara	50.000.000	BAKESBANG
165	Hibah kepada NU untuk Mushola Al Hikmah RT 02 RW 01 Kebondalem Kec. Bawang	25.000.000	BAKESBANG
166	Hibah kepada NU untuk Mushola Al-Huda RT 002 RW 004 Desa Blimbings, Kec. Mandiraja.	10.000.000	BAKESBANG
167	Hibah kepada NU untuk TPQ Darussalam Sidamulya RT 005 RW 005 Desa Kalilandak Kec. Purwareja Klampok.	30.000.000	BAKESBANG
168	BANTUAN HIBAH KEPADA PIMPINAN RANTING NU DESA KAREKAN, PAGENTAN	15.000.000	BAKESBANG
169	BANTUAN HIBAH KEPADA PC NU BANJARNEGARA	20.000.000	BAKESBANG
170	PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	50.000.000	BAKESBANG
171	Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	100.000.000	BAKESBANG
172	Hibah kepada Ormas NU Mushola Al Hikmah Desa Kertayasa Rt. 02 Rw. 01 Bantar Wetan Kecamatan Mandiraja	25.000.000	BAKESBANG
173	Hibah kepada ormas NU Mushola Al Falah Desa Tanjungtirta Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Punggelan	15.000.000	BAKESBANG
174	Hibah kepada ormas NU TPQ Darul Islah Desa Petungan Rt. 01 Rw. 04 Kecamatan Punggelan	15.000.000	BAKESBANG
175	Hibah kepada Ormas NU Mushola Nuruul Dholami Desa Klapa Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Punggelan	20.000.000	BAKESBANG
176	Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi	100.000.000	BAKESBANG
177	Hibah kepada PDM Banjarnegara Ranting Desa Lengkong Kecamatan Rakit	50.000.000	BAKESBANG
178	Hibah kepada Pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah Desa Lengkong Kecamatan Rakit	50.000.000	BAKESBANG
179	Hibah kepada Ormas NU TPQ Al Maunah Desa Karangsari Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Punggelan	15.000.000	BAKESBANG
180	Hibah kepada Ormas NU Mushola Al Huda Rt. 03 Rw. 02 Desa Klapa Kecamatan Punggelan	15.000.000	BAKESBANG
181	Hibah kepada PCM Mandiraja untuk Ranting Somawangi	100.000.000	BAKESBANG
182	Hibah kepada PCM Merden	30.000.000	BAKESBANG
183	Hibah kepada PCM Purwareja Klampok	55.000.000	BAKESBANG
184	BANTUAN HIBAH KEPADA PAC MUSLIMAT NU MANDIRAJA	35.000.000	BAKESBANG
185	BANTUAN HIBAH KEPADA PAC MUSLIMAT NU PURWAREJA KLAMPOK	15.000.000	BAKESBANG
186	BANTUAN HIBAH KEPADA PAC ANSOR PURWAREJA KLAMPOK	10.000.000	BAKESBANG
187	BANTUAN HIBAH KEMADA MI AL HIDAYAH PURWAREJA, PURWAREJA KLAMPOK	60.000.000	BAKESBANG
188	BANTUAN HIBAH KEPADA LPQ ANNUR AL FATAH DESA KALILANDAK PURWAREJA KLAMPOK	20.000.000	BAKESBANG
189	BANTUAN HIBAH KEPADA PAC MUSLIMAT NU SUSUKAN	20.000.000	BAKESBANG
190	BANTUAN HIBAH KEPADA PONPES ASMAUL HUSNA DESA BRENGKOK KEC. SUSUKAN	60.000.000	BAKESBANG
191	BANTUAN HIBAH KEPADA PC MUSLIMAT NU BANJARNEGARA DI DESA PANGGISARI MANDIRAJA	60.000.000	BAKESBANG
192	PEMBANGUNAN GEDUNG MUSLIMAT NU RANTING SIRKANDI PURWAREJA KLAMPOK	25.000.000	BAKESBANG
193	BANTUAN HIBAH KEPADA RANTING MUSLIMAT NU DESA PAGAK KEC. PURWAREJA KLAMPOK	15.000.000	BAKESBANG

NO	URAIAN KEGIATAN	NOMINAL AKHIR	OPD
194	BANTUAN HIBAH UNTUK MI AL ISLAM KARANGJATI SUSUKAN TAHAP II	50.000.000	BAKESBANG
195	BANTUAN HIBAH UNTUK MI AL HUDA DERMASARI SUSUKAN	50.000.000	BAKESBANG
196	BANTUAN HIBAH KEPADA PAC FAYAT NU SUSUKAN	10.000.000	BAKESBANG
197	Hibah kepada DPC Si Banjarnegara	300.000.000	BAKESBANG
198	hibah kepada Si untuk Mts Cokroaminoto Wanadadi	70.000.000	BAKESBANG
199	hibah kepada Si untuk Majelis Taklim Kasno Desa Jembangan punggelan	25.000.000	BAKESBANG
200	Hibah kepada Si untuk Rehab Masjid Darusalam kadus 2 Desa Karangkemiri	40.000.000	BAKESBANG
201	Hibah kepada Si untuk pemuda Muslim mina Kencana RT 01 RW 01 Desa Karangkemiri Kec. Wanadadi	10.000.000	BAKESBANG
202	Hibah kepada Si untuk Pagarsi MI Cokroaminoto Medayu Kec. Wanadadi	25.000.000	BAKESBANG
203	hibah kepada Si untuk pemuda Muslim Sekar Lemahjaya Kec. Wanadadi	20.000.000	BAKESBANG
204	Hibah kepada Si untuk Rehab Aula Darul Falah Dusun Karangjambu Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi	25.000.000	BAKESBANG
205	Hibah kepada Si untuk seragam MT AZ Zaetun Desa Karangkemiri Kec. Wandadi	30.000.000	BAKESBANG
206	Hibah kepada Si untuk copmi Banjarnegara	40.000.000	BAKESBANG
207	Hibah kepada Si untuk WSI ancab Wanadadi	40.000.000	BAKESBANG
208	Hibah kepada Ormas Muhammadiyah untuk Mushola Al Azhar Desa Batur Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara	20.000.000	BAKESBANG
209	Hibah Kepada Ormas Muhammadiyah untuk TPQ Al - Falah Dukuh Jlegong Desa Batur Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara	20.000.000	BAKESBANG
210	Hibah Kepada Ormas NU untuk Kelompok Yasin AL GHUFRON Dukuh Gendoran Desa Pekasiran Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara	50.000.000	BAKESBANG
211	Hibah Kepada Ormas NU Untuk Pemuda Anshor Dukuh Purwajaya Desa Batur Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara	50.000.000	BAKESBANG
212	Hibah Kepada Ormas Muhammadiyah untuk Mushola Sab'ul Uyun RT 002 RW 001 Desa Batur Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara	25.000.000	BAKESBANG
213	PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	30.000.000	BAKESBANG
214	Bantuan Hibah Kepada Ormas NU untuk rehabilitasi mushola Al HIDAYAH Dusun Jeruk Legi Desa Kertosari Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara	7.500.000	BAKESBANG
215	Bantuan Hibah kepada Ormas NU untuk rehabilitasi Mushola Al IKHLAS Dusun Gunung Tawang Desa Kertosari Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara	10.000.000	BAKESBANG
216	Bantuan Hibah Kepada Ormas Muhammadiyah untuk Nasiyatul asyiyah Dusun Piasa Lor Desa Sidakangen Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara	10.000.000	BAKESBANG
217	Bantuan Hibah kepada ormas NU untuk TPQ Hidayatul Fatah RT 01 RW 02 Dusun Semingkir Desa Kalibombong Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara	10.000.000	BAKESBANG
218	Bantuan Hibah kepada Ormas NU untuk MUSLIMSAT NU (Majlis Ta'lim Zahrotul Janah) Dusun Panumping Desa Kalibombong Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara	10.000.000	BAKESBANG

Pengawasan Pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran 2024 Kabupaten Banjarnegara

NO	URAIAN KEGIATAN	NOMINAL AKHIR	OPD
219	Bantuan Hibah Kepada Ormas NU untuk MUSLIMAT NU Dusun Glusur Desa Gunung Langit Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara	10.000.000	BAKESBANG
220	Bantuan Hibah Kepada Ormas NU untuk FATAYAT NU Dusun Sidakangen Desa Sidakangen Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara	7.500.000	BAKESBANG
221	Bantuan Hibah Kepada Ormas NU untuk MUSLIMAT NU Dusun Bangun Harjo Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara	10.000.000	BAKESBANG
222	Bantuan Hibah Kepada Ormas NU untuk TPQ AL BAITUROHMAN Pulasari Dusun Cipluk Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara	10.000.000	BAKESBANG
223	Bantuan Hibah Kepada Ormas Muhammadiyah untuk Nasiatul asiyah dusun pranggen Desa Kertosari Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara	7.500.000	BAKESBANG
224	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk Pembangunan Masjid AL-Ikhlas Dusun Gumelar Rt 01 Rw 01 desa Gumelar	30.000.000	BAKESBANG
225	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk Masjid An-Nur dusun Suwuk Rt 04 Rw 06 Desa Kalibombong	40.000.000	BAKESBANG
226	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk Masjid At Taqwa dusun Pagiranja Rt 01 Rw 03 desa Lawen	25.000.000	BAKESBANG
227	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk Masjid An-Nur dusun Kendilwesi Rt 01 Rw 05 Desa Lawen	25.000.000	BAKESBANG
228	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk Masjid Darusalam dusun Krandegan desa Pagerpelah	25.000.000	BAKESBANG
229	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk Masjid Al-Ikhlas dusun Jengkol Desa Karangkobar	25.000.000	BAKESBANG
230	Bantuan Hibah Keuangan Kepada PC NU untuk Masjid Al-Barokah Rt 04 Rw 05 dusun Kantil Margasari Desa Kalibombong	25.000.000	BAKESBANG
231	Hibah Keuangan Kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjarnegara	95.000.000	BAKESBANG
232	Bantuan hibah kepada Muhammadiyah untuk rehab mushola Baiturrohman Dukuh Sital RT 04 RW 03 Desa Masaran Kec. Bawang	10.000.000	BAKESBANG
233	Hibah kepada Syarikat Islam untuk Kegiatan Remaja Mushola Al Ikhlas RT 3/8 Desa Mantrianom Kecamatan Bawang	10.000.000	BAKESBANG
234	Hibah kepada Syarikat Islam untuk perbaikan Mushola Al-Huda dan Balai pertemuan RT 04/03 Sidamukti Desa Mantrianom Kec. Bawang	30.000.000	BAKESBANG
235	Hibah kepada Muhammadiyah untuk pembelian rebana majelis ta'lim & shalawat Anwarul Musthofa Desa Masaran kec. Bawang	15.000.000	BAKESBANG
236	Bantuan hibah kepada Muhammadiyah untuk TPQ Aisyiyah RT 03 RW 02 Desa Kebutuh Duwur Kecamatan Pagedongan	10.000.000	BAKESBANG
237	Hibah kepada Ormas NU Mushola Takmirul Huda Rt. 03 Rw. 02 Desa Wanakarsa Kecamatan Wanadadi	15.000.000	BAKESBANG
238	Hibah Muslimat Nahdatul Ulama Dukuh Glempang Rw.04 Desa Pingit Kecamatan Rakit	20.000.000	BAKESBANG
239	Hibah kepada Ormas NU Mushola Miftakhul Jannah Rt. 05 Rw. 01 Desa Wanakarsa Kecamatan Wanadadi	20.000.000	BAKESBANG
240	Hibah kepada Muslimat(NU) Nahdatul Ulama Dukuh Balairaksa, Desa Gelang Kecamatan Rakit	20.000.000	BAKESBANG
241	Hibah kepada Ormas NU TPQ Nurul Hidayah Rt. 07 Rw.02 Desa Petuguran Kecamatan Punggelan	75.000.000	BAKESBANG
242	Hibah Kepada Ormas NU Masjid Baitunnur Desa Petuguran Rt. 07.Rw.02 Kecamatan Punggelan.	75.000.000	BAKESBANG
243	Hibah Kepada PCNU Kabupaten Banjarnegara untuk Rehab Gedung TPQ Al-Ikhlas RT 08 RW 01 Desa Leksana Kec Karangkobar	25.000.000	BAKESBANG

NO	URAIAN KEGIATAN	NOMINAL AKHIR	OPD
244	Hibah Kepada PCNU Kabupaten Banjarnegara untuk Pengadaan Panggung Ranting NU Desa Ambal Kec Karangkobar	40.000.000	BAKESBANG
245	Hibah PCNU Banjarnegara untuk rehab TPQ Nurul Ikhlas RT 03 RW 03, desa kubang kec wanayasa	25.000.000	BAKESBANG
246	Hibah Kepada MWC NU Kecamatan Karangkobar untuk Pembangunan Gedung MWC NU Kecamatan Karangkobar	100.000.000	BAKESBANG
247	Bantuan hibah Syarikat Islam untuk TPQ Dukuh Silimpet Desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara	50.000.000	BAKESBANG
248	Bantuan hibah Syarikat Islam untuk TPQ Miftahurrohmah RT 02 RW 01 Dukuh Sampel Desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara	20.000.000	BAKESBANG
249	Hibah kepada Syarikat Islam untuk TPQ Nurul Huda RT 03 RW 01 Kalidondong Desa Pekandangan Kecamatan Banjarmangu	50.000.000	BAKESBANG
250	Pembangunan gedung baru kepada Pondok Pesantren Nurussathi Darul Falah, Desa Gunungjati RT 003 RW 002, Kec. Pagedongan, Kab. Banjarnegara.	200.000.000	BAKESBANG
251	Hibah kepada Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banjarnegara	400.000.000	BAKESBANG
252	Bantuan Hibah Untuk Pembangunan Gedung Aswaja Center MWC NU Wanadadi	200.000.000	BAKESBANG
253	Bantuan Hibah Kepada Ranting NU Desa Lemah Jaya Kec. Wanadadi	20.000.000	BAKESBANG
254	Hibah kepada Ormas NU Majelis Taklim Ar Rosyad Rt. 02 Rw. 06 Desa Penusupan Kecamatan Pejawaran	25.000.000	BAKESBANG
255	Hibah kepada Ormas NU Majelis Taklim Al Hikmah Dusun Cempaka Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran	25.000.000	BAKESBANG
256	Hibah kepada Ormas NU Majelis Taklim Al Iman Desa Biting Kecamatan Pejawaran	15.000.000	BAKESBANG
257	Hibah kepada Ormas NU Majelis Taklim Al Barokah Dusun Melikan Desa Giritirta Kecamatan Pejawaran	15.000.000	BAKESBANG
258	Hibah kepada Ormas NU Majelis Taklim Al Istiqomah Rt. 03 Rw.01 Desa Kalilunjar Kecamatan Pejawaran	20.000.000	BAKESBANG
259	Hibah kepada Ormas NU Mushola Al Kautsar Desa Penusupan Kecamatan Pejawaran	50.000.000	BAKESBANG
260	Hibah kepada Ormas NU Fatayat Rt. 02 Rw. 06 Desa Penusupan Kecamatan Pejawaran	15.000.000	BAKESBANG
261	Hibah kepada Ormas NU Majelis Taklim Al Hidayah Dusun Penusupan Desa Babadan Kecamatan Pagetan	15.000.000	BAKESBANG
262	Hibah kepada Ormas NU Mushola Al Mujahidin Dusun Penusupan Rt. 02 Rw. 01 Desa Babadan Kecamatan Pagetan	50.000.000	BAKESBANG
263	Hibah kepada Ormas Muhammadiyah untuk Mi Muhammadiyah Penusupan Kecamatan Pejawaran	25.000.000	BAKESBANG
264	Hibah kepada Ormas NU Majelis Taklim Al Hidayah Desa Tlahap Kecamatan Pejawaran	15.000.000	BAKESBANG
265	Hibah kepada Ormas NU Majelis Taklim Al Musyawarah Desa Karekan Kecamatan Pagetan	15.000.000	BAKESBANG
266	Hibah kepada Ormas NU PAC Fatayat Ranting Penusupan Kecamatan Pejawaran	15.000.000	BAKESBANG
267	Hibah kepada MWC NU Kecamatan Pejawaran	20.000.000	BAKESBANG
268	Hibah kepada PCNU Kabupaten Banjarnegara	20.000.000	BAKESBANG
269	Hibah kepada Ormas NU Majelis Taklim Al Fitroh Dusun Penusupan Desa Babadan Kecamatan Pagetan	20.000.000	BAKESBANG
270	Hibah kepada Ormas NU Majelis Taklim Mahabatunnabi Dusun Gemblep Rt.01 Rw. 02 Desa Penusupan Kecamatan Pejawaran	15.000.000	BAKESBANG
271	Hibah kepada Ormas NU TPQ Al Kautsar Rt. 04 Rw. 05 Desa Penusupan Kecamatan Pejawaran	50.000.000	BAKESBANG
272	Hibah kepada Ormas Muhammadiyah Pelatihan UMKM Nasiatul Aisyiyah dan Aisyiyah Cabang Karangkobar	20.000.000	BAKESBANG
273	Hibah kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjarnegara	500.000.000	BAKESBANG
274	Hibah Kepada PD Muhammadiyah Banjarnegara untuk Rehab Atap Panti Asuhan Putri Blambangan Desa Blambangan Kec Bawang	150.000.000	BAKESBANG

Pengawasan Pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran 2024 Kabupaten Banjarnegara

NO	URAIAN KEGIATAN	NOMINAL AKHIR	OPD
275	Hibah Kepada PD Muhammadiyah Banjarnegara untuk Rehab Masjid AL Bayyinah RT 04 RW 02 Desa Pucang Kec Bawang	50.000.000	BAKESBANG
276	Hibah Kepada PD Muhammadiyah Banjarnegara untuk Pengadaan Seragam dan Sound System Potabel Majelis Taklim Nurul Jannah RT 04 RW 03 Desa Gumiwang Kec Purwonegoro	15.000.000	BAKESBANG
277	Hibah Kepada PD Muhammadiyah Banjarnegara untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Tratag and Sound System Portabel Kelompok Sosial Kematian Desa Blambangan Kec Bawang	30.000.000	BAKESBANG
278	Pendidikan Politik Kader dan Masyarakat di Kabupaten Banjarnegara	100.000.000	BAKESBANG
279	Hibah ke PCNU Kabupaten Banjarnegara untuk Pembangunan Masjid Baiturrohman Dusun Srengseng Rt. 04 Rw. 04 Desa Kalilandak Kecamatan Purwareja Klampok	200.000.000	BAKESBANG
280	Bantuan Hibah Kepada Ranting NU 1 Desa Gumelem Wetan	20.000.000	BAKESBANG
281	Bantuan Hibah Kepada Ranting NU Untuk Tpq Nurul Iman Rt 03/08 Desa Kaliwungu Kec. Mandiraja	10.000.000	BAKESBANG
282	Hibah kepada ormas SI berupa Pembangunan Masjid Al-Amin RT 001 RW 004 Dukuh Beji Desa Gununggiana, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara	90.000.000	BAKESBANG
283	Hibah kepada Muhammadiyah untuk pembangunan Masjid Ranting Muhammadiyah Kecepit Barat Desa Kecepit Kec. Punggelan	25.000.000	BAKESBANG
284	Hibah kepada Muhammadiyah untuk pembangunan TPQ Al Hikmah RT 01 RW 01 Desa Kecepit Kecamatan Punggelan	25.000.000	BAKESBANG
285	Hibah kepada Muhammadiyah untuk pembangunan Mushola Baitussalam Desa Karangsari Kecamatan Punggelan	15.000.000	BAKESBANG
286	Hibah kepada Muhammadiyah untuk rehab Bustanul Athfah (BA) Aisyiyah Desa Banjengan Kecamatan Mandiraja	150.000.000	BAKESBANG
287	Hibah kepada Muhammadiyah utk rehab Mushala Assalam	50.000.000	BAKESBANG
288	Hibah kepada Muhammadiyah utk rehab Mushala Al Kautsar Dukuh Cikalan Desa Punggelan	40.000.000	BAKESBANG
289	Hibah kepada Muhammadiyah utk rehab Masjid At-Taubah Dukuh Petir Desa Punggelan	30.000.000	BAKESBANG
290	Hibah kepada Muhammadiyah utk pembangunan Masjid At Taqwa Wujil Desa Bondolharjo	60.000.000	BAKESBANG
291	Hibah kepada Muhammadiyah utk pembangunan Mushala Al Barokah Dusun Mertaina Desa Tribuana	30.000.000	BAKESBANG
292	Hibah kepada Muhammadiyah utk Majelis Taqlim Al Istiqomah Dusun Sicina Desa Punggelan	30.000.000	BAKESBANG
293	Bantuan Hibah Kepada pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Wanayasa (MD)	30.000.000	BAKESBANG
294	Hibah kepada Muhammadiyah untuk Mjelis Taklim Ahad Wage Kadus IV (empat) Desa Kalilunjar Kec. Banjarmangu	50.000.000	BAKESBANG
295	Bantuan Muhammadiyah utk pembangunan gedung usaha	100.000.000	BAKESBANG
296	Hibah kepada Ormas Syarikat Islam (SI) Kab. Banjarnegara untuk KelompokUsaha Bersama "AL KAFFI" Desa Kutawuluh RT. 02 RW. 03 Kec. Purwanegara	50.000.000	BAKESBANG
297	Hibah kepada Ormas NU Masjid Asmaul Husna Desa Sidarata Rt. 02 Rw. 06 Kecamatan Punggelan	35.000.000	BAKESBANG
298	Hibah kepada SI untuk Masjid Al Hidayah RT 2 RW 1 Dukuh Nangka Sepet Desa Masaran Kec. Bawang	25.000.000	BAKESBANG
299	Hibah kepada PD Muhammadiyah Banjarnegara untuk sarana prasarana	25.000.000	BAKESBANG
300	Hibah kepada Muhammadiyah untuk Majelis Taklim Nurul Muttaqin Desa Blambangan Kec. Bawang	20.000.000	BAKESBANG
301	Hibah kepada Muhammadiyah untuk Masjid Al Falah Prapas RT 03 RW 08 Desa Gumiwang Kec. Purwanegara	30.000.000	BAKESBANG
302	Hibah kepada SI untuk DA Cokroaminoto 1 Desa Majalengka RT 03 RW 01 Kec. Bawang Banjarnegara	35.000.000	BAKESBANG

NO	URAIAN KEGIATAN	NOMINAL AKHIR	OPD
303	Hibah kepada MWC NU Kec. Bawang untuk sarpras	25.000.000	BAKESBANG
304	Hibah kepada PD Muhammadiyah Banjarnegara untuk TPQ Al Anshor Tretek RT 01 RW 10 Kelurahan Parakancanggah Kec. Banjarnegara	50.000.000	BAKESBANG
305	Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	30.000.000	BAKESBANG
306	Hibah kepada SI untuk Mushola Al Ikhlas Dukuh Kresek RT 02 RW 04 Desa Majalengka Kec. Bawang	25.000.000	BAKESBANG
307	Hibah kepada Muhammadiyah untuk Mushola Nurul Huda RT 02 RW 03 Dukuh Kalong Desa Binarong Kec. Bawang	25.000.000	BAKESBANG
308	Hibah kepada Muhammadiyah untuk Mushola Jamiyatul Mudzakirin Dukuh Karangcengis RT 05 RW 01 Desa Mertasari Kec. Purwanegara	20.000.000	BAKESBANG
309	Hibah kepada PD Muhammadiyah	100.000.000	BAKESBANG
310	Kajian Penyelenggaraan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara	100.000.000	BAPERLITBANG
311	BELANJA JASA KONSULTASI SPESIALISASI JASA PEMBUATAN PETA	40.000.000	BPBD
312	PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA (BELANJA DETEKSI LONGSOR PORTABLE)	50.000.000	BPBD
313	BANTUAN HIBAH FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA KEC PAGENTAN	20.000.000	BPBD
314	Penyusunan peta desa rawan bencana	100.000.000	BPBD
315	Bankeudes Desa Leksana untuk pembangunan Drainase Lingkungan RT 01 RW 05 Desa Leksana Kecamatan Karangkobar	100.000.000	BPKAD
316	Bantuan hibah untuk pembangunan menara Masjid Baiturrohman Desa wanayasa kec wanayasa (MD)	100.000.000	BPKAD
317	Pengaspalan jalan Dusun Bantarwatu Rt. 02 Rw. 01 Desa Sidarata Kecamatan Punggelan	140.000.000	BPKAD
318	Bankeudes untuk PEMBANGUNAN TALUD DAN DRAINASE JALAN LINGKAR DUSUN SUSUKAN RT 01 RW 01 DESA SUSUKAN WANAYASA	100.000.000	BPPKAD
319	Bankeudes untuk COR BETON BLOK TANDON DESA WANAYASA KEC. WANAYASA	150.000.000	BPPKAD
320	Bankeudes untuk SAB DUKUH TEGATEN DESA WANAYASA KEC. WANAYASA	150.000.000	BPPKAD
321	Bankeudes Dauhuan untuk pengaspalan jalan RW 01 Desa Dauhuan Kec. Madukara	200.000.000	BPPKAD
322	Bankeudes Kesenet untuk pembangunan talud RT 04 RW 01 Desa Kesenet Kec. Banjarmangu	50.000.000	BPPKAD
323	Bankeudes Sigeblog untuk pengaspalan Dukuh Pingit -Semampir RW 01 Desa Sigeblog Kec. Banjarmangu	200.000.000	BPPKAD
324	Bankeudes untuk pembangunan talud dan cor beton jalan desa prendengan 01 RW 01 Desa Prendengan Kec. Banjarmangu	100.000.000	BPPKAD
325	Bankeudes untuk Pengaspalan Dusun Jenggawur RW 01 Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu	100.000.000	BPPKAD
326	Pembangunan jalan lingkungan RT 02 rw 01 dukuh miri desa Pekandangan kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara	70.000.000	BPPKAD
327	Bankeudes Desa Karangsari Untuk Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Klontong Desa Karangsari Kec Punggelan	150.000.000	BPPKAD
328	Bankeudes untuk PEMBUATAN TALUD DAN DRAINASE RT. 03 RW. 01 DESA ARIBAYA KEC. PAGENTAN	100.000.000	BPPKAD
329	Bankeudes untuk PENGASPALAN JALAN RUAS JALAN JALAN KLESEM- KARANGANYAR DESA KALITLAGA KEC. PAGENTAN	150.000.000	BPPKAD
330	Bankeudes untuk pembangunan talud pengaman tebing RT 02 RW 03 Desa Pakikiran Kecamatan Susukan	50.000.000	BPPKAD
331	Bankeudes untuk peningkatan jalan RT 01 RW 04 Desa Karangjati Kecamatan Susukan	50.000.000	BPPKAD
332	Bankeudes kepada Desa Mantrianom Kec. Bawang untuk rabat beton JUT RT 05 RW 01	100.000.000	BPPKAD

Pengawasan Pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran 2024 Kabupaten Banjarnegara

NO	URAIAN KEGIATAN	NOMINAL AKHIR	OPD
333	Bankeudes kepada Desa Pagedongan Kec. Pagedongan untuk peningkatan jalan aspal RT 05 RW 01 Pamurian Kadus 1	100.000.000	BPPKAD
334	Bankeudes Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan Rt 03 Kadus 05 Mertelu Desa Berta Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara	50.000.000	BPPKAD
335	Bankeudes Pengaspalan Jalan Blanten Rt 03 Kadus 03 Desa Derik Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara	100.000.000	BPPKAD
336	Bankeudes Pengaspalan Jalan Kali Sarang Rt 01, 02 RW 08 Kadus II Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara	100.000.000	BPPKAD
337	Bankeudes Pengaspalan Jalan Lingkungan Kadus Sidomakmur Rt 04 Desa Karangjati Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara	150.000.000	BPPKAD
338	Bankeudes Rabat Beton Rt 1, 2, 3 Kadus 2 Desa Berta Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara	50.000.000	BPPKAD
339	BANKEUDES UNTUK PENINGKATAN JALAN DUSUN TLAGA DESA GUMIWANG KEC. PURWANEGARA	75.000.000	BPPKAD
340	Bankeudes Pengaspalan Jalan Pemukiman Rt 09 Dusun 03 Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara	125.000.000	BPPKAD
341	Bankeudes Peningkatan Jalan Dusun Menggora Rt 01 Sampai Dengan Rt 05 Desa Tanjungtirta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara	190.000.000	BPPKAD
342	Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Dukuh Banjaran Dusun Bengkat, Desa Tanjungtirta Kecamatan Punggelan Kab. Banjarnegara	50.000.000	BPPKAD
343	Bankeudes kepada Desa Gentansari Kec. Pagedongan untuk pengaspalan jalan Dukuh Siteki RT 01 RW 01	100.000.000	BPPKAD
344	Bankeudes kepada Desa Majalenga Kec. Bawang untuk bronjong Dusun Wiradrama	125.000.000	BPPKAD
345	Bankeudes kepada Desa Mantriom Kec. Bawang untuk drainase RT 03 - 04 RW 08	100.000.000	BPPKAD
346	Bankeudes kepada Desa Winong Kec. Bawang untuk untuk pengaspalan jalan RW 2	75.000.000	BPPKAD
347	Bankeudes untuk pembangunan jalan rabat RT 001 RW 007 Desa Somawangi, Kec. Mandiraja.	75.000.000	BPPKAD
348	Bankeudes untuk pembangunan jalan rabat RT 005 RW 004 Desa Somawangi Kec. Mandiraja.	50.000.000	BPPKAD
349	Bankeudes untuk pembangunan rabat beton RT 006 RW 003 Desa Berta, Kec. Susukan.	50.000.000	BPPKAD
350	Bankeudes kepada Desa Dermasari Kecamatan Susukan untuk pengaspalan jalan Kadus 2	200.000.000	BPPKAD
351	Bankeudes kepada Desa Somawangi Kecamatan Mandiraja untuk kegiatan pengaspalan jalan RT 4 RW 2 Kadus 1 dan RT 4 RW 3 Kadus 2	200.000.000	BPPKAD
352	Bantuan keuangan desa pengaspalan jalan Rt. 05 Rw. 03, Rt. 04 Rw. 01 dan Rt. 07 Rw. 01 Desa Sambong Kecamatan Punggelan	165.000.000	BPPKAD
353	Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengaspalan Jalan Desa Rakit Rt. 05 Rw. 04 Kecamatan Rakit	150.000.000	BPPKAD
354	Bantuan Keuangan Khusus Desa Pembangunan betonisasi jalan dusun Guruh Rt. 03 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Punggelan	100.000.000	BPPKAD
355	Bantuan Keuangan Khusus Desa Pembangunan talud pengaman jalan Desa Tanjungtirta Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Punggelan	100.000.000	BPPKAD
356	Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengaspalan jalan Rt. 01 Rw. 05 Desa Sidarata Kecamatan Punggelan	150.000.000	BPPKAD
357	Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengaspalan jalan dan drainase Rt. 02 Rw. 05 Desa Sidarata Kecamatan Punggelan	175.000.000	BPPKAD

NO	URAIAN KEGIATAN	NOMINAL AKHIR	OPD
358	Bantuan Keuangan Khusus Desa Pembangunan Talud Pengaman Jalan Rt. 03 dan Rt. 04 Rw. 06 Desa Sidarata Kecamatan Punggelan	115.000.000	BPPKAD
359	Bantuan Keuangan Khusus Desa Pengaspalan Jalan Desa Bandingan Rt 03 Rw 05 Kecamatan Rakit	95.000.000	BPPKAD
360	Pembangunan Talud Drainase RW 01, Dusun Jenggawu Desa Jenggawu Kec. Banjarmangu	200.000.000	BPPKAD
361	Pembangunan Atau Rehab Jalan Aspal, Dusun Mertelu RT 03 RW 03 Desa Sijenggung Kec. Banjarmangu	150.000.000	BPPKAD
362	Pembangunan atau Rehab Aspal Jalan, Dusun Sijenggung RT 01 RW 03 Desa Sijenggung Kec. Banjarmangu	150.000.000	BPPKAD
363	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 04 RW 06 Dusun Sudimare Desa Lebakwangi Kec. Pagedongan	100.000.000	BPPKAD
364	Pengaspalan Jalan Dusun Wiragunan Desa Gemuruh Desa Gemuruh Kec. Bawang	150.000.000	BPPKAD
365	Pembangunan Rabat Beton : RT 04 RW 05, Dusun Krinjing Desa Petir Kec. Purwanegara	75.000.000	BPPKAD
366	Pembangunan Rabat Beton : RT 02 RW 05 Dusun Krinjing Desa Petir Kec. Purwanegara	75.000.000	BPPKAD
367	Pengaspalan Jalan Kadus 2 Karangjati Kec. Susukan Kab. Banjarnegara	100.000.000	BPPKAD
368	Pengaspalan Jalan Kadus 3 RW 7 Gumelem Wetan Susukan	192.000.000	BPPKAD
369	Bankeudes Pengaspalan jalan kadus SIDOMAKMUR Desa Karangjati kec. Susukan	125.000.000	BPPKAD
370	Bankeudes peningkatan jalan Rt03 Rw02 desa. Pakikiran kec. Susukan	70.000.000	BPPKAD
371	Bankeudes Pembangunan Talud Rt 02 Rw 04 Desa Batur Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara	50.000.000	BPPKAD
372	Bankeudes pengaspalan jln lingkungan rt 02/02 desa clapar kec.Madukara	100.000.000	BPPKAD
373	Bankeudes Rabat Beton Dusun Kromyong Desa Kasinoman Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara	50.000.000	BPPKAD
374	Bankeudes Untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Ketanan Desa Kalibombong Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara	100.000.000	BPPKAD
375	Bankeudes Untuk Kegiatan Pengaspalan Jalan Dusun Jambu Desa Sidakangen Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara	100.000.000	BPPKAD
376	Bankeudes Desa Karangkobar untuk pembangunan Bronjong RT 02 RW 06 Desa Karangkobar Kec. Karangkobar	50.000.000	BPPKAD
377	Bankeudes Desa Leksana untuk Pembangunan infrastruktur desa Leksana Kec. Karangkobar	90.000.000	BPPKAD
378	Bankeudes Desa Purwodadi untuk Pembangunan Talun Pengaman Jalan Dukuh Wringin Desa Purwodadi Kec. Karangkobar	75.000.000	BPPKAD
379	Bankeudes PEMBANGUNAN TALUD PENGAMAN JALAN DUKUH BUNGKARAN RT 01 RW 02 DESA KESENAT KEC. BANJARMANGU	50.000.000	BPPKAD
380	Pembangunan drainase Dusun Bandungan Rw. 07 Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran	125.000.000	BPPKAD
381	Bankeudes desa Pucang Untuk pengaspalan Jalan RT 01 dan 02 RW 01 Desa Pucang Kec Bawang	75.000.000	BPPKAD
382	Bankeudes untuk Pembangunan Rabat Beton Dusun Timbang Desa Kasinoman Kecamatan Kalibening Kab. Banjarnegara	100.000.000	BPPKAD
383	Bantuan Keuangan Khusus Desa Pembangunan Rabat Beton RT.01 - RT. 08 RW. 08 Desa Somawangi Kecamatan Mandiraja	100.000.000	BPPKAD
384	Pembangunan Talud dan Rabat Beton RT.004 RW 002 Desa Clapar, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara	100.000.000	BPPKAD
385	Pengaspalan Jalan Dukuh Guming RT 002 RW 004 Desa Gunungjiana, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara	150.000.000	BPPKAD
386	Pengaspalan Jalan Kemesu RT 004 RW 002 Dukuh Sigideng Desa Kalirup, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara	100.000.000	BPPKAD
387	Pengaspalan Jalan RT 003 RW 002 Desa Clapar, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara	100.000.000	BPPKAD
388	Bankeudes Pavingisasi Jalan Rt 01 Rw 02 Desa Dawuhan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara	75.000.000	BPPKAD

Pengawasan Pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran 2024 Kabupaten Banjarnegara

NO	URAIAN KEGIATAN	NOMINAL AKHIR	OPD
389	Bankeudes Pembangunan Talud Penahan Tebing Pengaman Pemukiman Desa Prendengen Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara	100.000.000	BPPKAD
390	Bankeudes Pengaspalan Jalan Bengkok Sampai MI Cokroaminoto Dukuh Sarangpanjang Jurang Desa Kesenet Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara	100.000.000	BPPKAD
391	Bankeudes Pengaspalan Jalan Dusun Kendaga Kidul Rt 02 Rw 01 Desa Kendaga Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara	100.000.000	BPPKAD
392	Bankeudes untuk rehab jalan aspal dan talud ruas jalan Kutayasa Majalenga Desa Majalenga Kec. Bawang	75.000.000	BPPKAD
393	Bankeudes Peningkatan jalan lingkar Dusun 2, Desa Sered, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara.	100.000.000	BPPPKAD
394	BANTUAN Hibah KEPADA MTs MAARIF RAKIT	100.000.000	DIKNAS
395	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan, rekening pemeliharaan bangunan pasa, rehab Tamkot (INDAGKOP)	200.000.000	DINDAGKOP
396	Pemeliharaan pasar (INDAGKOP)	30.000.000	DINDAGKOP
397	Pembangunan RKB untuk SDN 1 Gummingsir Kecamatan Pagentan	100.000.000	DINDIKPORA
398	Pembangunan gedung untuk SDN 2 Pagentan Kecamatan Pagentan	100.000.000	DINDIKPORA
399	Pembangunan ruang kantor dan guru untuk SDN 1 Babadan Kecamatan Pagentan	80.000.000	DINDIKPORA
400	Pembangunan gedung perpustakaan untuk SDN 2 Semangkung Kecamatan Pejawaran	110.000.000	DINDIKPORA
401	Hibah kepada MI GUPPI 02 Jembangan (untuk pagar kelling) Desa Jembangan Kec. Punggelan	40.000.000	DINDIKPORA
402	Bantuan Alat Olahraga untuk SD Negeri 1 Krangdegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara	75.000.000	DINDIKPORA
403	Pengadaan buku Pengayaan SD dan SMP	25.000.000	DINDIKPORA
404	BANTUAN HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN TALUD KEPADA TK PGRI AL IKHLAS DESA SUWIDAK RT 01 RW 01 KE. WANAYASA	70.000.000	DINDIKPORA
405	Program Pengelolaan Pendidikan Usia Dini	50.000.000	DINDIKPORA
406	Bantuan untuk Rehabilitas Atap SD N 2 Desa Karangjati Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara	100.000.000	DINDIKPORA
407	HIBAH KEPADA KONI BANJARNEGARA (UNTUK SARPRAS OLAHRAGA MASYARAKAT)	25.000.000	DINDIKPORA
408	Sarpras Pos PAUD Tunas Bangsa Desa Kutayasa Kec. Bawang	15.000.000	DINDIKPORA
409	BANTUAN HIBAH KEPADA KONI BANJARNEGARA (UNTUK SARPRAS OLAHRAGA MASYARAKAT)	10.000.000	DINDIKPORA
410	Hibah kepada Tk Pertiwi Situwangi Desa Situwangi Kec. Rakit (Rehab Ruang kelas)	100.000.000	DINDIKPORA
411	Hibah kepada KONI FOBM Kabupaten Banjarnegara	70.000.000	DINDIKPORA
412	Pembangunan Paving Halaman SD N 5 Petir, RT 04 RW 02, Dukuh Buaran Desa Petir Kec. Purwanegara	200.000.000	DINDIKPORA
413	Pembangunan Pagar Kelling dan Gapura Sekolah, SD N 3 Wanadri Desa Wanadri Kec. Bawang	200.000.000	DINDIKPORA
414	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD N Silegi 3 Lebakwangi Desa Lebakwangi Kec. Pagedongan	200.000.000	DINDIKPORA
415	Hibah KONI untuk PBSI	150.000.000	DINDIKPORA
416	Hibah KONI untuk POBSI	75.000.000	DINDIKPORA
417	Pembangunan gedung TK PERTIWI 2 Desa Somawangi kec. Mandiraja	50.000.000	DINDIKPORA
418	HIBAH KONI	30.000.000	DINDIKPORA

NO	URAIAN KEGIATAN	NOMINAL AKHIR	OPD
419	Sistem informasi aplikasi SMP	75.000.000	DINDIKPORA
420	Hibah untuk pembangunan RKB SDIT Bina Insan Desa Pucang Kecamatan Bawang	200.000.000	DINDIKPORA
421	Paving/siasi halaman SD N 3 Kesenet,kec Banjarmangu	100.000.000	DINDIKPORA
422	Rehabilitas Ruang Kelas SD N 2 Pesantren Kecamatan Wanayasa Kab. Banjarnegara	100.000.000	DINDIKPORA
423	Pengadaan Leptop dan alat Drumband SDN 1 Simbang Kecamatan Mandiraja	100.000.000	DINDIKPORA
424	Pengadaan mebelier siswa SMP N 1 Banjarnegara Jalan Dipayuda No. 9 Banjarnegara, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	100.000.000	DINDIKPORA
425	Hibah Kepada MI Cokroaminoto 02 Desa Badamita Kec. Rakit (Rehabilitasi Ruang Kelas)	100.000.000	DINDIKPORA
426	Rehab pengerecon SDN 1 Kalunjir kec.Banjarmangu	150.000.000	DINDIKPORA
427	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Dindukcapil)	75.000.000	DINDUKCAPIL
428	Peningkatan Kapasitas Aparatur (DINDUKCAPIL)	30.000.000	DINDUKCAPIL
429	Peningkatan pelayanan untuk Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara	50.000.000	DINDUKCAPIL
430	Sosialisasi Adminduk	150.000.000	DINDUKCAPIL
431	Perataan dan Pengurangan lahan Terminal karangkobar	175.000.000	DINHUB
432	Penerangan jalan lingkungan menerangi jalan desa dan kawasan Permukiman	1.000.000.000	DINHUB
433	Pembangunan pagar kelling untuk Puskesmas Pagentan 2	100.000.000	DINKES
434	Pembangunan pagar kelling dan pos keamanan Puskesmas 1 Punggelan Kec. Punggelan	100.000.000	DINKES
435	Hibah Kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banjarnegara	100.000.000	DINKES
436	Pengadaan sarana fasilitas pelayanan	100.000.000	DINKES
437	PEMBANGUNAN RUANG REKAM MEDISPUSKESMAS KARANGKOBAR KEC. KARANGKOBAR	200.000.000	DINKES
438	Penyuluhan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan dan Angka Kematian Bayi (AKB) diKecamatan Wanadadi, Rakit dan Punggelan	100.000.000	DINKES
439	Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara	100.000.000	DINKES
440	Hibah kepada DPD PPNI Kabupaten Banjarnegara	50.000.000	DINKES
441	Pembangunan pagar kelling Puskesmas 1 Purwareja Klampok.	100.000.000	DINKES
442	Pembangunan pagar kelling Puskesmas Susukan 2 Kec. Susukan	100.000.000	DINKES
443	Program Jambanisasi Desa Blambangan Desa Blambangan Kec. Bawang	50.000.000	DINKES
444	Penyuluhan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan dan Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)	100.000.000	DINKES
445	Penyuluhan tentang gizi untuk masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara	100.000.000	DINKES
446	Pembangunan talud pengaman untuk Puskesmas Sigaluh 1	100.000.000	DINKES
447	Sosialisasi Pencegahan Penyakit Menular HIV	100.000.000	DINKES
448	ENGELOLANA PELAYANAN GIZI MASYARAKAT	100.000.000	DINKES
449	Sosialisasi penurunan AKI dan AKB	100.000.000	DINKES
450	Penyuluhan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan dan Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)	100.000.000	DINKES

Pengawasan Pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran 2024 Kabupaten Banjarnegara

NO	URAIAN KEGIATAN	NOMINAL AKHIR	OPD
451	Pembangunan ruang laboratorium Puskesmas 1 Mandiraja	100.000.000	DINKES
452	Rehab dan pembangunan sarana prasarana Puskesmas Pembantu Desa Kecepit Kecamatan Punggelan	100.000.000	DINKES
453	Analisis Perlindungan Sosial Keluarga Petani Miskin di Kabupaten Banjarnegara	100.000.000	DINSOS
454	Pengadaan buku untuk Perpustakaan Daerah Kabupaten Banjarnegara	180.000.000	DISARPUS
455	Pengadaan buku untuk Perpustakaan Daerah Kabupaten Banjarnegara	200.000.000	DISARPUS
456	Hibah kepada Grup Kuda Kepang Wahyu Turonggo Budoyo Dusun Kepering Desa Punggelan Kec. Punggelan	30.000.000	DISPARBUD
457	Hibah pembelian alat musik gamelan untuk Kelompok Cakra Wirama Dusun 3 RT 03 RW 03 Desa Karangsalam Kecamatan Susukan	25.000.000	DISPARBUD
458	Hibah pembelian wayang kulit dan gamelan untuk Kelompok Joyo Laras RT 02 RW 06 Desa Susukan Kecamatan Susukan	25.000.000	DISPARBUD
459	HIBAH KEPADA PAGUYUBAN KUDA KEPANG "NGESTI LARAS" DESA GUMIWANG KECAMATAN PURWANEGARA	30.000.000	DISPARBUD
460	Hibah untuk sarpras Grup Rebana Al Huda Desa Kutawuluh Kec. Purwanegara (melalui NU)	25.000.000	DISPARBUD
461	Bantuan Keuangan Kelompok Seni Group Rebana ALBARIQLI Dusun Krajan Rw 02 Kadus 2 Desa Pekandangan Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara	20.000.000	DISPARBUD
462	Bantuan Hibah Kepada majelis taklim Nurul Huda Dukuh Tegalsari RT 02 RW 03 Desa Wanayasa kec. Wanayasa (MD)	20.000.000	DISPARBUD
463	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu di Kabupaten Banjarnegara	100.000.000	DISPERMADES
464	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN (DISPERMADES)	60.000.000	DISPERMADES
465	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	90.000.000	DISTANKAN KP
466	Pembangunan Jaringan Irigasi Tani, Kelompok Tani SIDA MAKMUR Dusun Kalicing Desa Kalimandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara	180.000.000	DISTANKAN KP
467	Pembangunan JUT Kelompok Tani Lestari RT Krinjing Dusun Dogleg Desa Tanjungtirta Kec Punggelan	100.000.000	DISTANKAN KP
468	Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani SEDYA UTAMA, Rt 05 Rw 05 Dusun Krajan Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara	110.000.000	DISTANKAN KP
469	Pembangunan Jalan Usaha Tani Sawah Grompong Kelompok Tani NGUDI RAHYAU Rt 03 Rw 01 Dusun Mlaya Desa Mlaya Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara	50.000.000	DISTANKAN KP
470	Pembangunan rabat beton JUT Blok 6 Sajab, Desa Kalilandak Kec. Purwareja Klampok	100.000.000	DISTANKAN KP
471	Bantuan untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Gua Jajaran, kelompok Tani Ngudi Rahayu Desa Batur Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara	75.000.000	DISTANKAN KP
472	Pembangunan JUT Kelompok Tani NGUDI RAHYAU Desa Pesantren Kecamatan Wanayasa	75.000.000	DISTANKAN KP
473	Pembangunan JUT Desa Slatri Kecamatan Karangkobar	75.000.000	DISTANKAN KP
474	Pengadaan bibit durian simpamang	150.000.000	DISTANKAN KP
475	Pembangunan Jalan Usaha Tani Dukuh Pasempon Rt. 04 Rw. 01 Kelompok Tani Eka Bakti 1 Desa Jatilatunda Kecamatan Mandiraja	100.000.000	DISTANKAN KP
476	Pengaspalan jalan lingkungan RT 02 RW 06 Kelurahan Parakancanggah Kec. Banjarnegara	100.000.000	DPKPLH
477	Pembangunan SAB RW III Kelurahan Semampir Kec. Banjarnegara	100.000.000	DPKPLH

NO	URAIAN KEGIATAN	NOMINAL AKHIR	OPD
478	Peningkatan Jalan RT 01 RW 03 Dusun Krenan Desa Semarang Kec. banjarnegara	100.000.000	DPKPLH
479	Pembangunan rabat beton, talud dan drainase jalan lingkungan RT 01 , RT 05 RW 03 dan RT 02 RW 01 Kelurahan Karangtengah Kec. Banjarnegara	110.000.000	DPKPLH
480	Pemb. Talud jln lingkungan dkh selo rt04/03 kel.Semarang kec.Banjarnegara	100.000.000	DPKPLH
481	Pembangunan jln lingkungan Rt 02/05 wanatangi Kel.Argasoka	75.000.000	DPKPLH
482	Pembangunan talud pengaman permukiman dusun buratan rt 02 rw 02 desa kesenet kec. Banjarmangu	100.000.000	DPKPLH
483	Pembangunan SAR RT 1 RW 1 kelurahan semampir kec Banjarnegara	150.000.000	DPKPLH
484	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB), Rt 001 Rw 002 Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kab. Banjarnegara	200.000.000	DPKPLH
485	Pembangunan Talud Pengaman Pemukiman Rt 02/01 Gumelem Wetan Kec. Susukan	100.000.000	DPKPLH
486	Pengaspalan jalan lingkungan RT 01 RW 06 Komplek Kepatihan Kelurahan Kutabanjarnegara Kec. Banjarnegara	150.000.000	DPKPLH
487	Pengaspalan jln lingkungan rt 02 dan rt 03 rw 01 kel. Kutabanjarnegara	150.000.000	DPKPLH
488	Pembangunan Talud di Dusun Jebug pada ruas jalan Punggelan - Jembangan	100.000.000	DPUPR
489	Pembangunan Talud Pengaman jalan ruas Jalan Wanadadi Punggelan	200.000.000	DPUPR
490	Fasilitasi sarana perdagangan Dinas Indagkop	100.000.000	DISPERINDAGKOP
491	Kegiatan diklat jurnalistik IPIT melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara	30.000.000	DINKOMINFO
TOTAL			30.599.500.000

Pengawasan Pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran 2024 Kabupaten Banjarnegara



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KEGIATAN APBD KAB. BANJARNEGARA TAHUN 2024
Jalan Mayjend Panjaitan Nomor : 13 Telp/Fax 0286-591710
Sms Center 081228124447 Banjarnegara 53415
<http://dpu.banjarnegarakab.go.id> e-mail : dpupr@banjarnegarakab.go.id

LAPORAN PENGAWASAN PELAKSANAAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
APBD TAHUN ANGGARAN 2024

OPD :

A. DATA POKOK PIKIRAN

Kegiatan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	Rehabilitasi Jalan
Jenis Kegiatan	Pembangunan Talud Pengaman Jalan Ruas Jalan Wanafadi - Punggelan
Jumlah Anggaran	Rp. 200.000.000,- (Pagu Anggaran) Rp. 194.400.000,- (Kontak)
Lokasi	Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan
Pelaksana	CV Sumber Rejeki

B. PROGRES POKOK PIKIRAN

Realisasi Fisik	Talud (30%)
Realisasi Keuangan	Rp. 97.200.000 (50%)
Target Penyelesaian	5-Desember-2024

C. PENERIMA MANFAAT POKOK PIKIRAN

Kegiatan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	Rehabilitasi Jalan
Penerima Manfaat	Pengguna Jalan dan Masyarakat sekitar

D. DOKUMENTASI PENGAWASAN PELAKSANAAN POKIR



Banjarnegara, 4 September 2024

KEPALA DINAS DPUPR
KABUPATEN BANJARNEGARA

YUSUF WINARSONO, ST, MT.

NIP.19710507 199803 1 007

Proyek dari dana Pokok-pokok pikiran yang dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KEGIATAN APBD KAB. BANJARNEGARA TAHUN 2024
Jalan Mayjend Panjaitan Nomor : 13 Telp/Fax 0286-591710
Sms Center 081228124447 Banjarnegara 53415
<http://dpu.banjarnegarakab.go.id> e-mail : dpupr@banjarnegarakab.go.id

**LAPORAN PENGAWASAN PELAKSANAAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
APBD TAHUN ANGGARAN 2024**
OPD :

A. DATA POKOK PIKIRAN

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jalan
Jenis Kegiatan : Pembangunan Talud di Dusun Jebug Pada Ruas Jalan Punggelan - Jembangan
Jumlah Anggaran : Rp. 100.000.000,- (Pagu Anggaran)
Rp. 95.525.000,- (Kontrak)
Lokasi : Dusun Jebug, Kecamatan Punggelan
Pelaksana : CV. TIGA PUTRA

B. PROGRES POKOK PIKIRAN

Realisasi Fisik : Talud (30%)
Realisasi Keuangan : Rp. 47.762.500 (50%)
Target Penyelesaian : 5-Desember-2024

C. PENERIMA MANFAAT POKOK PIKIRAN

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jalan
Penerima Manfaat : Pengguna Jalan dan Masyarakat sekitar

D. DOKUMENTASI PENGAWASAN PELAKSANAAN POKIR

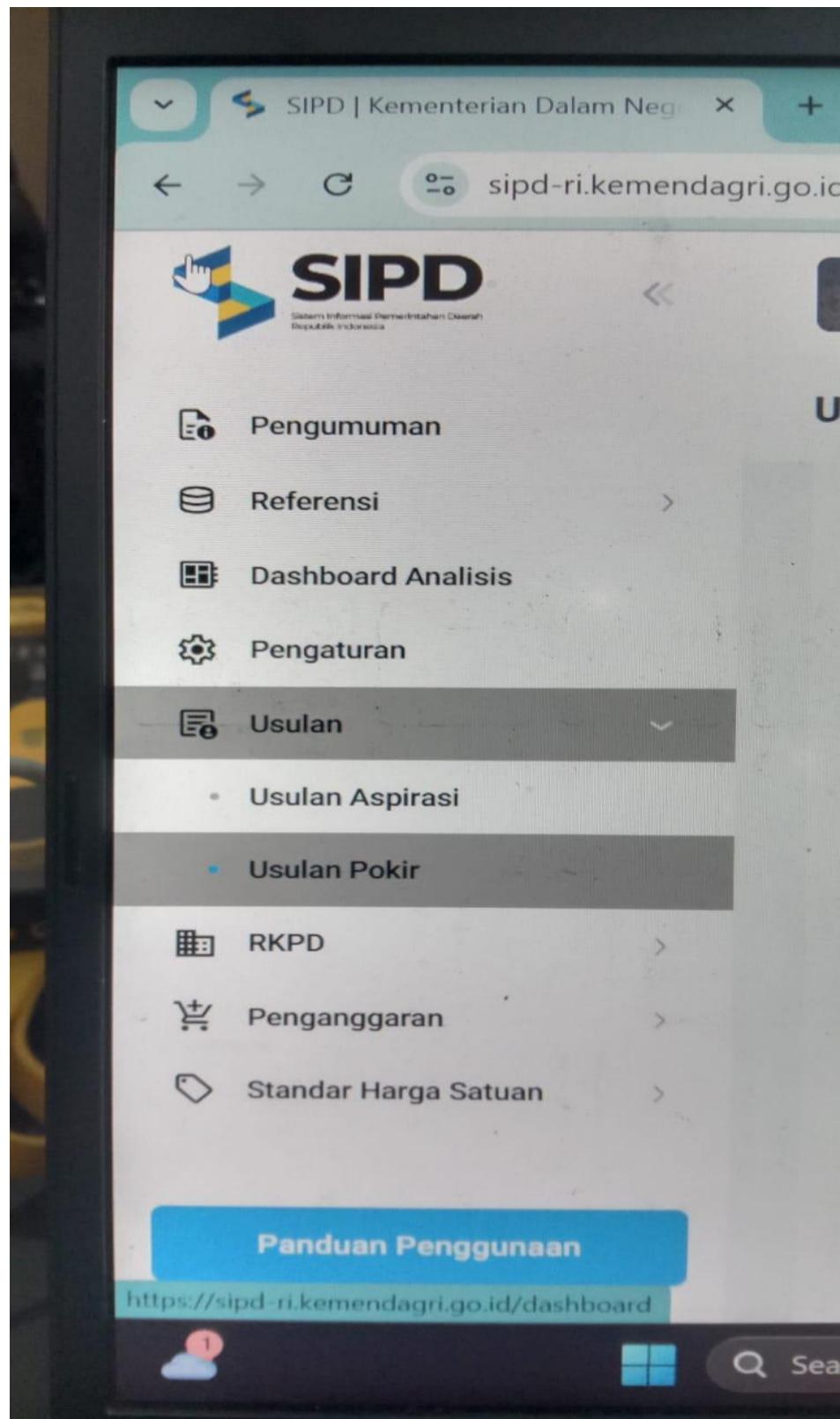


Banjarnegara, 4 September 2024

KEPALA DINAS DPUPR
KABUPATEN BANJARNEGARA

YUSUF WINARSONO, ST, MT.
NIP.19710507 199803 1 007

Proyek dari dana Pokok-pokok pikiran yang dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara



Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Letjend Suprapto No. 234 A Semampir Telp. (0286) 591012/591189 Fax. 594015
E-mail : disnakerbanjarnegara@yahoo.co.id dan perijinan_terpadu@banjarnegarakab.go.id
Website : www.disnakerpmptsp.banjarnegarakab.go.id
BANJARNEGARA 53418

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 503/3/Naker PMPTSP/2024

Berdasarkan

- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
- 2 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara
- 3 Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara Nomor : 000.9/300/Bakesbangpol/2024 tanggal 28 November 2024 perihal Rekomendasi Izin Penelitian a.n LATIF

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara memberikan izin penelitian kepada :

Nama	:	LATIF
Tempat, tanggal lahir	:	Banjarnegara, 16 Mei 1996
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat Instansi	:	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Alamat Rumah	:	Desa Beji RT 001 RW 003 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara
No. Hp / email	:	085229340716 / latifunar@gmail.com
Judul Penelitian	:	Pengelolaan Dana Pokok - Pokok Pikiran Studi di Kabupaten Banjarnegara
Lokasi Penelitian	:	SETDA, BAPERLITBANG, DPUPR
Penanggung Jawab	:	Dr. Tholkhatur Khoir, M.Ag.
Anggota	:	-

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bawa pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tidak untuk disalah gunakan dengan maksud dan tujuan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Bawa sebelum melaksanakan tugas kepada responden agar terlebih dahulu melaporkan pada Pejabat Wilayah/Kepada Dinas/Instansi setempat guna dimintakan petunjuk teknis seperlunya;
3. Bawa setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud, yang bersangkutan wajib melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara dalam bentuk softcopy dan format PDF ke email: baperlitbang@banjarnegarakab.go.id.;
4. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku dari 25 November 2024 sampai dengan 25 Januari 2025 dan dapat diperbarui kembali.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 06 Desember 2024 00:00:00



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
2. Sekretaris Daerah Kab. Banjarnegara;
3. Kepala Bakesbangpol Kab. Banjarnegara;



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh BSsE (Balai Sertifikasi Elektronik)

Surat penelitian ke Dinas terkait di kabupaten Banjarnegara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 3094/Un.10.6/D1/KM.05.01/10/2024
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

31 Oktober 2024

Yth.
Anggota DPRD Kab. Banjarnegara
Serta Pihak terkait
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan **Penulisan Skripsi** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul **"Pengelolaan Dana Pokok-Pokok Pikiran Studi di Kabupaten Banjarnegara"** di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Latif
NIM : 2106016102
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Banjarnegara, 16 Mei 1996
CP/e-mail : latiftunar@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Tuharno
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Bendawuluh Rt:01/Rw:03, Desa Beji,
: Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Surat Penelitian Kepada Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara

CURICULUM VITAE



Nama : Latif
TTD : Banjarnegara, 16 Mei 1996
Alamat : Dusun Bendawuluh, RT:01/RW:03,
: Desa Beji, Kecamatan Banjarmangu
Nim : 2106016102
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
IPK : 3.81
Agama : Islam
E-mail : latiftunar@gmail.com
HP : 085229340716

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Cokroaminoto Beji
2. SMP Negeri 2 Banjarmangu
3. PKBM Insan Mandiri Banjarmangu
4. S1 Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang

RIWAYAT ORGANISASI

1. LPM Reference